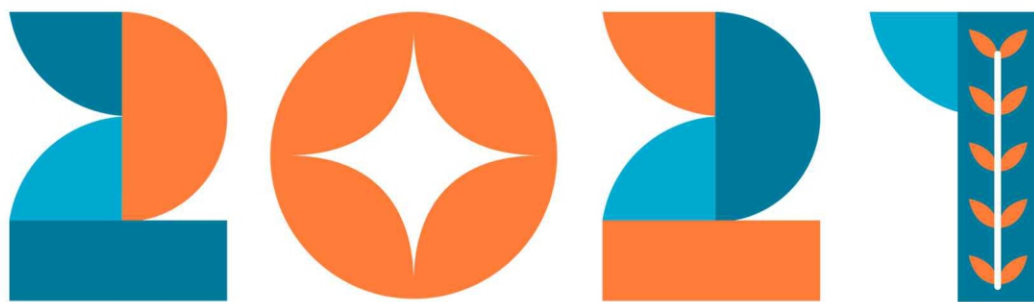


LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

TAHUN —————





KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kami bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala atas selesainya penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bogor Tahun 2021. Proses penyusunan telah melalui tahapan penyusunan yang berlangsung lancar, sehingga kami dapat menyampaikan LPPD Kota Bogor Tahun 2021 sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.

Menjadi kewajiban Pemerintah Kota Bogor untuk menyusun, menyampaikan dan mempertanggungjawabkan seluruh substansi LPPD dan EKPPD Kota Bogor Tahun 2021 kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sesuai ketentuan yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Buku laporan ini terdiri atas 5 bab, masing-masing adalah Bab Pendahuluan, Bab Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bab Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan, Bab Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal, dan terakhir Bab Penutup.

Pada keseluruhan bab tersebut diuraikan tentang kebijakan pembangunan Kota Bogor tahun 2021 yang mengacu pada RPJMD Kota Bogor Tahun 2019 - 2024, realisasi APBD Kota Bogor Tahun 2021, pelaksanaan dan hasil dari upaya menangani 24 urusan wajib dan 6 urusan pilihan, Urusan Pemerintah Daerah Fungsi Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum serta penanganan kegiatan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

Kami menyadari sepenuhnya, bahwa sebagaimana yang tertuang di dalam laporan ini, masih banyak kelemahan dan kekurangan pada upaya kami mengatasi begitu banyak permasalahan yang muncul di dalam pengelolaan pemerintahan daerah di Kota Bogor. Namun demikian isi laporan ini hendaknya dapat ditelaah dan dikaji secara mendalam serta dikritisi secara proporsional.



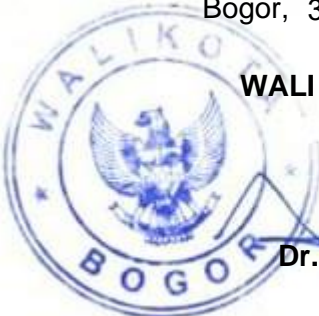

Dengan demikian, kami akan mendapatkan berbagai bahan masukan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas kinerja Pemerintah Kota Bogor dalam mengelola penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai azas otonomi daerah, serta untuk terus mendorong terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat warga Kota Bogor yang lebih baik.

Berbagai sukses dan capaian-capaian yang telah diraih itu, tentunya tidak terlepas dari kerjasama yang terbangun antara Pemerintah Kota Bogor dengan berbagai instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan berbagai elemen masyarakat. Dengan demikian, kepada semua pihak yang telah mengulurkan kerjasama kami ucapkan terimakasih dan kami sampaikan penghargaan atas segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan.

Akhirnya, kami sampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kota Bogor Tahun 2021 kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala selalu membimbing dan melindungi kami semua dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang telah diamanahkan.

Wassalam

Bogor, 31 Maret 2021

 **WALI KOTA BOGOR,**

Dr. BIMA ARYA



DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	III
DAFTAR TABEL.....	V
DAFTAR GAMBAR.....	VII
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.1.1 Penjelasan Umum.....	I-2
A. Undang Undang Pembentukan Daerah.....	I-2
B. Data Geografis Wilayah.....	I-4
C. Jumlah Penduduk.....	I-6
D. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan.....	I-7
E. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah.....	I-9
F. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	I-17
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah.....	I-18
A. Permasalahan Pembangunan Daerah.....	I-18
B. Visi dan Misi Kepala Daerah.....	I-23
C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah.....	I-23
D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.....	I-24
E. Perencanaan Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah..	I-41
1.1.3 Penerapan Standar Minimal.....	I-58
A. Latar Belakang.....	I-58
B. Dasar Hukum.....	I-59
C. Kebijakan Umum.....	I-60
D. Arah Kebijakan.....	I-61
E. Fokus Layanan.....	I-62

BAB II	CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN	
	PEMERINTAHAN DAERAH.....	II-77
	2.1 Indikator Kinerja Makro.....	II-77
	A. Indeks Pembangunan Manusia.....	II-77
	B. Angka Kemiskinan.....	II-78
	C. Angka Pengangguran.....	II-78
	D. Pertumbuhan Ekonomi.....	II-79
	E. Pendapatan Per-Kapita.....	II-79
	F. Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini).....	II-79
	2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan	
	Pemerintahan.....	II-80
	2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran.....	II-81
	2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil.....	II-111
	2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang	
	Pemerintahan.....	II-121
	2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah.....	II-123
BAB III	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS	
	PEMBANTUAN.....	III-233
	A. Tugas Pembantuan yang Diterima.....	III-233
	B. Tugas Pembantuan yang Diberikan.....	III-234
BAB IV	PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN	
	MINIMAL.....	III-235
	4.1 Bidang Urusan Pendidikan.....	III-235
	4.2 Bidang Urusan Kesehatan.....	III-237
	4.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang...	III-245
	4.4 Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan	
	Pemukiman.....	III-255
	4.5 Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan	
	Perlindungan Masyarakat.....	III-259
	4.6 Bidang Urusan Sosial.....	III-268
BAB V	PENUTUP.....	V-283



DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bogor	I-6
1.2 Daftar Kelurahan Se-Kota Bogor	I-7
1.3 Rekapitulasi Perangkat Daerah, Unit Kerja dan Jumlah Pegawai Kota Bogor Tahun 2021	I-10
1.4 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bogor Tahun 2021-2022	I-24
1.5 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024	I-36
2.1 Indikator Makro Pembangunan Kota Bogor Tahun 2020 –2021	II-77
2.2 Pencapaian Rumah Tangga ber PHBS per Kecamatan Tahun 2016 s/d 2021	II-132
2.3 Capaian 10 Indikator PHBS RT Tahun 2017 s/d 2021	II-132
2.4 Total Luas Kawasan Kumuh Per Kecamatan	II-145
2.5 Data Status Mutu Air dengan Metode Indeks Pencemar Tahun 2021	II-157
2.6 Indeks Kualitas Air	II-157
2.7 Penyerapan Tenaga Kerja Tahun 2021	II-199
2.8 Sebaran Keluarga Berdasarkan Kategori Indeks Ketahanan Keluarga dan Kecamatan	II-206
2.9 Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut komoditas dan kelompok pengeluaran	II-214
2.10 Rata-rata konsumsi kalori per kapita sehari menurut kelompok komoditas makanan dan kelompok pengeluaran	II-215
2.11 Rata-rata konsumsi protein per kapita sehari menurut kelompok komoditas makanan dan kelompok pengeluaran	II-215
2.12 Rincian Panjang Jalan Kota Beserta Kondisi Permukaannya	II-222
2.13 Realisasi Penerimaan PAD Kota Bogor Tahun 2016-2021	II-225



2.14	Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020-2021	II-228
4.1	Data PMKS/PPKS Sasaran Garapan SPM Sosial Tahun 2020– 2024	IV-269
4.2	Target Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2021	IV-271
4.3	Realisasi SPM Tahun 2021	IV-272
4.4	Evaluasi Penerapan SPM sesuai PP 2 Tahun 2018	IV-279
4.5	Alokasi Anggaran Sumber Dana APBD Kota Bogor	IV-280
5.1	Daftar Dokumen Perjanjian Kerja Sama	V-287
5.2	Daftar Dokumen Kesepakatan Bersama	V-292
5.3	Daftar Inovasi Tahun 2021	V-298



DAFTAR GAMBAR

1.1	Kegiatan Sosialisasi Pembangunan SPALDT Skala Permukiman di Kelurahan Bojongkerta Kecamatan Bogor Selatan	I-66
1.2	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman di Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Bogor Selatan	I-67
1.3	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat di Kelurahan Sindangbarang Kecamatan Bogor Barat	I-67
1.4	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat di Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara	I-67
1.5	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat di Kelurahan Harjasari Kecamatan Bogor Selatan	I-68
1.6	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat di Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Bogor Selatan	I-68
1.7	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	I-68
1.8	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman di Kelurahan Sindangsari Kecamatan Bogor Timur	I-69
1.9	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman di Kelurahan Gunung Batu Kecamatan Bogor Barat	I-69
1.10	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman di Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara	I-69
1.11	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman di Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara, Penyediaan Sarana Pengangkut Lumpur Tinja, Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	I-70



- | | | |
|------|---|------|
| 1.12 | Foto kondisi awal rumah terdampak bencana dan verifikasi oleh tim | I-71 |
| 1.13 | Foto proses perbaikan 50% rumah terdampak bencana | I-72 |

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR**

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk Tahun Anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Ini.

Bogor, 31 Maret 2022

INSPEKTUR DAERAH KOTA BOGOR,



[Handwritten Signature]
BORG. RUPUNG W. PURNAMA, M.Si., QGIA
Pembina Utama Muda/IV-c
NIP 19700715 199009 1 002



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kota Bogor harus senantiasa berlandaskan pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan mengatur tentang otonomi daerah, yang menjadi bagian dari penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang Undang Dasar Tahun 1945.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran merupakan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan Undang-Undang pengganti dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menyebutkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat. Dalam Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah yang dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Akhir Tahun Anggaran pada dasarnya merupakan laporan berkelanjutan atas kinerja pembangunan selama satu tahun dan menjadi kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kegagalan dan keberhasilan pencapaian indikator kinerja akan dijadikan sebagai acuan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan Kota Bogor di tahun mendatang dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan.

1.1.1 Penjelasan Umum

A. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Kota Bogor mempunyai sejarah yang panjang dalam Pemerintahan, mengingat sejak zaman Kerajaan Pajajaran sesuai dengan bukti-bukti yang ada seperti dari Prasasti Batu Tulis, nama-nama kampung seperti dikenal dengan nama Lawanggintung, Lawang Saketeng, Jerokuta, Baranangsiang dan Leuwi Sipatahunan diyakini bahwa Pakuan sebagai Ibukota Pajajaran terletak di Kota Bogor.

Pada tahun 1745 Gubernur Jendral Hindia Belanda bernama Baron Van Inhoff membangun Istana Bogor, seiring dengan pembangunan jalan Raya Daenless yang menghubungkan Batavia dengan Bogor, sehingga keadaan Bogor mulai berkembang. Pada masa pendudukan Inggris yang menjadi Gubernur Jendralnya adalah Thomas Rafless, beliau cukup berjasa dalam mengembangkan Kota Bogor, dimana Istana Bogor direnovasi dan sebagian tanahnya dijadikan Kebun Raya (*Botanical Garden*), beliau juga memperkerjakan seorang *planner* yang bernama Carsens yang menata Bogor sebagai tempat peristirahatan yang dikenal dengan *Buitenzoorg*.

Setelah Pemerintahan kembali kepada Hindia Belanda pada Tahun 1903, terbit undang-undang desentralisasi yang bertujuan menghapus sistem pemerintahan tradisional diganti dengan sistem administrasi pemerintahan modern sebagai realisasinya dibentuk *Staadsgemeente* diantaranya adalah:

1. Gemeente Batavia (S. 1903 No.204);
2. Gemeente Meester Cornelis (S. 1905 No.206);
3. Gemeente Buitenzoorg (S. 1905 No.208);
4. Gemeente Bandoeng (S. 1906 No.121);
5. Gemeente Cirebon (S. 1905 No.122);
6. Gemeente Soekabumi (S. 1914 No.310)

(*Regeringsalmanak Voor Nederlandsh Indie 1928 : 746-748*)

Pada tahun 1922 sebagai akibat dari ketidakpuasan terhadap peran desentralisasi yang ada maka terbentuklah *Bestuursher Voorings Ordonantie*



atau undang-undang perubahan Tata Pemerintahan Negeri Hindia Belanda (*Staatsblad* 1922 No. 216), sehingga pada tahun 1922 terbentuklah *Regentschaps Ordonantie* (*Ordonantie* Kabupaten) yang membuat ketentuan-ketentuan daerah otonomi kabupaten (*Staatsblad* 1925 No. 79). Provinsi Jawa Barat dibentuk pada tahun 1925 (*Staatsblad* 1924 No. 378 *bij Propince West Java*) yang terdiri dari 5 keresidenan, 18 kabupaten (*Regentscape*) dan kotapraja (*Staads Gemeente*). *Buitenzoorg* (Bogor) menjadi salah satu *Staads Gemeente* di Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan (*Staatsblad* 1905 No. 208 jo. *Staatsblad* 1926 No. 368), dengan prinsip desentralisasi *modern*.

Pada masa setelah kemerdekaan yaitu setelah pengakuan kedaulatan RI, Pemerintahan di Kota Bogor namanya menjadi Kota Besar Bogor yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954. Dasar pertimbangan pengesahan undang-undang tersebut adalah untuk membentuk daerah-daerah Kota Besar yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selanjutnya pada tahun 1957 nama pemerintahan berubah menjadi Kota Praja Bogor, sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, kemudian dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah berubah kembali menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor diubah menjadi Kota Bogor.

Selain memperhatikan undang-undang tentang pembentukan Kota Bogor, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bogor Tahun 2021 ini disusun dengan mempertimbangkan dasar hukum lainnya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
8. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
10. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

B. Data Geografis Wilayah

Secara geografis, Kota Bogor berada pada posisi diantara 106 derajat 43'30"BT-106 derajat 51'00"BT dan 30'30" LS-6 derajat 41'00" LS, atau kurang lebih 60 Km ke arah Selatan ibukota Jakarta. Kota Bogor mempunyai luas wilayah mencapai 118.50 km² atau hanya 0.27 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Barat. Terbagi atas 6 kecamatan dan 68 kelurahan yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bogor dengan batas-batas:

- Sebelah Utara:

Berbatasan dengan Kecamatan Kemang, Kecamatan Bojong Gede, dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.



- Sebelah Timur :
Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.
- Sebelah Barat:
Kecamatan Dramaga, Kecamatan Kemang dan Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.
- Sebelah Selatan:
Kecamatan Cijeruk dan Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.

Kota Bogor merupakan kota yang sangat strategis karena berada di tengah-tengah Kabupaten Bogor. Kota Bogor mempunyai wilayah dengan kontur berbukit dan bergelombang dengan ketinggian bervariasi antara 190 m sampai dengan 350 m di atas permukaan laut. Seluas 1.763,94 Ha merupakan lahan datar dengan kemiringan berkisar 0-2%, seluas 891,27 Ha merupakan lahan landai dengan kemiringan berkisar 2-15%, seluas 109,89 Ha merupakan lahan agak curam dengan kemiringan 15-125%, seluas 764,96 Ha merupakan lahan curam dengan kemiringan 25-40%, dan lahan sangat curam seluas 119,94 Ha dengan kemiringan lebih dari 40%.

Berdasarkan hasil foto udara citra landsat, diketahui sebagian dari total wilayah Kota Bogor merupakan kawasan yang sudah terbangun, kecuali di wilayah Kecamatan Bogor Selatan. Area terbangun paling luas berada di wilayah Kecamatan Bogor Tengah.

Udara di Kota Bogor cukup sejuk dengan suhu udara rata-rata tiap bulannya mencapai 33,9⁰C, dengan suhu terendah 18,8⁰C dan suhu tertinggi 36,1⁰ C. Suhu seperti itu antara lain dipengaruhi guyuran hujan dengan intensitas rata-rata 3.654 per tahun, dan curah hujan bulanan berkisar antara 79,0 – 652,0 mm dengan rata-rata hujan 14 hari per bulan dan kelembaban udara 70%. Sedangkan kecepatan angin rata-rata per tahun 2 km/jam dengan arah Timur Laut.

Kualitas udara Kota Bogor secara keseluruhan dapat dikatakan baik atau sehat. Beberapa parameter kualitas udara Kota Bogor relatif tidak membahayakan lingkungan, karena gas-gas dan partikulat tersuspensi yang dihasilkan, pada umumnya masih di bawah ambang batas baku

mutu udara ambien. Namun kadar debu dan tingkat kebisingan pada beberapa lokasi masih berada di atas persyaratan ambang batas yang ditentukan.

Untuk kualitas air, pada umumnya kualitas air sungai di wilayah Kota Bogor kurang memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001. Hal itu disebabkan beberapa unsur seperti sulfat, fosfat, nitrat dan jumlah total coliform dalam air sungai, melebihi kriteria baku. Kondisi yang mirip juga terdapat pada air situ yang umumnya berkualitas di bawah persyaratan baku mutu. Sedangkan air sumur penduduk, nilai pH-nya cenderung fluktuatif, dan di beberapa lokasi kandungan detergen dan bakteri koli sedikit diatas kriteria yang disyaratkan.

C. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Jumlah Penduduk Tahun 2021 mencapai 1.091.396 jiwa, dengan jumlah penduduk tertinggi di Kecamatan Bogor Barat sebanyak 248.227 atau 22,74% sedangkan untuk jumlah penduduk terendah terdapat di Kecamatan Bogor Tengah sebanyak 106.518 atau 9,76% dari total jumlah penduduk sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bogor

Kecamatan/ Subdistricts	Luas/Area		KK	L	P	Penduduk (Orang)/Population (Person)	
	Km2	%	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	%
Bogor Selatan	30,81	26,00	66.061	107.996	103.765	211.761	19,40
Bogor Timur	10,15	8,57	33.925	53.744	52.774	106.518	9,76
Bogor Utara	17,72	14,95	61.988	98.979	96.521	195.500	17,91
Bogor Tengah	8,13	6,89	36.384	53.849	53.693	107.542	9,85
Bogor Barat	32,85	27,72	79.892	125.057	123.170	248.227	22,74
Tanah Sareal	18,84	15,90	69.540	111.995	109.853	215.869	19,78
			347.790	551.620	539.776	1.091.396	



Upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintahan baik dengan melaksanakan urusan wajib maupun urusan pilihan, baik urusan yang diurus langsung dalam tataran otonomi maupun dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta hasil partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, telah mendorong peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di Kota Bogor. Hal ini tercermin antara lain dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pada tahun 2021 mencapai 76,59, meningkat 0,631 basis poin dari IPM yang dicapai pada tahun 2020 yang berada pada titik 76,11.

D. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan

Kota Bogor mempunyai luas wilayah mencapai 118.50 km² atau hanya 0.27 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Barat. Terbagi atas 6 kecamatan dan 68 kelurahan.

Tabel 1.2
Daftar Kelurahan Se-Kota Bogor

No.	Kecamatan	Kelurahan
1.	Kecamatan Bogor Selatan	Kelurahan Lawanggintung Kelurahan Batutulis Kelurahan Bondongan Kelurahan Empang Kelurahan Cikaret Kelurahan Pamoyanan Kelurahan Ranggamekar Kelurahan Mulyaharja Kelurahan Kertamaya Kelurahan Harjasari Kelurahan Muarasari Kelurahan Genteng Kelurahan Pakuan Kelurahan Cipaku



- Kelurahan Bojongkerta
 - Kelurahan Rancamaya
- 2. Kecamatan Bogor Barat
 - Kelurahan Menteng
 - Kelurahan Semplak
 - Kelurahan Pasir Kuda
 - Kelurahan Gunung Batu
 - Kelurahan Sindang Barang
 - Kelurahan Bubulak
 - Kelurahan Marga Jaya
 - Kelurahan Balumbang Jaya
 - Kelurahan Situ Gede
 - Kelurahan Curug Mekar
 - Kelurahan Curug
 - Kelurahan Pasir jaya
 - Kelurahan Pasir Mulya
 - Kelurahan Loji
 - Kelurahan Cilendek Barat
 - Kelurahan Cilendek Timur
- 3. Kecamatan Tanah Sareal
 - Kelurahan Tanah Sareal
 - Kelurahan Kebon Pedes
 - Kelurahan Kedung Badak
 - Kelurahan Sukaesmi
 - Kelurahan Kedung Waringin
 - Kelurahan Kedung Jaya
 - Kelurahan Sukadamai
 - Kelurahan Mekarwangi
 - Kelurahan Kencana
 - Kelurahan Kayumanis
 - Kelurahan Cibadak
- 4. Kecamatan Bogor Tengah
 - Kelurahan Pabaton
 - Kelurahan Paledang
 - Kelurahan Babakan



-
- Kelurahan Sempur
 - Kelurahan Tegallega
 - Kelurahan Babakan Pasar
 - Kelurahan Gudang
 - Kelurahan Panaragan
 - Kelurahan Kebon Kalapa
 - Kelurahan Cibogor
 - Kelurahan Ciwaringin
 - 5. Kecamatan Bogor Utara
 - Kelurahan Tegal Gundil
 - Kelurahan Bantarjati
 - Kelurahan Cibuluh
 - Kelurahan Kedung Halang
 - Kelurahan Ciparigi
 - Kelurahan Ciluar
 - Kelurahan Tanah Baru
 - Kelurahan Cimahpar
 - 6. Kecamatan Bogor Timur
 - Kelurahan Sukasari
 - Kelurahan Baranangsiang
 - Kelurahan Tajur
 - Kelurahan Katulampa
 - Kelurahan Sindangsari
 - Kelurahan Sindangrasa

E. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah berikut kami sampaikan data yang dimaksud.

Tabel 1.3
Rekapitulasi Perangkat Daerah, Unit Kerja dan Jumlah Pegawai
Kota Bogor Tahun 2021

No	Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat	Jumlah Pegawai
1	Sekretariat Daerah	a. Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	187
		b. Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	
		c. Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	
		d. Asisten Administrasi Umum Setda	
		e. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda	
		f. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda	
2	Sekretariat DPRD	a. Kepala Bagian Umum	56
		b. Bagian Fasilitasi Penganggaran, Pengawasan, dan Kehumasan	
		c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	
		d. Bagian Perencanaan dan Keuangan	
3	Inspektorat Daerah	g. Sekretaris Inspektorat Daerah	50
		h. Inspektur Pembantu I	
		i. Inspektur Pembantu II	
		j. Inspektur Pembantu III	
		k. Inspektur Pembantu Khusus	
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	l. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	46
		m. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
		n. Bidang Perencanaan, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
		o. Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah	
		p. Bidang Penelitian dan Pengembangan	
5	Dinas Pendidikan	a. Sekretaris Dinas Pendidikan	2966
		b. Bidang Sekolah Dasar	
		c. Bidang Sekolah Menengah Pertama	
		d. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	
		e. Bidang Sarana dan Prasarana	



No	Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat	Jumlah Pegawai
6	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Sekretaris Dinas Kesehatan b. Bidang Kesehatan Masyarakat c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit d. Bidang Sumber Daya Kesehatan e. Bidang Pelayanan Kesehatan f. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah (LABKESDA) 	663
7	Dinas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> a. Sekretaris Dinas Sosial b. Bidang Perlindungan Sosial Keluarga dan Penanganan Fakir Miskin c. Bidang Rehabilitasi Sosial d. Bidang Pemberdayaan Sosial e. Bidang Data, Informasi dan Penyuluhan Kesejahteraan Sosial 	40
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> a. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian b. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan c. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan d. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penyuluhan e. Bidang Peternakan dan kesehatan Hewan f. Bidang Perikanan g. UPTD Rumah Potong Hewan Terpadu 	82
9	Dinas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> a. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup b. Bidang Tata Lingkungan c. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Konservasi dan Perubahan Iklim d. Bidang Persampahan e. Bidang Pengawasan Dan Penegakan Hukum Lingkungan 	319
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> a. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika b. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik c. Bidang Teknologi Informasi 	47



No	Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat	Jumlah Pegawai
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	d. Bidang Layanan e Government	47
		e. Kepala Bidang Statistik Sektoral	
		a. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		b. Bidang Promosi Penanaman Modal dan Sistem Informasi	
		c. Bidang Pelayanan Penanaman Modal	
12	Dinas Pemuda dan Olah Raga	d. Bidang Izin Operasional	48
		e. Bidang Izin Pemanfaatan Ruang	
		a. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga	
		b. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda	
		c. Bidang Sarana Prasarana Olahraga dan Pemuda	
13	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	d. Bidang Pembudayaan Olahraga	33
		e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	
		a. Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		b. Bidang Kebudayaan	
		c. Bidang Kepariwisata	
14	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	d. Bidang Ekonomi Kreatif	57
		e. Bidang Kesenian	
		a. Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
		b. Bidang Perindustrian	
		c. Bidang Sarana dan Komoditi Perdagangan	
		d. Bidang Promosi, Kemitraan dan Jasa Perdagangan	
15	Satuan Polisi Pamong Praja	e. Bidang Tertib Niaga	282
		f. UPTD Metrologi Legal	
		a. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	
		b. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
		c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah	
		d. Bidang Pengendalian dan	



No	Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat	Jumlah Pegawai
		Operasional	
		e. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	a. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	53
		b. Bidang Formasi, Data dan Kepangkatan	
		c. Bidang Mutasi, Disiplin dan Kesejahteraan	
		d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	
17	Badan Keuangan dan Aset Daerah	a. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah	44
		b. Bidang Anggaran	
		c. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	
		d. Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah	
18	Badan Pendapatan Daerah	a. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah	84
		b. Bidang Pendataan dan Pelayanan	
		c. Bidang Penetapan dan Pengolahan Data	
		d. Bidang Penagihan dan Pengendalian	
19	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	a. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	28
		b. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama	
		c. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	
		d. Kepala Bidang Kewas	
20	Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang	a. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	116
		b. Bidang Pemeliharaan Kebinamargaan	
		c. Bidang Sumber Daya Air	
		d. Bidang Infrastruktur Pemukiman	
		e. Bidang Pembangunan Kebinamargaan	



No	Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat	Jumlah Pegawai
21	Dinas Arsip dan Perpustakaan	f. Bidang Tata Ruang, Tata Bangunan, Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Perencanaan	37
		a. Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan	
22	Dinas Tenaga Kerja	b. Bidang Pengelolaan Kearsipan	33
		c. Bidang Pembinaan dan Layanan Kearsipan	
		d. Bidang Perpustakaan	
		a. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja	
		b. Bidang Pelatihan, Pemagangan dan Produktifitas	
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	c. Bidang Penempatan, Perluasan Kerja	54
		d. Bidang Hubungan Industrial dan Kelembagaan	
		e. UPTD Balai Latihan Kerja	
		a. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		b. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
24	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	c. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	26
		d. Bidang Penyajian Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	
		a. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		b. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	
25	Dinas Perhubungan	c. Bidang Keluarga Berencana	245
		d. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
		a. Sekretaris Dinas Perhubungan	
		b. Bidang Lalu Lintas	
		c. Bidang Angkutan	
26	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	d. Bidang Sarana dan Prasarana	36
		e. UPTD Terminal dan Angkutan	
		a. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		b. Bidang Koperasi	
		c. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	



No	Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat	Jumlah Pegawai
27	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	d. Bidang Pedagang Kaki Lima	33
		a. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
		b. Bidang Pemberdayaan Perempuan	
		c. Bidang Pemenuhan Hak Anak	
28	Dinas Perumahan dan Permukiman	d. Bidang Data, Komunikasi, Informasi dan Edukasi	112
		a. Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman	
		b. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		c. Bidang Pertamanan dan Dekorasi	
29	RSUD	a. Wakil Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang	60
		b. Wakil Direktur Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Bisnis	
		Wakil Direktur Keuangan dan Umum	
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	a. Kepala Sekretariat	20
		b. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
		c. Seksi Kedaruratan dan Logistik	
		d. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	
31	Kecamatan Bogor Tengah	a. Sekretaris Kecamatan Bogor Tengah	100
		b. Seksi Tata Pemerintahan Bogor Tengah	
		c. Seksi Masyarakat Bogor Tengah	
		d. Seksi Perekonomian Bogor Tengah	
		e. Seksi Pengendalian Pembangunan Bogor Tengah	
		f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Bogor Tengah	
32	Kecamatan Bogor Selatan	a. Sekretaris Kecamatan Bogor Selatan	139
		b. Seksi Tata Pemerintahan Bogor Selatan	
		c. Seksi Masyarakat Bogor Selatan	
		d. Seksi Perekonomian Bogor Selatan	
		e. Seksi Pengendalian Pembangunan	



No	Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat	Jumlah Pegawai
		Bogor Selatan	
		f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Bogor Selatan	
33	Kecamatan Bogor Barat	a. Sekretaris Kecamatan Bogor Barat	146
		b. Seksi Tata Pemerintahan Bogor Barat	
		c. Seksi Kemasyarakatan Bogor Barat	
		d. Seksi Perekonomian Bogor Barat	
		e. Seksi Pengendalian Pembangunan Bogor Barat	
		f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Bogor Barat	
34	Kecamatan Bogor Utara	a. Sekretaris Kecamatan Bogor Utara	87
		b. Seksi Tata Pemerintahan Bogor Utara	
		c. Seksi Kemasyarakatan Bogor Utara	
		d. Seksi Perekonomian Bogor Utara	
		e. Seksi Pengendalian Pembangunan Bogor Utara	
		f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Bogor Utara	
35	Kecamatan Bogor Timur	a. Sekretaris Kecamatan Bogor Timur	62
		b. Seksi Tata Pemerintahan Bogor Timur	
		c. Seksi Kemasyarakatan Bogor Timur	
		d. Seksi Perekonomian Bogor Timur	
		e. Seksi Pengendalian Pembangunan Bogor Timur	
		f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Bogor Timur	
36	Kecamatan Tanah Sareal	a. Sekretaris Kecamatan Tanah Sareal	106
		b. Seksi Tata Pemerintahan Tanah Sareal	
		c. Seksi Kemasyarakatan Tanah Sareal	
		d. Seksi Perekonomian Tanah Sareal	
		e. Seksi Pengendalian Pembangunan Tanah Sareal	
		f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Tanah Sareal	



F. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam penyusunan LPPD Tahun 2021 ini, data yang digunakan belum diaudit oleh BPK, karena sesuai ketentuan, hasil audit BPK baru akan diterima awal bulan Juni atau dua bulan setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diserahkan ke BPK.

Urusan Keuangan dilaksanakan pula oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor yang dijabarkan dalam sebagai berikut :

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2021

No.	Uraian PAD	2020			2021		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Pajak Daerah	440.000.000.000	509.039.468.746	115,69	565.600.000.000	624.784.886.145	110,46
2	Retribusi Daerah	36.691.027.400	35.010.375.259	95,42	31.609.433.495	36.032.370.539	113,99
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	33.520.905.570	31.927.293.792	95,25	32.420.552.150	32.420.552.150	100,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	231.319.190.231	296.523.150.630	128,19	284.920.664.675	389.588.807.710	136,74
Jumlah PAD		741.531.123.201	872.500.288.427	117,66	914.550.650.320	1.083.597.832.664	118,48

Target dan Realisasi Pajak Daerah

No	Uraian Pajak Daerah	2019			2020		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Pajak Hotel	34.472.853.430	49.653.637.165	144,04	49.064.200.000	67.208.667.628	136,98
2	Pajak Restoran	86.473.539.846	97.248.318.272	112,46	98.686.000.000	112.302.634.290	113,80
3	Pajak Hiburan	9.733.566.436	10.956.304.897	112,56	20.455.000.000	6.149.839.042	30,07
4	Pajak Reklame	6.349.066.936	8.859.838.240	139,55	10.200.000.000	10.540.761.568	103,34
5	Pajak Penerangan Jalan	50.625.398.111	51.337.188.280	101,41	50.600.000.000	51.888.888.619	102,55
6	Pajak Parkir	6.763.728.589	7.595.718.579	112,30	6.294.800.000	6.965.415.765	110,65
7	Pajak Air Tanah	2.334.406.464	3.001.590.202	128,58	3.600.000.000	3.763.452.784	104,54
8	PBB P2	117.158.653.003	125.549.058.024	107,16	145.800.000.000	159.245.586.510	109,22
9	BPHTB	126.088.787.185	154.837.815.087	122,80	180.900.000.000	206.719.639.939	114,27
Jumlah Pajak Daerah		440.000.000.000	509.039.468.746	115,69	565.600.000.000	624.784.886.145	110,46

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, Sasaran Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2021 yang mendukung kepada pencapaian **Misi Kedua**, antara lain :

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	2020			2021			Capaian Akhir Renstra
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Meningkatnya Kepuasan Wajib Pajak dalam pelayanan pajak daerah	Prosentase Tindak Lanjut Pengaduan Wajib Pajak terhadap Pelayanan Pajak	100%	100%	100	100%	100% 2 Pengaduan	100	100%

Prosentase Tindak Lanjut Pengaduan Wajib Pajak Terhadap Pelayanan Pajak sebesar 100% dari jumlah pengaduan pada tahun 2021 sebanyak 2 Pengaduan yang ditindaklanjuti sebanyak 2 Pengaduan.

Untuk mendukung Sasaran Strategis ini pada tahun 2021 dialokasikan anggaran melalui Program sebagai berikut :

No	Program	Indikator kinerja	2020			2021			Capaian Akhir Renstra
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	85%	85%	100	85%	85%	100	100%
		Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	90%	90%	100	90%	91,11%	101,23	100%
2	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Nilai Pajak Daerah	440.000.000.000	509.042.507.564	115,69	565.600.000.000	624.784.886.145	110,46	100%
		Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	741.531.123.201	872.500.288.427	117,66	914.550.650.320	1.083.597.832.664	118,48	100%
		Nilai IKM		93,25		93,75	92,18	98,33	100%

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

No	Program	Indikator kinerja	2020			2021			Capaian Akhir Renstra
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Nilai Pajak Daerah	440.000.000.000	509.042.507.564	115,69	565.600.000.000	624.804.447.368	110,47	100%
		Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	741.531.123.201	872.500.288.427	117,66	914.550.650.320	1.079.144.812.954	118,00	100%
		Nilai IKM		93,25		93,75	92,18	98,33	98,33%

Jumlah Anggaran Program Tahun 2021	Rp. 70.207.940
Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2021	Rp. 69.729.000
Prosentase Anggaran Program Tahun 2021	99,32%

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Beberapa permasalahan strategis yang masih harus

diperbaiki melalui pelaksanaan reformasi birokrasi diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Birokrasi belum sepenuhnya bersih dan akuntabel.

Beberapa tantangan yang dihadapi terkait dengan permasalahan ini antara lain:

- a) Rendahnya komitmen pimpinan di tingkat pusat dan daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi Meskipun Indeks Persepsi Korupsi membaik, tetapi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi belum memberikan hasil yang signifikan;
- b) Penyelenggaraan pemerintahan belum mencerminkan penyelenggaraan yang bersih dan bebas KKN Peran Aparat Pengawas Internal masih belum sepenuhnya mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
- c) Manajemen kinerja masih belum sepenuhnya diterapkan;
- d) Kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih rendah. Hal ini ditandai dengan lemahnya keterkaitan antara input anggaran dengan kinerja organisasi, dan orientasi kegiatan masih belum sepenuhnya berfokus pada hasil yang diharapkan dan dampak kemanfaatan yang ditimbulkan terhadap masyarakat/publik baik secara langsung maupun tidak langsung;
- e) Manajemen pembangunan daerah belum berjalan secara optimal;
- f) Penetapan indikator kinerja daerah dan kementerian/lembaga (K/L) belum didukung oleh sistem dan kelembagaan yang mantap. Antar sistem perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, dan pengawasan belum sinergis dan terintegrasi. Manajemen pembangunan daerah masih belum menerapkan sistem reward dan punishment yang efektif.

2) Birokrasi belum efektif dan efisien.

Beberapa tantangan yang dihadapi terkait dengan permasalahan ini antara lain:

- a) Tata kelola pemerintahan yang baik belum sepenuhnya diterapkan Pemerintah belum sepenuhnya mampu membuka ruang serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pengelolaan pembangunan. Pemerintah sebagai aktor kunci, belum sepenuhnya berperan dalam menciptakan sinergi pelaksanaan pembangunan, baik dengan masyarakat maupun dengan dunia usaha

b) Lemahnya penegakan hukum

Penegakan hukum yang banyak diwarnai dengan perilaku koruptif dari aparat penegak hukum

c) Pengadaan barang dan jasa masih belum dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien

Masih banyak ditemukan kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, antara lain disebabkan oleh: belum seluruh pengadaan dilakukan secara elektronik

d) Kelembagaan birokrasi pemerintah masih belum efektif

Kelembagaan birokrasi pemerintah masih dihindangi permasalahan yang mendasar, yakni 1) organisasi gemuk, secara makro maupun mikro; 2) fragmented dan tumpang tindih fungsi; dan 3) banyaknya UU yang mewajibkan pembentukan lembaga (di pusat dan di daerah) yang berpotensi over institution dan tumpang tindih tugas dan fungsi

e) Penerapan e-government belum berjalan efektif dan efisien

Penerapan e-government belum merata pada seluruh birokrasi pemerintah, terjadi tumpang tindih sistem aplikasi, dan belum terintegrasi. Inefisiensi dalam pengembangan sistem informasi serta dalam pengadaan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, masih sering terjadi

f) Manajemen SDM Aparatur masih belum berjalan secara efektif

Masih banyak terjadi penempatan ASN dalam jabatan yang tidak sesuai kompetensi, dan terjadi gap kompetensi pegawai yang ada dengan persyaratan kompetensi jabatan yang diduduki, sehingga kinerja/produktivitas belum optimal. Integritas PNS yang dinilai masih rendah, serta sistem remunerasi belum layak dan berbasis kinerja. Manajemen kinerja pegawai belum berjalan sehingga



berdampak pada belum dapat dilaksanakannya identifikasi kelompok pegawai yang potensial (talent pool) untuk kaderisasi kepemimpinan. Sistem pembinaan karier pegawai belum dapat memberikan kejelasan karier

pegawai yang memiliki prestasi baik. Dengan belum berjalannya manajemen kinerja juga berdampak pada perencanaan pelatihan kepada pegawai yang berorientasi pada pengembangan kompetensi belum dapat direalisasikan hampir di seluruh jajaran instansi

pemerintah. Perbaikan gaji (remunerasi) masih terkendala dengan sistem pembayaran pensiun yang masih bergantung penuh dengan APBN.

- g) Inefisiensi penggunaan anggaran Penggunaan masih dihadapkan pada beberapa kendala antara lain:
 - i. belum terdapat standarisasi sarana dan prasarana aparatur yang komprehensif; sistem dan budaya yang mendorong efisiensi belum terbangun, dan
 - ii. besarnya biaya operasional yang tidak sebanding dengan kualitas pelayanan atau dampak pembangunan yang dihasilkan
 - h) Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan masih belum mampu mendorong kinerja birokrasi
Penyempurnaan kurikulum dan metode pelatihan kepemimpinan pegawai ASN belum mampu mengawal dan mengakselerasi proses perubahan melalui reformasi birokrasi serta memberikan kontribusi secara tidak langsung bagi kinerja organisasi.
- 3) Pelayanan publik masih belum memiliki kualitas yang diharapkan
Beberapa tantangan yang dihadapi terkait dengan permasalahan ini antara lain:
- a) Pelayanan perijinan masih belum sepenuhnya berjalan efektif dan efisien

- Masih ada proses kerja birokrasi yang rumit dan kewenangan yang terpecah di berbagai instansi, membuat pelayanan perijinan memakan waktu yang lama dan biaya yang tinggi;
- b) Praktek pungutan liar (pungli) dalam pelayanan perijinan masih terjadi sehingga menghambat iklim usaha dan investasi;
 - c) Kejelasan biaya pelayanan belum sepenuhnya diterapkan dengan baik, karena masih banyak biaya-biaya lain yang tidak resmi muncul dalam praktik pelayanan perijinan. Karena itu praktik pelayanan perijinan di Indonesia, tidak hanya memerlukan waktu yang lama tetapi juga biaya yang tinggi;
 - d) Praktek manajemen pelayanan publik belum dijalankan dengan baik. Berbagai aspek manajemen pelayanan publik sebagaimana digambarkan pada UU Pelayanan Publik, seperti standar pelayanan dan maklumat pelayanan, belum secara konsisten diimplementasikan. Masalah lainnya: rendahnya kompetensi petugas pelayanan, inovasi dan budaya pelayanan bermutu, serta penggunaan e-services sebagai sarana pendukung penyelenggaraan pelayanan yang belum merata. Disamping itu, masih terdapat fragmented dan tumpang tindih fungsi kelembagaan pelayanan.

Reformasi birokrasi diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang berorientasi pada kinerja yang tinggi sehingga kualitas pelayanan publik akan meningkat. Dampak yang terjadi apabila kualitas pelayanan publik semakin baik maka akan meningkatkan daya saing dan keberhasilan pembangunan di berbagai bidang.

Birokrasi pemerintahan di Kota Bogor di banyak sector masih dirasakan kurang efisien. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan belum sepenuhnya dapat mencegah distorsi produk-produk kebijakan publik, karena belum adanya proses yang benar-benar transparan dan akuntabel baik dari segi penyusunan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasinya. Hal tersebut mengakibatkan banyak masyarakat berpendapat bahwa birokrasi pemerintahan tidak efisien, efektif, dan akuntabel, serta pelayanan publik belum optimal.



Prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas belum sepenuhnya dapat berjalan dengan baik. Pemantapan akuntabilitas keuangan dan kinerja di Kota Bogor memang sudah meningkat. Hal tersebut terlihat dari Pemerintah Kota Bogor telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam kurun waktu 2 tahun berturut turut berdasarkan audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2017 dan Tahun 2018. Namun, opini WTP tersebut belum sepenuhnya mencerminkan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, manajemen aset milik daerah belum dikelola secara tertib administrasi dan tertib hukum, serta sistem pengendalian internal belum berjalan efektif. Tantangan kedepan yang harus ditindaklanjuti diantaranya adalah peningkatkan kualitas dan independensi pemeriksaan keuangan dan pengembangan sistem dan pemantapan pemeriksaan kinerja.

B. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi 2019-2024

“Mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Ramah Keluarga”

Misi 2019-2024

- 1) Mewujudkan Kota yang Sehat;
- 2) Mewujudkan Kota yang Cerdas;
- 3) Mewujudkan Kota yang Sejahtera.

Program Unggulan Kota Bogor:

- 1) Pengembangan Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 2) Penguatan Spritualitas dan Nilai Budaya Untuk Keluarga Tangguh dan Masyarakat Madani;
- 3) Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Transparan dan Melayani.

C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Program pembangunan daerah disajikan selama 5 (lima) tahun mulai Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, disajikan berdasarkan sasaran pembangunan jangka menengah. Dengan sifat program pembangunan

daerah yang bersifat strategis, maka pelaksanaan dan penganggarannya diutamakan.

D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Tabel 1.4
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bogor
Tahun 2021-2022

No	Perangkat Daerah	Kegiatan
1	DINAS PENDIDIKAN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		2
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Peningkatan Pelayanan BLUD		
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota		
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten / Kota		
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota		
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		
Pemberian Sertifikat Produksi Untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-Irt Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga		



No	Perangkat Daerah	Kegiatan
		<p>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan / Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</p> <p>Penerbitan Stiker Pembinaan Pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</p> <p>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market Pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</p> <p>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</p> <p>Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</p> <p>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</p>
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	<p>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota</p> <p>Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</p> <p>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota</p>
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	<p>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota</p> <p>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota</p> <p>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten / Kota</p> <p>Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten / Kota</p> <p>Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten / Kota</p> <p>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</p> <p>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota</p> <p>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</p> <p>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab / Kota</p> <p>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota</p>
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	<p>Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten / Kota</p> <p>Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</p> <p>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p>

No	Perangkat Daerah	Kegiatan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota
		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten / Kota
		6
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota		
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota		
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten / Kota		
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota		
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran		
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		
7	BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
8	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



No	Perangkat Daerah	Kegiatan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
9	DINAS SOSIAL	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten / Kota
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten / Kota
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten / Kota
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota		
10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten / Kota

No	Perangkat Daerah	Kegiatan
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota
11	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten / Kota
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita / Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten / Kota
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten / Kota
		12
Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten / Kota		
Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota		
Pemulihan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota		
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten / Kota		
Penyimpanan Sementara Limbah B3		
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan / atau Izin PPLH		
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		
Pengelolaan Sampah		
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan



No	Perangkat Daerah	Kegiatan
		Pemerintahan Daerah
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk
		Penataan Pendaftaran Penduduk
		Pelayanan Pencatatan Sipil
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
15	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten / Kota
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB / PLKB)
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten / Kota
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
16	DINAS PERHUBUNGAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah

No	Perangkat Daerah	Kegiatan
17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Kabupaten / Kota
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten / Kota
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten / Kota
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
20	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



No	Perangkat Daerah	Kegiatan
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten / Kota Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
21	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten / Kota Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
22	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten / Kota Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten / Kota Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten / Kota Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
23	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota Peningkatan Kualitas SDG Hewan / Tanaman

No	Perangkat Daerah	Kegiatan
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih / Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten / Kota
		Pengembangan Prasarana Pertanian
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten / Kota
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten / Kota
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
24	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota
		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota
25	SEKRETARIAT DAERAH	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
		Penataan Organisasi
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		Administrasi Tata Pemerintahan
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
		Fasilitasi Kerjasama Daerah
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		
26	SEKRETARIAT DEWAN	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja



No	Perangkat Daerah	Kegiatan
	PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
		Layanan Administrasi DPRD
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
		Pembahasan Kebijakan Anggaran
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
		Peningkatan Kapasitas DPRD
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
Fasilitasi Tugas DPRD		
27	KECAMATAN BOGOR UTARA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		28
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)		
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
29	KECAMATAN BOGOR TIMUR	

No	Perangkat Daerah	Kegiatan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
30	KECAMATAN BOGOR BARAT	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
31	KECAMATAN BOGOR TENGAH	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
32	KECAMATAN TANAH SAREAL	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



No	Perangkat Daerah	Kegiatan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		33
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Penyelenggaraan Pengawasan Internal		
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		
Pendampingan dan Asistensi		
34	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah
35	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Perangkat Daerah	Kegiatan
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Pengelolaan Barang Milik Daerah
36	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
37	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
		Mutasi dan Promosi ASN
		Pengembangan Kompetensi ASN
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
		Pengembangan Kompetensi Teknis
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Tabel 1.5
Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024

Sasaran Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Judul Program
Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	<i>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat yang terdiri dari 69 (enam puluh sembilan) program</i>	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
Meningkatnya perilaku hidup bersih		Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
		Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
		Program Program Pengadaan, Peningkatan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
		Program Kesehatan Reproduksi Remaja
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan
		Program Promosi Kesehatan,



Sasaran Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Judul Program
dan sehat		Pemberdayaan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan Pemeliharaan Kantrantib-mas dan Pencegahan Tindak Kriminal Kepemudaan dan Keolahragaan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Lingkungan sehat perumahan Program Peningkatan utilitas perkotaan Program Penataan Prasarana Sarana Umum Perumahan Pengelolaan Areal Pemakaman Program pemulihan pasca bencana Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Perbaikan, Optimalisasi, Operasional dan Pemeliharaan Fungsi TPA Program Peningkatan Pengelolaan <u>Sampah Berbasis 3R</u> Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Program Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana Program Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Program Pengembangan layanan Informasi Kebencanaan Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman		Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Program kemitraan lingkungan hidup Program Pengembangan Transportasi Berkelanjutan Program pengelolaan ruang terbuka hijau Pengelolaan Areal Pemakaman Program peningkatan pendidikan anak usia dini Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun Program manajemen layanan pendidikan Program peningkatan mutu pendidik
Terkendalinya sumber-sumber pencemar air		
Terkendalinya sumber-sumber pencemar udara		
Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau publik perkotaan		
Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pendidikan formal dan non formal		



Sasaran Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Judul Program
Meningkatnya kualitas generasi muda		<p>dan tenaga kependidikan</p> <p>Program pendidikan non formal</p> <p>Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</p> <p>Program pendidikan politik masyarakat</p> <p>Program pengembangan wawasan kebangsaan</p> <p>Pemeliharaan Kantrantib-mas dan Pencegahan Tindak Kriminal</p> <p>Program Kepemudaan dan Keolahragaan</p> <p>Program Peningkatan Olah Raga Prestasi</p> <p>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</p> <p>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</p> <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan</p> <p>Program Pembinaan Anak Terlantar</p> <p>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial</p> <p>Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo</p> <p>Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma</p> <p>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</p> <p>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</p> <p>Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak dan TPPO</p> <p>Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak</p> <p>Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan</p> <p>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</p> <p>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan</p> <p>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya</p> <p>Program Perluasan Kesempatan Kerja</p> <p>Program Pembinaan dan penempatan transmigrasi</p> <p>Program Penataan Administrasi Kependudukan</p> <p>Program Kependudukan dan Keluarga Berencana</p> <p>Program Pembangunan Keluarga</p> <p>Program Penataan dan Pengaturan Bangunan Gedung</p> <p>Program Pengaturan Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi</p> <p>Program Pembangunan/ Peningkatan Jalan, Jembatan, Drainase dan Pedestrian</p> <p>Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</p>
Meningkatnya pemberdayaan, partisipasi, gotong royong, kerukunan dan toleransi masyarakat		
Menurunnya tingkat Kemiskinan		
Menurunnya tingkat pengangguran		
Meningkatnya Kualitas Ketahanan Keluarga		
Meningkatnya kualitas ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi		
Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur dan transportasi		
Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur dan transportasi	2. Penguatan Daya Saing Ekonomi berbasis potensi local yang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) program	



Sasaran Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Judul Program
Meningkatnya kualitas ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi		Program Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Jasa Transportasi Program Peningkatan pelayanan angkutan umum Program Perencanaan Tata Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Pemberdayaan Usaha ekonomi masyarakat Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Program Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Peningkatan kreatifitas dan daya saing ekonomi kreatif Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Peningkatan daya saing penanaman modal Program Peningkatan Produksi Pertanian Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Zoonosis dan Penyediaan Pangan Hewani sesuai dengan Kriteria Aman, Sehat, Utuh, dan Halal Program Peningkatan Produksi Perikanan Program Peningkatan Konsumsi Produk Perikanan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Pengembangan data dan Informasi Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Peningkatan kualitas pelayanan public Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Pemerintah Daerah
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi		
Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	3. Penguatan Reformasi Birokrasi yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) program	



Sasaran Pembangunan	PrioritasPembangunan	Judul Program
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
		Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
		Program perencanaan pembangunan daerah
		Program Perencanaan Prasarana wilayah dan sumberdaya alam
		Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya
		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
		Program Kerjasama Pembangunan
		Program Penelitian dan Pengembangan Bappeda
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah
		Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
		Program Penerapan Reformasi Birokrasi
		Program Pengendalian pembangunan
		Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
		Program Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan
		Program Penataan Perundang-undangan
		Program Kerjasama informasi dengan media massa
		Program Penegakan Hukum dan Penerapan HAM
		Program Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa
		Program Pengembangan Data dan Informasi
		Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perwakilan rakyat daerah
		Program Peningkatan Pelayanan PATEN
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

(Sumber : RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024)



E. Perencanaan Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Perencanaan Strategis

Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka Visi Kota Bogor Tahun 2019- 2024 dirumuskan sebagai berikut :

“Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota yang Ramah Keluarga”.

Makna Visi Pemerintah Kota Bogor

Kota Bogor	Kota yang Ramah Keluarga
Meliputi seluruh wilayah dan isinya, dalam arti Kota Bogor dan seluruh warganya yang berada di dalam kawasan dalam batas-batas tertentu yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Kota Bogor.	<ol style="list-style-type: none">1 Kondisi Ramah Keluarga dipenuhi dari derajat kualitas masyarakat dan lingkungannya yang memadai, yang tercermin dari kondisi kesehatan, pendidikan, sosial masyarakat serta kondisi infrastruktur lingkungan yang baik dalam mendukung aktivitas masyarakat menuju taraf kehidupan yang lebih baik.2 Kondisi Ramah Keluarga juga harus dipenuhi dari kondisi sektor ekonomi yang kondusif bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.3 Kondisi Ramah Keluarga dipenuhi dari pencapaian keluarga yang berkualitas oleh masyarakat serta menumbuhkan nilai-nilai keluarga dalam hubungan bermasyarakat serta tata kelola pemerintahan yang berkompeten.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 3 (tiga) misi sebagai berikut:

MISI PEMERINTAH KOTA BOGOR

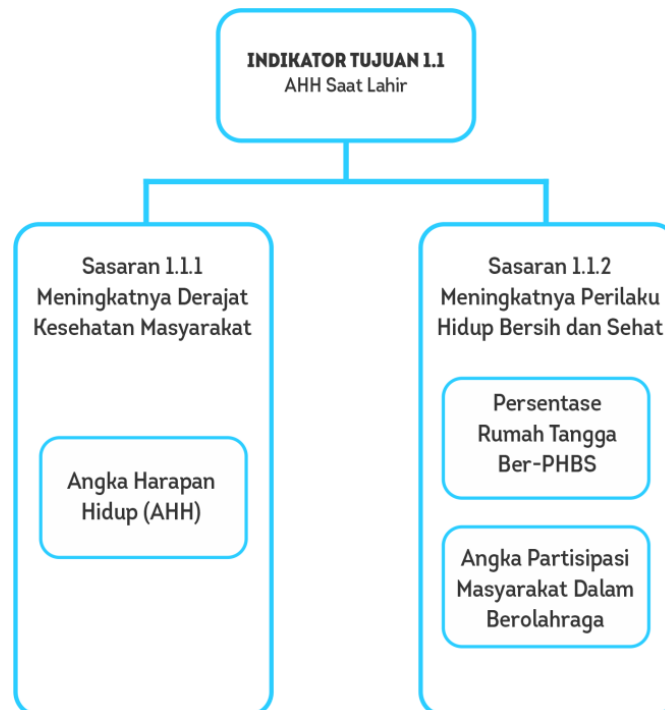
1. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat
2. Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas
3. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera

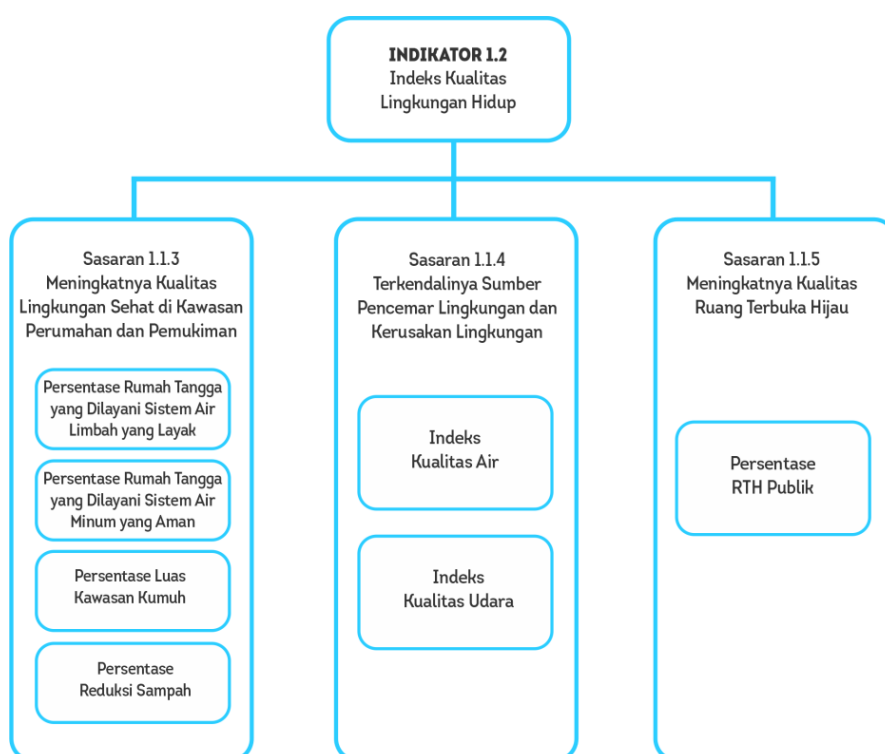
Visi dan Misi tersebut di atas merupakan dasar dalam perumusan tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pelaksanaan pembangunan kota Bogor sampai dengan tahun 2024. Sesuai RPJMD 2019-2024 terdapat 5 tujuan, 17 sasaran, serta 29 indikator sasaran.



MISI 1: MEWUJUDKAN KOTA BOGOR YANG SEHAT

Tujuan 1: Terwujudnya Masyarakat Kota Bogor yang Sehat dan Lingkungan yang Berkualitas





Dalam rangka pencapaian misi 1, beberapa program dan kegiatan dilakukan menyesuaikan dengan misi, tujuan dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah di terjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerjanya. Beberapa variabel yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

A. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam Mewujudkan Kota Bogor yang SEHAT adalah terwujudnya masyarakat kota Bogor yang sehat dan lingkungan yang berkualitas, yang dapat diukur dari Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir, Indeks kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara.

B. Sasaran

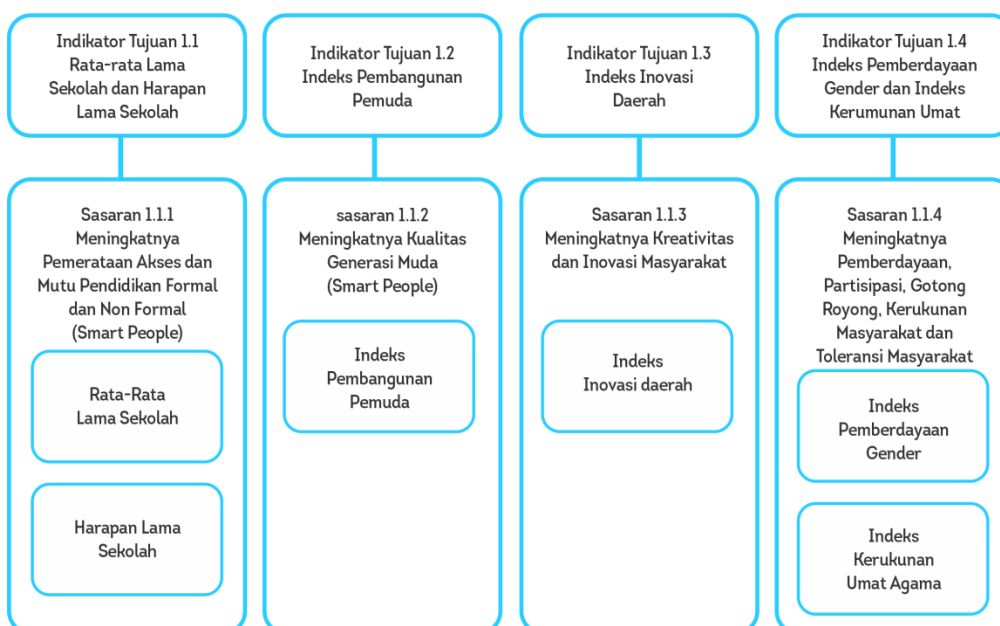
Untuk mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan diatas, dijabarkan kedalam 6 sasaran yaitu:

1. **Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat**
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Bogor adalah Angka Harapan Hidup (AHH) Saat Lahir.
2. **Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat**
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS dan Angka Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga.
3. **Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman**
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya kualitas lingkungan sehat di Kawasan perumahan dan permukiman adalah : persentase rumah tangga yang dilayani air minum yang aman, persentase rumahtangga yang dilayani system air limbah yang layak, persentase luasan Kawasan kumuh, dan persentase reduksi sampah.
4. **Terkendalinya sumber-sumber pencemar lingkungan dan kerusakan lingkungan**
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait terkendalinya sumber-sumber pencemar udara adalah Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara.
5. **Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau publik perkotaan**
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau publik perkotaan adalah persentase RTH Publik.



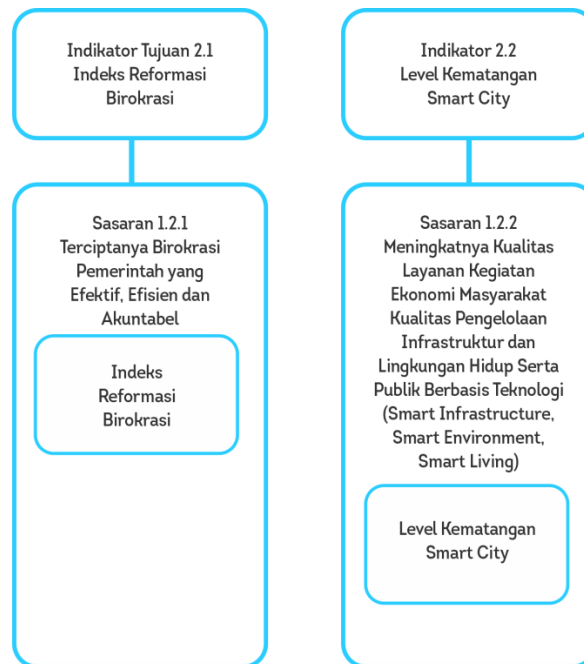
MISI 2. MEWUJUDKAN KOTA BOGOR YANG CERDAS

Tujuan 1: Terwujudnya Masyarakat Kota Bogor yang Cerdas dan Berkarakter





Tujuan 2: Terwujudnya Pemerintahan yang Cerdas dan Melayani



Dalam rangka pencapaian misi 2, beberapa program dan kegiatan dilakukan menyesuaikan dengan misi, tujuan dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah di terjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerjanya. Beberapa variabel yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :



A. Tujuan

Terdapat 2 (dua) tujuan yang ingin dicapai dalam Mewujudkan Kota Bogor yang CERDAS yaitu :

1. Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang Cerdas dan Berkarakter (*Smart People*), yang dapat diukur dari Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Indeks Kerukunan Umat Beragama.
2. Terwujudnya Pemerintahan yang Cerdas dan melayani (*Smart government*), yang dapat diukur dari Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dan level Kematangan Smart City.

B. Sasaran

Untuk mencapai tujuan 1 sebagaimana ditetapkan diatas, dijabarkan kedalam 4 sasaran yaitu:

1. Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pendidikan formal dan non formal;
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Rata-rata lama sekolah (RLS), dan Harapan Lama Sekolah (HLS).
2. Meningkatnya kualitas generasi muda;
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).
3. Meningkatnya kreativitas dan Inovasi masyarakat;
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Indeks Inovasi Daerah.
4. Meningkatnya pemberdayaan, partisipasi, gotong royong, kerukunan dan toleransi masyarakat.
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Kerukunan umat beragama.

Untuk mencapai tujuan 2 sebagaimana ditetapkan diatas, dijabarkan kedalam 2 sasaran yaitu:

1. Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel;
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Indeks Reformasi Birokrasi (IRB).

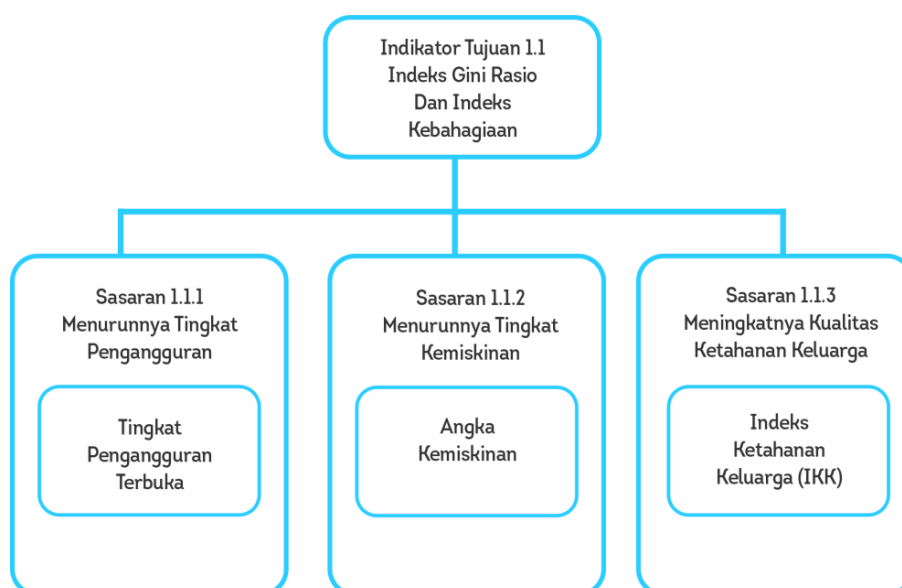
2. Meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi.

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Level Kematangan *Smart City*.



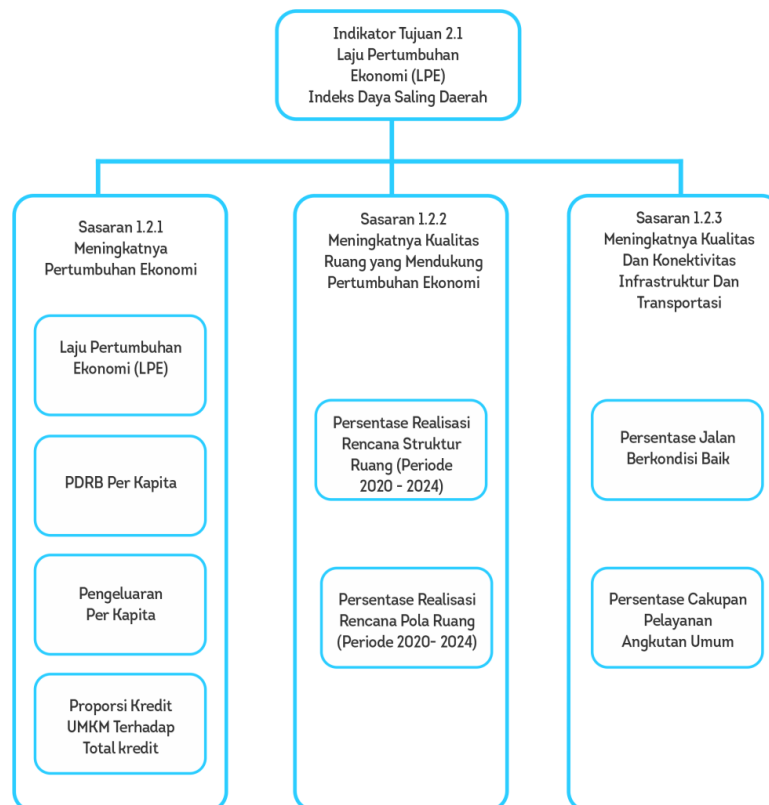
MISI 3. MEWUJUDKAN KOTA BOGOR YANG SEJAHTERA

Tujuan 1: Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat





Tujuan 2: Terwujudnya Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah



Dalam rangka pencapaian misi 3, beberapa program dan kegiatan dilakukan menyesuaikan dengan misi, tujuan dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah di terjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerjanya. Beberapa variabel yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

A. Tujuan

Terdapat 2 (dua) tujuan yang ingin dicapai dalam Mewujudkan Kota Bogor yang SEJAHTERA yaitu :

1. Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat, yang dapat diukur dari Indeks Gini Rasio/Indeks ketimpangan.
2. Terwujudnya peningkatan daya saing ekonomi daerah, yang dapat diukur dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).

B. Sasaran

Untuk mencapai tujuan 1 sebagaimana ditetapkan diatas, dijabarkan kedalam 3 sasaran yaitu :

1. Menurunnya tingkat pengangguran;
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
2. Menurunnya tingkat kemiskinan;
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Angka kemiskinan.
3. Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga.
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Indeks Ketahanan Keluarga (IKK).

Untuk mencapai tujuan 2 sebagaimana ditetapkan diatas, dijabarkan kedalam 3 sasaran yaitu :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi;
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), PDRB Per Kapita, Pengeluaran Per Kapita, dan Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit.
2. Meningkatnya kualitas ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi;
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Persentase realisasi rencana struktur ruang pada periode rencana 2020-2024, dan persentase realisasi rencana pola ruang pada periode rencana 2020-2024.



3. Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur dan transportasi.
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah persentase jalan berkondisi mantap dan persentase cakupan pelayanan angkutan umum.

Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Dokumen RPJMD Tahun 2019-2024 selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran dan kemudian selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja tahun 2021. Berikut sasaran dan indikator kinerja utama Pemerintah Kota Bogor tahun 2021:

Misi I : Mewujudkan Kota Bogor yang Sehat

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja		Target Awal Tahun 2021 (RKPD Tahun 2021)	Perubahan Target Tahun 2021 (RKPD Perubahan Tahun 2021)
1.	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	1.	Angka Harapan Hidup (AHH) Saat Lahir	73,96	73,87
2.	Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1.	Rumah Tangga Per-PHBS	69	69
		2.	Angka Partisipasi Masyarakat Dalam Berolahraga	0,47	0,47
3.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Sehat di Kawasan Perumahan dan Pemukiman	1.	Rumah Tangga yang Dilayani Air Minum yang Aman	94,86	94,86
		2.	Rumah Tangga yang Dilayani Sistem Air Limbah yang Layak	70,42	70,42
		3.	Luasan Kawasan Kumuh Kewenangan Kota	2,27	2,27
		4.	Reduksi Sampah	6,6	6,6
4.	Terkendalinya Sumber-Sumber Pencemar Air	1.	Indeks Kualitas Air	49,7	49,7
		2.	Indeks Kualitas Udara	86	86
5.	Meningkatnya Kualitas Ruang Terbuka Hijau Publik Perkotaan	1.	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	5,92	5,92



Misi II : Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja		Target Awal Tahun 2021 (RKPD Tahun 2021)	Perubahan Target Tahun 2021 (RKPD Perubahan Tahun 2021)
1.	Meningkatnya Pemerataan Akses dan Pendidikan Formal dan Non Formal	1.	Rata-rata lama sekolah	10,97	10,97
		2.	Harapan Lama sekolah	13,9	13,9
2.	Meningkatnya Kualitas Generasi Muda	1.	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	59,13	59,13
3.	Meningkatnya Kreativitas dan Inovasi Masyarakat	2.	Indeks Inovasi Daerah	611-620	611-620
4.	Meningkatnya Perberdayaan Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan dan Toleransi Masyarakat	1.	Indeks Perberdayaan Gender (IDG)	70,5	70,5
		2.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	71	71
5.	Terciptanya Birokrasi Pemerintah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	BB	BB
6.	Meningkatnya Kualitas Layanan Kegiatan Ekonomi Masyarakat, Kualitas Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, Serta Pengelolaan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi (Smart City)	1.	Level Kematangan Smart City	Integrative	Integrative

Misi III : Menjadikan Bogor Kota yang Sejahtera

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja		Target Awal Tahun 2021 (RKPD Tahun 2021)	Perubahan Target Tahun 2021 (RKPD Perubahan Tahun 2021)
1	Menurunnya Tingkat Pengangguran	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	10,97	12,61
2	Menurunnya Angka Kemiskinan	2	Angka Kemiskinan	6,5	6,24
3	Meningkatnya Kualitas Ketahanan Keluarga	1	Indeks Ketahanan Keluarga	74-75	74-75
4	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,75	3,75
		2	PDRB Per Kapita	42,73	42,73
		3	Pengeluaran Per Kapita	11,948	11,413
		4	Proporsi Kredit UMKM Terhadap Total Kredit	22	22
5	Meningkatnya Kualitas Ruang yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	1	Realisasi Rencana Struktur Ruang (Periode 4) Rencana 2020-2024	40	40
		2	Realisasi Rencana Pola Ruang (Periode Rencana 2020-2024)	40	40
6	Meningkatnya Kualitas dan Konektivitas Infrastruktur dan Transportasi	1	Jalan Kondisi Baik	91	91
		2	Cakupan Pelayanan Angkutan Umum	60	60

Program		Anggaran	
1.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp.	54.146.000,00
2.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.	306.039.700,00
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp.	246.663.800,00
4.	Program Hubungan Industrial	Rp.	89.799.000,00
5.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp.	976.353.300,00
6.	Program Perlindungan Perempuan	Rp.	132.087.000,00
7.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp.	1.129.133.000,00



Program		Anggaran	
8.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp.	128.731.700,00
9.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp.	507.856.800,00
10.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp.	416.569.000,00
11.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp.	155.591.000,00
12.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp.	52.210.500,00
13.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp.	26.550.000,00
14.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp.	49.792.000,00
15.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp.	550.000.000,00
16.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp.	1.050.000.000,00
17.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp.	17.757.910.173,00
18.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp.	250.000.000,00
19.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp.	150.000.000,00
20.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp.	540.568.200,00
21.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp.	533.800.000,00
22.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp.	75.000.000,00
23.	Program Pengelolaan Persampahan	Rp.	19.401.467.250,00
24.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp.	2.694.652.200,00
25.	Program Pencatatan Sipil	Rp.	223.519.500,00
26.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp.	323.371.700,00
27.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp.	26.544.000,00
28.	Program Penataan Desa	Rp.	97.297.000,00
29.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp.	153.611.900,00
30.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp.	286.026.700,00

Program		Anggaran
31. Program Pengendalian Penduduk	Rp.	903.217.000,00
32. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp.	850.014.800,00
33. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp.	1.489.427.700,00
34. Program Penyelenggaraa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp.	70.358.017.483,00
35. Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp.	3.673.983.100,00
36. Program Aplikasi Informatika	Rp.	4.326.443.910,00
37. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp.	71.970.000,00
38. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp.	50.171.000,00
39. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp.	76.170.000,00
40. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp.	998.625.000,00
41. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp.	362.882.000,00
42. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp.	2.037.828.000,00
43. Program Pengembangan UMKM	Rp.	-
44. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp.	84.170.000,00
45. Program Promosi Penanaman Modal	Rp.	204.982.873,00
46. Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp.	2.020.311.944,00
47. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp.	-
48. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp.	380.000.000,00
49. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp.	2.422.929.400,00
50. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp.	51.028.594.444,00
51. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp.	1.040.894.400,00
52. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp.	162.624.000,00
53. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp.	125.196.500,00
54. Program Pengembangan Kebudayaan	Rp.	331.720.300,00



Program		Anggaran
55. Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp.	780.912.500,00
56. Program Pembinaan Perpustakaan	Rp.	11.585.732.400,00
57. Program Pengelolaan Arsip	Rp.	318.756.900,00
58. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp.	188.403.000,00
59. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp.	55.143.000,00
60. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp.	426.947.500,00
61. Program Pemasaran Pariwisata	Rp.	392.583.500,00
62. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Rp.	43.442.900,00
63. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp.	799.227.000,00
64. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp.	363.601.100,00
65. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp.	201.930.300,00
66. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp.	99.797.600,00
67. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp.	2.800.000,00
68. Program Penyuluhan Pertanian	Rp.	84.390.800,00
69. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	181.419.200,00
70. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp.	162.760.000,00
71. Program Pengembangan Ekspor	Rp.	81.824.000,00
72. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp.	230.934.100,00
73. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp.	662.569.800,00
74. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp.	533.026.900,00
75. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp.	148.648.750,00
76. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp.	31.337.072.075,00



Program		Anggaran
77. Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp.	1.993.623.926,00
78. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp.	61.282.247.200,00
79. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp.	718.058.600,00
80. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	1.780.833.100,00
81. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.	51.538.584.510,00
82. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp.	7.822.037.000,00
83. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp.	3.611.261.640,00
84. Program Kepegawaian Daerah	Rp.	3.529.394.000,00
85. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp.	2.542.778.000,00
86. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp.	2.028.624.200,00
87. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp.	414.812.200,00
88. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp.	221.173.800,00
89. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp.	918.454.000,00
90. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.	33.174.528.631,00
91. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.	674.373.100,00
92. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp.	362.972.600,00
93. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp.	1.733.219.787,00
94. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp.	810.108.800,00
95. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp.	188.948.800,00
96. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp.	10.662.779.400,00
Total Anggaran	Rp.	2.521.674.128.932,00



1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, desentralisasi diselenggarakan dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan keikhlasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik

dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kota Bogor menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju *Good Governance*. Penerapan SPM juga dianggap sebagai tindakan yang logis bagi Pemerintah Daerah karena:

1. Kemampuan masing-masing daerah sangat berbeda, sehingga sulit bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada. Keterbatasan dana, sumber daya aparatur, kelengkapan, dan faktor lainnya membuat Pemerintah Daerah harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan yang minimal harus disediakan bagi masyarakat;
2. Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah menjadi lebih terukur SPM yang disertai tolok ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan yang baik.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum Penerapan Standar pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Kota adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;



3. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

C. KEBIJAKAN UMUM

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bogor dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam

mewujudkan tujuan dan sasaran. Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bogor untuk mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kota Bogor untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kota Bogor menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan/Keputusan Menteri. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

D. ARAH KEBIJAKAN

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bogor dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang



dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran.

E. FOKUS LAYANAN

1. BIDANG URUSAN BIDANG PENDIDIKAN

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kota Bogor dalam Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019 – 2024 dan dilaksanakan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
2	Pengelolaan Dana BOP PAUD
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
2	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
2	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
2	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan Dari sejumlah program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Pendidikan masih memiliki permasalahan dan kelemahan sebagai berikut:

I. Permasalahan

1. Pada Program dan Kegiatan di Dinas Pendidikan, masih terjadi lemahnya perencanaan dan pelaksanaan pada kegiatan di beberapa Bidang, dimana masih ada beberapa kegiatan yang masih belum terserap optimal;

2. Selanjutnya untuk Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) terjadi penurunan disebabkan data peserta didik untuk MI dan MTs dari Kemenag masih belum valid sehingga penyebut dalam perhitungan APK menjadi kecil / tidak lengkap. Diharapkan ketika data peserta didik dari Kemenag sudah tersaji, maka persentase APK SD/MI dan SMP/MTs dapat lebih besar dari tahun 2020.
3. Rendahnya Angka Rata Rata Lama Sekolah, dikarenakan masih banyak masyarakat Kota Bogor diatas umur 25 tahun yang masih belum menamatkan pendidikan pada jenjang SMP. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan masyarakat lumajang memiliki angka rata rata lama sekolah, mulai darifaktor ekonomi, faktor sosial, dan juga faktor kesadaran akan pentingnya pendidikan.

II.Solusi

1. Dengan mempersiapkan perencanaan yang lebih matang dan pelaksanaan yang lebih baik;
2. Sedangkan mengenai partisipasi peserta didik, solusinya yaitu dengan memperbaiki berbagai fasilitas sarana dan prasarana sekolah, dan kegiatan bantuan lainnya sebagai daya tarik siswa untuk mau menempuh wajib belajar pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya juga memberikan motivasi kepada siswa beserta orangtuanya akan arti pentingnya menempuh pendidikan untuk masa depan kelak demi kesejahteraan hidupnya.
3. Mengajak masyarakat Lumajang khususnya yang berusia diatas 25 tahun yang masih belum menyelesaikan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan atau pendidikan menengah untuk melanjutkan kembali pendidikannya melalui program kesetaraan.

2. BIDANG URUSAN BIDANG KESEHATAN

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kota Bogor dalam Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Bidang kesehatan sesuai dengan RPJMD Kota Bogor Tahun 2020-2024 dan dilaksanakan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :



1. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
 - 1.1. Kegiatan Pelayanan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Bayi
Jenis Pelayanan Dasar SPM :
 - i. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
 - ii. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
 - iii. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
2. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
 - 2.1. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Jenis Pelayanan Dasar SPM :
 - iv. Pelayanan Kesehatan Balita
3. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
 - 1.1. Kegiatan Pengendalian Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular
Jenis Pelayanan Dasar SPM :
 - v. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
 - vi. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
 - vii. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)
 - viii. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat
 - 1.2. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Remaja
Jenis Pelayanan Dasar SPM :
 - ix. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
4. Program Pelayanan Kesehatan Lansia
 - 4.1 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Jenis Pelayanan Dasar SPM :
 - x. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
5. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
 - 5.1. Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
Jenis Pelayanan Dasar SPM :
 - xi. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)
 - 5.2. Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV
Jenis Pelayanan Dasar SPM :
 - xii. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

3. BIDANG URUSAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kota Bogor dalam Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 dan dilaksanakan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, terdiri dari kegiatan:

a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari Sub Kegiatan:

1) Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan



Kegiatan Pengembangan Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah di Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara

2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah terdiri dari :

a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari Sub Kegiatan:

- 1) Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
- 2) Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
- 3) Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat
- 4) Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
- 5) Penyediaan Sarana Pengangkut Lumpur Tinja
- 6) Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT
- 7) Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT



Gambar 1.1

Kegiatan Sosialisasi Pembangunan SPALDT Skala Permukiman di Kelurahan Bojongkerta Kecamatan Bogor Selatan



Gambar 1.2

Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman di Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Bogor Selatan



Gambar 1.3
Pembangunan/Penyediaan
Sistem Pengelolaan Air
Limbah Domestik Setempat
di Kelurahan Sindangbarang
Kecamatan Bogor Barat

Gambar 1.4
Pembangunan/Penyediaan
Sistem Pengelolaan Air
Limbah Domestik Setempat
di Kelurahan Tegal Gundil
Kecamatan Bogor Utara



Gambar 1.5
Pembangunan/Penyediaan
Sistem Pengelolaan Air
Limbah Domestik Setempat
di Kelurahan Harjasari
Kecamatan Bogor Selatan



Gambar 1.6
Pembangunan/Penyediaan
Sistem Pengelolaan Air
Limbah Domestik Setempat
di Kelurahan Pamoyanan
Kecamatan Bogor Selatan



Gambar 1.7
Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Terpusat Skala Kota



Gambar 1.8

Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala
Permukiman di Kelurahan Sindangsari Kecamatan Bogor Timur



Gambar 1.9

Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala
Permukiman di Kelurahan Gunung Batu Kecamatan Bogor Barat



Gambar 1.10

Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat
Skala Permukiman di Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara



Gambar 1.11

Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman di Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara, Penyediaan Sarana Pengangkut Lumpur Tinja, Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT

4. BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN UMUM

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kota Bogor dalam Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 dan dilaksanakan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Program Pengembangan Perumahan

- 1.1. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor pada Tahun 2021 untuk kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah

Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar Rp. 1,737,349,330,- (*Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah*).

1.2. Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun

Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun tidak secara langsung membiayai kebutuhan anggaran untuk penanganan standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat. Anggaran yang dilaporkan dalam penanganan SPM di sini berupa subsidi sewa dimana korban bencana diberikan subsidi berupa bebas sewa unit rusun selama 1 (satu) tahun. Dengan demikian apabila dikonversi maka anggaran yang dikeluarkan untuk kebutuhan pelayanan SPM subsidi sewa terhadap korban bencana sebesar Rp.7.200.000,- (*Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).

2. Bantuan Sosial Tidak Terencana

Bantuan Sosial Tidak Terencana untuk pelayanan SPM bidang perumahan rakyat tahun 2021 besar anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp.3.000.000.000,- (*Tiga Milyar Rupiah*). Anggaran tersebut dialokasi untuk biaya perbaikan/rehabilitas rumah korban terkena bencana sebanyak 133 unit dan bantuan uang sewa/kontrak rumah untuk 5 korban bencana. Gambar 1 s.d Gambar 3 berikut merupakan dokumentasi perbaikan rumah terdampak bencana melalui bantuan sosial tidak terencana.



Gambar 1.12

Foto kondisi awal rumah terdampak bencana dan verifikasi oleh tim



Gambar 1.13

Foto proses perbaikan 50% rumah terdampak bencana

5. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. Bidang Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1.1 Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban

Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- 1). **Sub Kegiatan** Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan
- 2). **Sub Kegiatan** Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa
- 3). **Sub Kegiatan** Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
- 4). **Sub Kegiatan** Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 5). **Sub Kegiatan** Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia



- 6). **Sub Kegiatan** Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban
 - 7). **Sub Kegiatan** Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 8). **Sub Kegiatan** Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
- b. **Kegiatan** Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- 1). **Sub Kegiatan** Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - 2). **Sub Kegiatan** Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- c. **Kegiatan** Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
- 1). **Sub Kegiatan** Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
- Program dan kegiatan yang mendukung jenis pelayanan dasar SPM

Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana tercantum pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2021, tertuang pada program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tabel berikut ini :

No	Jenis Pelayanan SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Ket
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	21.000.000	0	Tidak ada masyarakat yang terkena dampak penegakan perda dan perkada

2. Bidang Sub Urusan Bencana

a. Program Pelayanan informasi rawan bencana

- i. Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu Himbauan Kebencanaan;
 - ii. Pengembangan website dan pemeliharaan sistem informasi BPBD Kota Bogor.
- b. Program Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, meliputi:
- i. Kegiatan Penerapan Sekolah/Madrasah Aman Bencana dan simulasi penanggulangan bencana di sekolah;
 - ii. Pelatihan dan Pemberdayaan Kelurahan Tangguh Bencana;
 - iii. Peningkatan kapasitas Relawan Bencana Alam;
 - iv. Simulasi Kebencanaan.
- c. Program Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
1. Kegiatan Pelayanan Penanggulangan Bencana;
 2. Penyediaan Hunian Sementara bagi Korban Bencana;
 3. Pengadaan Logistik Sandang.

3. Bidang Sub Urusan Kebakaran

3.1 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

- a. **Kegiatan** Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 1). **Sub Kegiatan** Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 2). **Sub Kegiatan** Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 3). **Sub Kegiatan** Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
 - 4). **Sub Kegiatan** Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
- b. **Kegiatan** Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran



1). **Sub Kegiatan** Pendataan Sarana Prasarana Proteksi
Kebakaran

c. **Kegiatan** Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan
Kebakaran

1). **Sub Kegiatan** Pemberdayaan Masyarakat dalam
Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui
Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

d. **Kegiatan** Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan
terhadap Kondisi Membahayakan Manusia

1). **Sub Kegiatan** Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian
dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan
Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

Program dan kegiatan yang mendukung jenis pelayanan dasar SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Urusan Kebakaran sebagaimana tercantum pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2021, tertuang pada program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tabel berikut ini :

No	Jenis Pelayanan SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Urusan Kebakaran	Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Ket
1	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	58.073.600	55.867.400	Dari 85 kejadian kebakaran, semua warga masyarakat memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi kebakaran

6. BIDANG URUSAN SOSIAL

Program dan kegiatan yang mendukung jenis pelayanan dasar SPM Bidang Sosial sebagaimana tercantum pada DPA Dinas Sosial Kota Bogor Tahun 2021,

mulai Januari – Desember 2021 tertuang pada program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut ini :

Realisasi Pencapaian SPM Sumber Dana APBD Kota Bogor
Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan SPM Bidang Sosial	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Ket
1	Pelayanan Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas Dan Trauma	228.776.000	228.776.000	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Program Pembinaan Anak Terlantar	44.441.600	42.643.600	95,95%
3	Perlindungan dan Jaminan sosial bagi korban bencana pada saat tanggap darurat dan pasca bencana	Program Pemberdayaan Fakir Miskin , Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	356.092.400	296.291.900	83,21%
4	Pelayanan Rehabilitasi sosial tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial	81.743.800	75.518.800	89,94%
5	Pelayanan Rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar di luar panti	Program Pemberdayaan Fakir Miskin , Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	26.182.400	25.382.400	96,94%
	JUMLAH		735.054.400	664.612.700	88,25%

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa dari 5 (lima) indikator SPM Sosial ada 5 (lima) kegiatan yang mendukung program SPM yang bersumber dari APBD Kota Bogor dengan total anggaran sebesar Rp. **735.054.400,-** dan terealisasi sebesar Rp. **664.612.700,-** atau **88,25%** realisasinya.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Indikator Kinerja Makro

a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Tahun 2021 meningkat menjadi 76,59 dari yang sebelumnya pada Tahun 2020 76,11. Tahun 2021 menjadi lebih baik dikarenakan dampak IPM pada Tahun 2020 yang cukup signifikan akibat belum siapnya dampak *covid 19*. Adapun demikian, beberapa indikator yang membangun IPM mengalami peningkatan capaian :

- Rata-rata Lama Sekolah menyentuh angka 10,97 atau naik 1,06% dari tahun 2020
- Harapan lama Sekolah di Tahun 2021 mencapai angka 10,97 sedangkan di Tahun 2020 mencapai 13,41
- Angka Harapan Hidup di Tahun 2021 mencapai angka 73,87 sedangkan di Tahun 2020 mencapai 73,60

Tabel 2.1
Indikator Makro Pembangunan Kota Bogor
Tahun 2020 dan 2021

No.	Indikator	Satuan	Capaian Indikator Makro	
			2020	2021
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	76,11	76,59
2.	Presentase Angka Kemiskinan	%	6,68	7,24
3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	-0,53	-0,53*
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	12,68	11,79
5.	Pendapatan Per-Kapita	Dalam Juta (Rp.)	45,940	45940*
6.	Indeks gini Rasio	Angka	0,41	0,404

(Sumber : Bappeda Kota Bogor)

*Indikator tersebut masih menggunakan data realisasi Tahun 2020 dikarenakan untuk realisasi Tahun 2021 belum dipublikasi oleh BPS

b. Presentase Angka Kemiskinan

1. Menurut perhitungan Bappeda Tahun 2021, jumlah penduduk miskin Kota Bogor mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin yang cukup signifikan di Kota Bogor dan tercatat jumlah penduduk miskin di Kota Bogor pada tahun 2021 adalah 7,24% yang dari tahun sebelumnya 6,68%.
2. Adanya Pandemi Covid-19 sangat berdampak terhadap meningkatnya angka kemiskinan di Kota Bogor tahun 2021. Menurut Kepala Bappeda Kota Bogor, angka kemiskinan di Kota Bogor meningkat salah satunya karena angka kemiskinan tingkat nasional sudah meningkat dan roda ekonomi sudah mulai terganggu dari awal tahun 2020. Adanya PHK besar-besaran akibat Pandemi Covid-19 juga memberi dampak yang sangat signifikan dalam meningkatnya tingkat pengangguran terbuka di Kota Bogor.
3. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam rangka menekan angka kemiskinan adalah dengan sedapat mungkin untuk tidak menambah jumlah angka kemiskinan absolut. Hingga saat ini Pemerintah Daerah Kota Bogor masih terus menjalankan program-program bantuan untuk membantu ekonomi warga di tengah Pandemi Covid-19. Selain itu juga dilaksanakannya Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan membuat revisi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar lebih valid dan tepat sasaran.

c. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

1. Seiring dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi nasional maupun propinsi Jabar pada tahun 2020, maka terjadi pula perlambatan pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor Tahun 2020 dimana pertumbuhan ekonomi kota Bogor berkisar -0,53% dan sampai saat ini data Laju Pertumbuhan Ekonomi pada saat dibuatnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2021 belum dirilis oleh BPS.
2. Dampak dari adanya Pandemi Covid-19 terhadap perekonomian yaitu menurunnya tingkat konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang memiliki proporsi terbesar dalam pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan di semua provinsi. Konsumsi rumah tangga di Kota Bogor diperkirakan menurun sejalan dengan penurunan di Provinsi Jawa Barat yang disebabkan oleh penurunan daya beli, peningkatan pengangguran, dan



masyarakat yang lebih banyak menyimpan uangnya karena motif berjaga-jaga.

3. Selain itu, pertumbuhan investasi yang memiliki tujuan dalam penyerapan tenaga kerja dan penciptaan pertumbuhan ekonomi juga mengalami penurunan di semua provinsi. Di Kota Bogor, diperkirakan investasi menurun sejalan dengan penurunan di Provinsi Jawa Barat, antara lain disebabkan oleh penurunan realisasi PMDN.
4. Melemahnya sektor perdagangan dan industri berdampak pada meningkatnya pengangguran dan PHK saat Pandemi Covid-19.

d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bogor pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 11,79% yang pada tahun 2020 sebesar 12,68%. Dikarenakan wabah pandemic covid 19 yang dialami negara kita sudah membaik dibandingkan dengan Tahun 2020 masih belum siapnya negara kita menghadapi pandemic covid 19.

e. Pendapatan Per-Kapita

Pendapatan Per-Kapita sebagai salah satu cara untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai Pendapatan per kapita. Berdasarkan Pendapatan per Kapita dapat diketahui besarnya pengeluaran setiap penduduk di suatu daerah. Apabila melihat tren sampai dengan tahun 2020 , tercatat angka Pendapatan per kapita pada tahun 2020 sebesar Rp. 45,940 juta. Sampai saat ini data Pendapatan per Kapita pada saat dibuatnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2021 belum dirilis oleh BPS.

f. Indeks gini Rasio

1. Indeks gini Rasio adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0

(nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi, Indeks Gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi pemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna. Indeks Gini Kota Bogor Tahun 2021 adalah sebesar 0,44 artinya pemerataan pendapatan di Kota Bogor mencapai level sedang.

2. Kota Bogor mengalami ketimpangan kesejahteraan yang dikategorikan sedang, dan angka tersebut melebihi angka indeks gini rasio provinsi Jawa Barat dan indeks gini rasio nasional. Walaupun pada tahun 2020, angka tersebut secara perlahan sudah berhasil ditekan, tetapi hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Kota Bogor untuk terus berupaya menurunkan ketimpangan kesejahteraan masyarakat Kota Bogor.
3. Upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai kinerja pada prinsipnya program yang dilaksanakan sama dengan program penanggulangan kemiskinan. Tambahannya berupa program pemantauan harga – harga barang pokok di Kota Bogor yang ditindak lanjuti dengan operasi pasar apabila ditemukan fluktuasi harga karena penurunan pasokan barang pokok seperti beras, telur, minyak goreng dan gula putih.
4. Perlunya penajaman penentuan sasaran bantuan program penanggulangan kemiskinan melalui verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu secara berkala dan berkualitas. Selain itu, diperlukan operasi pasar yang lebih rutin untuk mencegah penambahan pengeluaran Rumah Tangga Sasaran.

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.



2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Pendidikan	Jumlah satuan pendidikan anak usia dini terakreditasi (negeri dan swasta)	366	Dinas Pendidikan Kota Bogor	
		Jumlah peserta didik PAUD (negeri dan swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah	13.817	sda	
		Jumlah peserta didik PAUD (negeri dan swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	189	sda	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (negeri dan swasta)	257	sda	
		Jumlah pendidik pada PAUD (negeri dan swasta)	792	sda	
		Jumlah pendidik PAUD (negeri dan swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	217	sda	
		Jumlah kepala sekolah PAUD (negeri dan swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD nonformal dari lembaga pemerintah	81	sda	
		Jumlah SD dan SMP Negeri terakreditasi	230	sda	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah	428	sda	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah	2.552	sda	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	77.743	sda	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	18.398	sda	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	1205	sda	
Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	232	sda			
Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	4.925	sda			



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	2631	sda	
		jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	274	sda	
		jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	289	sda	
		jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	274	sda	
		jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	287	sda	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1.981	sda	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	398	sda	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	404	sda	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	129	sda	
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	246	sda	
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	79	sda	
		Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	17	sda	
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	5.374	sda	
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	2.029	sda	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	396	sda	
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	377	sda	
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	252	sda	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan	404	sda	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		pelatihan calon kepala sekolah			
		Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	38	sda	
		Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	22 RS	Dinas Kesehatan Kota Bogor	
		Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	22 RS	sda	
		Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	140.494	sda	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	249	sda	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	57.869	sda	
		Jumlah SDM kesehatan untuk Pelayanan persalinan sesuai standar	249	sda	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	20.895	sda	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	249	sda	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	632.257	sda	
2	Urusan Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk Pelayanan kesehatan balita sesuai standar	249	sda	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	454	sda	
		Jumlah SDM kesehatan untuk Pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	100	sda	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	306	sda	
		Jumlah SDM kesehatan untuk Pelayanan kesehatan sesuai standar	1.626	sda	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	500	sda	
		Jumlah SDM kesehatan untuk Pelayanan kesehatan sesuai standar	100	sda	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	250	sda	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	50	sda	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	300	sda	
		Jumlah SDM kesehatan untuk Pelayanan kesehatan sesuai Standar	50	sda	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
3.	Urusan Pekerjaan Umum	Jumlah dukungan logistic kesehatan yang tersedia	75	sda	
		Jumlah SDM kesehatan untuk Pelayanan kesehatan sesuai standar	50	sda	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	2800	sda	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	46	sda	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	42.000	sda	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	134	sda	
		Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	68,1 Ha	Dinas Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat Kota Bogor	
		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	73,5 km	sda	
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0	sda	
		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0	sda	
		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencan pengelolaan sumber daya air WS kewenangan kabupaten/kota	0	sda	
		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	0	sda	
		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	0	sda	
		Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	48,15	sda	
		Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	16.728	sda	
		Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	26.567	sda	
		Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)	ada	sda	
		Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)	tidak	sda	
Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)	ada	sda			



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	1	sda	
		Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain	1	sda	
		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	5754	sda	
		Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	6853	sda	
		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	12.607	sda	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	1234	sda	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	930	sda	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	511	sda	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	6.723	sda	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses amandasar menggunakan SPALD S	5.754	sda	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	6.853	sda	
		Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	2,38	sda	
		Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	66,67	sda	
		Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	40	sda	
		Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	2.83	sda	
		Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	0.51	sda	
		Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	26	sda	
		Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	1.062	sda	
		Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	tidak	sda	
		Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	tidak	sda	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	31	sda	
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	0	sda	
		Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	163	sda	
		Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	163	sda	
		Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	86.413	sda	
		Panjang jalan yang dibangun	0	sda	
		Panjang jembatan yang dibangun	17.1	sda	
		Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	26.638	sda	
		Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	0	sda	
		Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	2.1	sda	
		Panjang jembatan yang direhabilitasi	33.8	sda	
		Panjang jalan yang dipelihara	495.69	sda	
		Panjang jembatan yang dipelihara	33.8	sda	
		Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	1	sda	
		Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	199	sda	
		Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	17	sda	
		Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	0	sda	
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	11	sda	
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	0	sda	
		Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	1.653	sda	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	1	sda	
		Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri	1	sda	
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	59	sda	
		Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	0	sda	
		Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	sda	
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	sda	
		Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	sda	
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	sda	
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	240	sda	
		Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	0	sda	
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	206	sda	
		Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	0	sda	
		Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	sda	
		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	sda	
		Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan	0	sda	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		pengawasannya Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	sda	
		Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	165	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Penduduk Kota Bogor	
		Jumlah rumah yang terkena bencana alam	165	sda	
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	165	sda	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	140	sda	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0	sda	
4	Perumahan Rakyat	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0	sda	
		Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	4	sda	
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	140	sda	
		Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	15.808	sda	
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitas ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	1.918	sda	
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitas penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	68	sda	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	1852	sda	
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	66	sda	
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	1.852	sda	
		Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	Nihil	sda	
		Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	250,12	sda	
		Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	1.155	sda	
		Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	21,88	sda	
		Jumlah rumah di kab/kota	242.064	sda	
		Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	7.014	sda	
		Jumlah rumah tidak layak huni	48.357	sda	
		Jumlah rumah yang tidak dihuni	Nihil	sda	
		Rasio rumah dan KK	1,42	sda	
		Jumlah rumah pembangunan baru	Nihil	sda	
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	399	sda	
		Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	399	sda	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	399	sda	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	181.842	sda	
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	0	sda	
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	0	sda	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	399	sda	
		Jumlah pengembang yang tersertifikasi	0	sda	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah pengembang yang teregistrasi	399	sda	
		Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	399	sda	
		Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	324	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor	
		Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	513	sda	
		Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	65	sda	
		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	5	sda	
		Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	17	sda	
		Tersedianya sarana prasarana minimal	96	sda	
		Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	Nihil	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor	
5	Trantibumlinmas	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Nihil	sda	
		Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	100	sda	
		Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	0	sda	
		Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	0	sda	
		Persentase warga negara yang ikut pelatihan	0	sda	
		Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan saranaprasarana penanggulangan bencana	2963	sda	
		Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	2963	sda	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100	sda	
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100	sda	
		Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	75	sda	
		Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	2.963	sda	
		Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	196	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor	
		Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	3	sda	
		Tersedianya aparaturnya selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	3	sda	
		Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	3	sda	
		Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	102	sda	
		Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	39	sda	
		Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	95	sda	
		Jumlah peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran	39	sda	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	522	Dinas Sosial Kota Bogor	
		Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	75	sda	
		Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	2	sda	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	186	sda	
		Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	1	sda	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanaan sesuai standar gizi	268	sda	
		Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1	sda	
6.	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	0	sda	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	38	sda	
		Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	1	sda	
		Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	1	sda	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	36	sda	
		Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0	sda	
		Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	18	sda	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	268	sda	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan Masyarakat	Nihil	sda	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	8	sda	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	113	sda	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	109	sda	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	109	sda	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	113	sda	
		Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	Nihil	sda	
		Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	Nihil	sda	
		Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	Nihil	sda	
		Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	Nihil	sda	
		Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	Nihil	sda	
		Jumlah pekerja sosial professional/ tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	Nihil	sda	
		Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor	
7.	Tenaga kerja	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja Menghitung selisih 6 (enam) indikator ketenagakerjaan dengan cara angka realisasi dikurangi Sda dengan angka target dibagi dengan angka realisasi dikali 100 Kemudian nilai 100 dikurangi dengan hasil perhitungan selisih masing-masing indikator kemudian hasil perhitungan di atas dijumlahkan dan dibagi 6	0	sda	
		Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	0	sda	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi klaster	0	sda	
		Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	70	sda	
		Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	13	sda	
		Persentase LPK yang terakreditasi	17	sda	
		Persentase LPK yang memiliki perizinan	43	sda	
		Jumlah penganggur yang dilatih	2190	sda	
		Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	96	sda	
		Persentase penyerapan lulusan	60	sda	
		Lulusan bersertifikat kompetensi	28	sda	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	0	sda	
		Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	0	sda	
		Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	5	sda	
		Data tingkat produktivitas total	17	sda	
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	192	sda	
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	152	sda	
		Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	16	sda	
		Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	100	sda	
		Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	125	sda	
		Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	1	sda	
		Jumlah mogok kerja	0	sda	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah penutupan perusahaan	8	sda	
		Jumlah perselisihan kepentingan	0	sda	
		Umlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0	sda	
		Jumlah perselisihan PHK	9	sda	
		Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	416	sda	
		Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	3	sda	
		Lembaga Kerja Sama (LKS) tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	1	sda	
		Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama oleh mediator hubungan industrial	57	sda	
		Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	1.681	sda	
		Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	3.632	sda	
		Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	64	sda	
		Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	2	sda	
		Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	2	sda	
		Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	3	sda	
		Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang Ketenagakerjaan Kab/Kota	0	sda	
		Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	199	sda	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	0	sda	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	61	sda	
		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan yang diterbitkan	0	sda	
		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	0	sda	
		Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja	0	sda	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Indonesia (TKI) purna dan keluarganya			
		Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	0	sda	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor
		Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	0	sda	
		Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/ kota	51	sda	
		Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	11	sda	
		Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	3	sda	
		Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100%	sda	
8	Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	1	sda	
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	3	sda	
		Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	2	sda	
		Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	300	sda	
		Jumlah lembaga layanan Pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	2	sda	
		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	2	sda	
		Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	0	sda	
		Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandardisasi	2	sda	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%	sda	
		Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	1	sda	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor
		Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	0	sda	
		Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan local	0	sda	
9.	Pangan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	1	sda	
		Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	1	sda	
		Tertanganinya kerawanan pangan	0	sda	
		Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	0	sda	
		Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	1	sda	
		SK izin lokasi yang diterbitkan oleh Bupati/Wali kota	0	sda	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor
10.	Pertanahan	SK Bupati/Wali kota tentang penetapan tanah obyek landreform yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum/ absentee dan daftar subyek	0	sda	
		SK Bupati/Wali kota tentang penetapan besarnya ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absentee	0	sda	
		Dokumen Izin membuka tanah	0	sda	
		Dokumen perencanaan penggunaan tanah Kabupaten/Kota	0	sda	
		SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Bupati/Wali Kota	0	sda	
11.	Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan provinsi terhadap : a. Indeks Kualitas Air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks Tutupan Hutan (ITH)	Nihil	sda	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	Nihil	sda	
		Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Nihil	sda	
		Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	Nihil	sda	
		Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota	Nihil	sda	
		Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Nihil	sda	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	Nihil	sda	
		Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani	Nihil	sda	
		Penerbitan akta perkawinan	274.547	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor	
12.	Administrasi Kependudukan	Penerbitan akta perceraian	80	sda	
		Penerbitan akta kematian	5.523	sda	
		Penyajian data kependudukan	1.091.396	sda	
		Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Nihil	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor	
13.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	Nihil	sda	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Nihil	sda	
		Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan	Nihil	sda	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan			
		Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Nihil	sda	
		Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	Nihil	sda	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Nihil	sda	
		Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Nihil	sda	
		Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	0	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor	
		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	Nihil	sda	Data Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	12.09	sda	
		Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	87	sda	
		Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	17	sda	
Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	92	sda			
Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	21.13	sda			
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	30	sda			
Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	37.52	sda			



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
15.	Perhubungan	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	74.78	sda	
		Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	61.71	sda	
		Persentase tersedianya fasilitas Penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	37,5	Dinas Perhubungan Kota Bogor	sda
		Terlaksananya pelayanan uji berkala	99,83		
		Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	3.500	sda	
		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	98,89	sda	
		Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	96 %	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor	
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	96 %	sda	
		Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	100	sda	
		Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100 %	sda	
16.	Komunikasi Informasi Statistik Persandian	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan	91,6 %	sda	
		Persentase layanan SPBE (layanan public dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah	100 %	sda	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		diimplementasikan secara elektronik			
		Persentase layanan SPBE (layanan public dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	4,2 %	sda	
		Persentase system elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	0	sda	Aplikasi dari pusat sedang perbaikan
		Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan system penghubung layanan pemerintah	0	sda	
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100 %	sda	
		Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	47,22 %	sda	
		Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	25 %	sda	
		Persentase data yang dapat berbagi pakai	89 %	sda	
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	100 %	sda	
		Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	55 %	sda	
		Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi egovernment	4	sda	
		Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah Kab/Kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kab/Kota	1,59 %	sda	
		Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kab/Kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100 %	sda	
		Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100 %	sda	
		Tersedianya buku profil daerah	1	sda	
		Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	0	sda	
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	206	sda	
		Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	0	sda	
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	251	sda	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	0	sda	
		Persentase kelengkapan meta data indikator sektoral	0	sda	
		Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	0	sda	
		Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	80 %	sda	
		Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori renda	0	sda	
		Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerin (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	88 %	sda	
		Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Masyarakat Kota Bogor	
		Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	sda	
		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	3.27	sda	
17.	Koperasi Dan Usaha Kecil	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	10.71	sda	
		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaandalam daerah kabupaten/kota	20.39	sda	
		Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti Pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0.06	sda	
		Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah	0.33	sda	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	0	sda	
		Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	12.9	sda	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	1.48	sda	
		Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Nihil	sda	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Nihil	sda	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Nihil	sda	
		Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Nihil	sda	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	Nihil	sda	
		Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	Nihil	sda	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Nihil	sda	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Nihil	sda	
		Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Nihil	sda	
		Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	Nihil	sda	
18.	Penanaman Modal	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor	
		Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	0	sda	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	1	sda	
		Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	1	sda	
		Kegiatan pameran penanaman modal	0	sda	
		Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	20	sda	
		Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	3.838	sda	
		Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	12.270	sda	
		Laporan realisasi penanaman modal	618.472	sda	
		Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat serta kabupaten/kota	3	sda	
		Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	325	sda	
		Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	8	sda	
		Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	72	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor	Melalui kegiatan Dispora Youth Preuner Academy
		Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0	sda	Dispora tidak memberikan bantuan kewirausahaan
19.	Kepemudaan dan Olahraga	jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	18	sda	Pelatihan Paskibra Kota Bogor
		Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	0	sda	Tidak ada kegiatan pelatihan manajemen organisasi kepemudaan
		Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	193	sda	
		Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	0	sda	Tidak adanya event olahraga dikarenakan adanya pandemi covid-19



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	32	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor	
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	32	sda	
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	18	sda	
		Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	0	sda	
		Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemerinkkatan, penghapusan)	32	sda	
		Perlindungan cagar budaya Kab/Kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	0	sda	
		Layanan perijzinan membawa cagar budaya kab/kota ke luar Kab/Kota dengan dukungan data	0	sda	
		Pengembangan cagar budaya Kab/Kota (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	0	sda	
20.	Kebudayaan	Pemanfaatan cagar budaya Kab/Kota (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	0	sda	
		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	6	sda	
		Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	60.511	sda	
		peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.			
		Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	1	sda	
		Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	1	sda	
		Pembentukan tim ahli cagar budaya Kab/Kota	1	sda	
		Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	1	sda	
		Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman	Nihil	sda	
		Peningkatan kompetensi SDM cagar budaya dan permuseuman	0	sda	
		Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	0	sda	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
21.	Perpustakaan	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	29	sda	
		Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	77.684		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bogor
		Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	0	sda	
		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	10	sda	
		Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	24	sda	
		Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	5	sda	
		Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	0	sda	
		Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0	sda	
		Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	0	sda	
		Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100%		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bogor
22.	Kearsipan	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100%	sda	
		Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	40%	sda	
		Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	17	sda	
		Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	0	sda	
		Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	0	sda	
		Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi	0	sda	
		Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan Kab/Kota yang sesuai NSPK	0	sda	
		Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kab/Kota yang dinyatakan	0	sda	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
23.	Kelautan dan Perikanan	hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kab/Kota yang sesuai NSPK	0	sda	
		Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor	
		Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	0	sda	
		Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di Bidang pembudidayaan ikan yang usahanya Dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota yang diterbitkan	0	sda	
24.	Pariwisata	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	145	sda	
		Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	194.690.000 ekor	sda	
		Jumlah entitas pengelolaan destinasi	30	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor	Yang dimaksud dengan destinasi wisata adalah kawasan geografis yang berada satu atau lebih wilayah administrative yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas dan serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan
		Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	20	sda	Yang dimaksud sebagai entitas pengelolaan destinasi adalah pengelola destinasi pariwisata, baik negeri maupun swasta • Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
					fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian
					<ul style="list-style-type: none">• Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata Yang dimaksud dengan usaha pariwisata meliputi bidang usaha : <ul style="list-style-type: none">• Daya Tarik usaha• Kawasan pariwisata• Jasa transportasi wisata• Jasa perjalanan wisata• Jasa makanan dan minuma• Penyediaan akomodasi• Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi• Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran• Jasa informasi pariwisata• Jasa konsultan pariwisata• Jasa pramuwisata• Wisata tirta• Spa
		Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	2.626	sda	
		Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	42.968	sda	Bisa sebagai peserta atau penyelenggara



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	1	sda	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	0	sda	
		Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	0	sda	Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
		Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	0	sda	
		Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	100	sda	
		Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	6	sda	
		Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	137	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor	
		Prasaran pertanian yang digunakan	12	sda	
25.	Pertanian	Penerbitan izin usaha pertanian	0	sda	
		Persentase prasarana yang digunakan	100	sda	
		Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	0	sda	
		Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	0	sda	
		Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Nihil	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
26.	Kehutanan	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	Nihil	sda	
		Pemulihan ekosistem pada Tahura	Nihil	sda	
		Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	Nihil	sda	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
27.	ESDM	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	Nihil	Nihil	
		Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	50	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor	
		Persentase penerbitan TDG	40	sda	
		Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	28,57	sda	
28.	Perdagangan	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	100	sda	
		Persentase pemeriksaan Fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	0%	sda	
		Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	0%	sda	
		Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	50%	sda	
		Persentase koefisien variasi harga antar waktu	4.02	sda	
		Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	0.56	sda	
		Persentase alat-alat ukur,takar,timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	13.21	sda	
		Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	74.3	sda	
		Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor	
		Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	30%	sda	
29.	Perindustrian	Persentase jumlah izin usaha industry (IUI) besar yang diterbitkan	28,57%	sda	
		Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri besar yang diterbitkan	0	sda	
		Persentase data perusahaan industri menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota yang masuk dalam	10,09%	sda	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
30.	Transmigrasi	SIINas terhadap total populasi perusahaan industri Kecil, Menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota			
		Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	Nihil	Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor	
		Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Nihil	sda	
		Jumlah satuan pemukiman yang dibina	Nihil	sda	

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	$\frac{18.705}{37.260} \times 100\%$ = 50,201 %	Dinas Pendidikan Kota Bogor	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	$\frac{108.408}{108.800} \times 100\%$ = 99,64 %	sda	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	$\frac{47.988}{54.972} \times 100\%$ = 87,295 %	sda	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	$\frac{5.545}{163.772} \times 100\%$ = 3,386 %	sda	
2	Kesehatan	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	$\frac{3.160}{1.126.927} \times 100\%$ = 0,28 %	Dinas Kesehatan	
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	$\frac{18}{22} \times 100\%$ = 81,818 %	sda	
		Persentase ibu hamil	18.604 x100%	sda	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	19.238 = 96,704 %		
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	$\frac{17.426}{18.363} \times 100\%$ = 94,897 %	sda	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	$\frac{17.428}{17.476} \times 100\%$ = 99,725 %	sda	
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	$\frac{79.694}{84.729} \times 100\%$ = 94,058 %	sda	
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{35.694}{76.642} \times 100\%$ = 46,572 %	sda	
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{471.086}{755.429} \times 100\%$ = 62,36 %	sda	
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{66.840}{66.840} \times 100\%$ = 100 %	sda	
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{56.411}{55.385} \times 100\%$ = 101,852 %	sda	
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{17.801}{17.042} \times 100\%$ = 104,454%	sda	
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	$\frac{1.184}{1.571} \times 100\%$ = 76,338 %	sda	
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	$\frac{9.568}{18.909} \times 100\%$ = 50,6 %	sda	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	$\frac{12.108}{13.053} \times 100\%$ = 92,76 %	sda	
3	Pekerjaan Umum	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	$\frac{33,38}{68,10} \times 100\%$ = 49,016 %	Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor	
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	- (Bogor tidak memiliki daerah pantai)	sda	
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	$\frac{154,33}{220,34} \times 100\%$ = 70,042%	sda	
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	$\frac{202.930}{242.064} \times 100\%$ = 83,833 %	sda	
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	$\frac{188.565}{242.064} \times 100\%$ = 77,899%	sda	
		Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	$\frac{872}{1.062} \times 100\%$ = 82,109%	sda	
		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	$\frac{727.56}{864.13} \times 100\%$ = 84,196%	sda	
		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	$\frac{199}{240} \times 100\%$ = 82,917%	sda	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	$\frac{520}{520} \times 100\%$ = 100%	sda	
4	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	$\frac{140}{165} \times 100\%$ =84,848 %	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Penduduk Kota Bogor	
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program	$\frac{66}{1.918} \times 100\%$ =3,441 %	sda	
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	$\frac{21,88}{250,12} \times 100\%$ =8,748 %	sda	
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	$\frac{48.357}{242.064} \times 100\%$ =19,977 %	sda	
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	$\frac{25.720}{242.064} \times 100\%$ =10,625 %	sda	
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	$\frac{324}{324} \times 100\%$ = 100%	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor	
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{65}{65} \times 100\%$ = 100%	sda	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	2.963	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2.963	sda	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	$\frac{2.963}{1} \times 100\%$ =296300	sda	
		Persentase pelayanan	$\frac{80}{\dots} \times 100\%$	Satuan Polisi	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	85 = 94,118 %	Pamong Praja Kota Bogor	
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	9,3	sda	
6	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	$\frac{522}{522} \times 100\%$ 522 (orang) =100 %	Dinas Sosial Kota Bogor	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	$\frac{500}{2.000} \times 100\%$ 2.000 (Jiwa) =25 %	sda	
7	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Nihil	Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor	
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	$\frac{85.324}{466.645} \times 100\%$ =18,285 %	sda	
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	7.143.638,671	sda	
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	$\frac{1.032}{2.039} \times 100\%$ =50,613%	sda	
		Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	$\frac{2.440}{3.632} \times 100\%$ =67,181 %	sda	
8	Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	$\frac{293.790.080.818}{1.217.221.188.018} \times 100\%$ =24,136 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
				Bogor	
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	$\frac{50}{332.654} \times 100\%$ 332.654 (Orang) =0,015 %	sda	
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	$\frac{82}{531.893} \times 100\%$ 531.893 (Orang) =15,417 %	sda	
9	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	$\frac{0 \text{ kg}}{108477504.72 \text{ kg/th}} \times 100\%$ = 0 %	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
10	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Nihil	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor	
		Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Nihil	sda	
		Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	Nihil	sda	
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Nihil	BPN Kota Bogor	
		Tersedianya tanah untuk masyarakat	Nihil	Sekretariat Daerah Kota Bogor	
		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	$\frac{18}{18} \times 100\%$ =100%	Sekretariat Daerah Kota Bogor	
11	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/ Kota	IKLH = 58,597	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	
		Terlaksananya Pengelolaan	$\frac{522,5}{643,529} \times 100\%$	sda	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Sampah di Wilayah Kab/Kota	= 81,193 %		
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUI LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	$= \frac{90}{93} \times 100\%$ = 96,774 %	sda	
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP Elektronik	$\frac{770.986}{776.040} \times 100\%$ =99,349 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor	
		Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	$\frac{124.320}{312.303} \times 100\%$ =39,807 %	sda	
		Kepemilikan akta kelahiran	$\frac{298.567}{312.387} \times 100\%$ =95,576 %	sda	
		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	$\frac{21}{35} \times 100\%$ =60 %	sda	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Nihil	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor	
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Nihil	sda	
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	$\frac{117.552}{149.502} \times 100\%$ = 78,629 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	$\frac{18.600}{149.502} \times 100\%$ = 12,441 %	sda	
15	Perhubungan	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	0,78	Dinas Perhubungan Kota Bogor	
		V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota Hari Kerja = 0,62	sda	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			Hari Libur = 0,57		
16	Komunikasi	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{35}{35} \times 100\%$ = 100%	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor	
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	$\frac{683}{683} \times 100\%$ = 100 %	sda	
		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	$\frac{788.518}{1.043.070} \times 100\%$ = 75,596 %	sda	
	Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	$\frac{27}{36} \times 100\%$ = 75 %	sda	
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	$\frac{27}{36} \times 100\%$ = 75 %	sda	
	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	$\frac{395}{645} \times 100\%$ = 61,24 %	sda	
17	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	$\frac{218}{670} \times 100\%$ = 32,537%	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Masyarakat Kota Bogor	
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Nihil	sda	
18	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	$\frac{1603215589544.5}{618.472} \times 100\%$ = 259221971387,7%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor	
19	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	$\frac{3.090}{254.262} \times 100\%$ = 1,215 %	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	$\frac{47.702}{254.262} \times 100\%$ =18,761 %	sda	
		Peningkatan prestasi olahraga	72 Medali	sda	
20	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	$\frac{32}{485} \times 100\%$ =6,598%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor	
21	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	77.684	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bogor	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	0	sda	
22	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	64	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bogor	
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	100	sda	
23	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	5.205,69 ton	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor	
24	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$\frac{-32.116}{75.084} \times 100\%$ =-42,773 %	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor	
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kab/Kota	$\frac{308.734}{3.382.638} \times 100\%$ =9,127 %	sda	
		Tingkat hunian akomodasi	$\frac{3.468}{5.830} \times 100\%$ = 59,485 %	sda	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	48.668,429	sda	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	185.661.140.961	sda	
25	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	$\frac{17.432}{1.107} \times 100\%$ = 1.172,293 %	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor	
		Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	$\frac{-9}{429} \times 100\%$ = -2,098 %	sda	
26	Energi dan Sumber Daya mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	Nihil	Nihil	
27	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	$\frac{150}{622} \times 100\%$ = 24,116%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor	
		Persentase kinerja realisasi pupuk	$\frac{194.439}{195.880} \times 100\%$ = 99,264%	sda	
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	$\frac{59.262}{448.457} \times 100\%$ = 13,215%	sda	
28	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	$\frac{-75}{1.264} \times 100\%$ = -5,934 %	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor	
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	30	sda	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{8}{8} \times 100\%$ =100%	sda	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Nihil	sda	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kab/Kota	Nihil	sda	
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	35	sda	

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Pemerintahan

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	$\frac{755.091.874.992}{2.637.964.528.632} \times 100\% = 28,624\%$	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bogor	
		Rasio PAD	$\frac{966.463.369.433}{45.940.259.000.000} \times 100\% = 2,104\%$	Badan Pendapatan Daerah	
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	Inspektorat Daerah Kota Bogor	Tercapai
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	sda	Tercapai
2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan)	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	$\frac{1.967.322.773.318}{2.637.964.528.632} \times 100\% = 74,577\%$	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor	
		Opini Laporan Keuangan	WTP	sda	
		Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0%	Sekretariat Daerah Kota Bogor	
		Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	$\frac{126}{5.140} \times 100\% = 2,451\%$	sda	



No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			<u>1.784.412.611</u>		
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	2.841.609.070.361 x 100%	sda	
			=0,063%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bogor
3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	<u>1685</u> x 100% 1456 =115,728%		
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	<u>363</u> x 100% 3.141 =11,557%	sda	
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	<u>336</u> x 100% 2778 =13,067%	sda	
		Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	3.7863		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan)	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD Assets Management 1. Apakah ada daftar asset tetap? 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran?	11,199 % 1. Ya 2. Ya 3. Ya 4. Ya	sda	
		Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	13.914	sda	
5	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik)	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	<u>2.354.870.702.982</u> 2.642.163.029.058 x 100% =89,127% <u>6</u> x 100% 7 =85,714%	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor sda	



2.3 Capaian Akuntabilitas Kinerja

Kinerja Pemerintah Kota Bogor Tahun 2021 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD pemerintah Kota Bogor Tahun 2019-2024. Sebanyak 29 indikator diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja yang akan menggambarkan keberhasilan maupun kegagalan kinerja pemerintah Kota Bogor.

No.	Nama Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Tahun 2021 (%)
1.	AHH saat lahir	99,81
2.	Persentase Rumah Tangga ber-PHBS(%)	100,43
3.	Angka Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	72,34
4.	Persentase Rumah tangga yang terlayani air minum yang aman (%)	72,18
5.	Persentase rumah tangga yang terlayani sistem air limbah yang layak (%)	106,67
6.	Persentase Luasan kawasan kumuh kewenangan kota (%)	107,05
7.	Persentase Reduksi Sampah	118,94
8.	Indeks Kualitas Air	130,30
9.	Indeks Kualitas Udara	115,52
10.	Prosentase Ruang Terbuka Hijau Publik (%)	108,54
11.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	95,99
12.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	96,55
13.	Indeks Pembangunan Pemuda	82,86
14.	Indeks Inovasi daerah	100
15.	Indeks Pemberdayaan Gender	97,91
16.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	111,39
17.	Indeks Reformasi Birokrasi	95,71
18.	Level Kematangan Smart City	100
19.	Tingkat Pengangguran Terbuka	106,50
20.	Angka Kemiskinan	83,97
21.	Indeks Ketahanan Keluarga	115,14
22.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	55,70
23.	PDRB Per Kapita	95,39
24.	Pengeluaran Per Kapita	104,43
25.	Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	93,14
26.	Persentase Realisasi Rencana Struktur Ruang (Periode Rencana 2020-2024)	65,03
27.	Persentase Realisasi Rencana Pola Ruang (Periode Rencana 2020-2024)	77,33
28.	Persentase Jalan Berkondisi Baik (%)	92,53
29.	Persentase Cakupan Pelayanan Angkutan Umum (%)	131,65

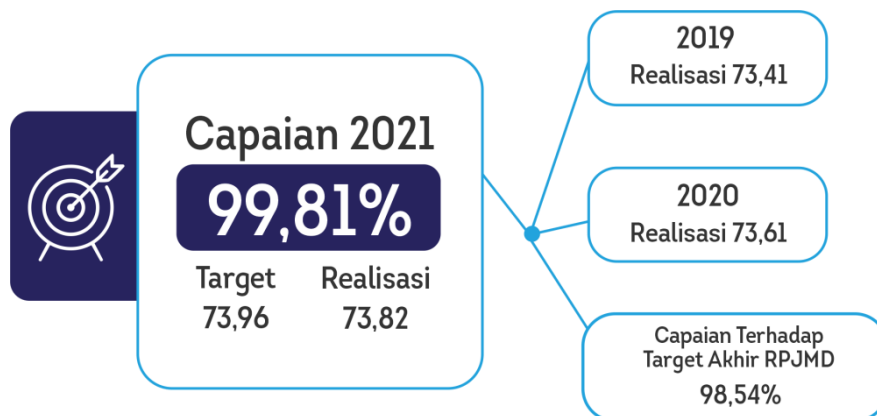
MISI 1

MEWUJUDKAN KOTA BOGOR YANG SEHAT

Sasaran I Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

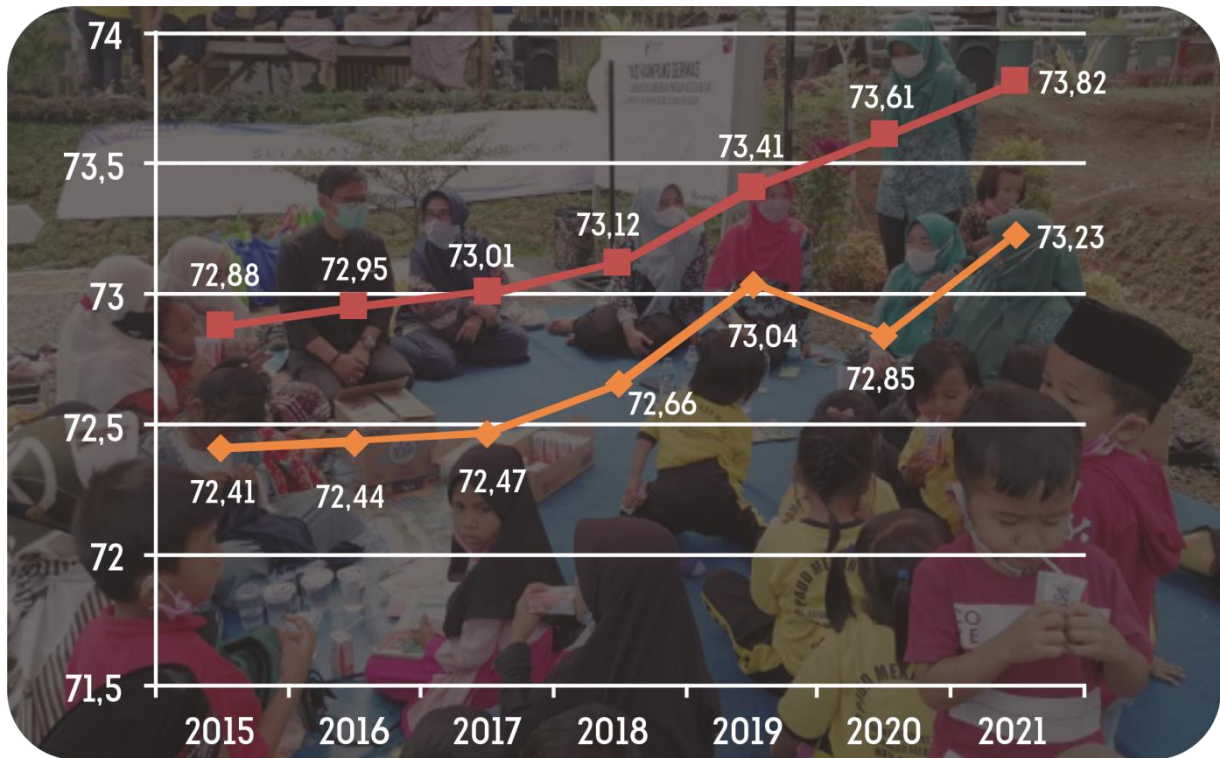


Sasaran ini diukur oleh Indikator Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir. Perangkat daerah yang berkolaborasi mengampu indikator tersebut yaitu Dinas Kesehatan, Rumah sakit Umum Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.



Angka Harapan Hidup (AHH) Saat Lahir

Angka harapan hidup (AHH) merupakan rata-rata perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidupnya. Indikator ini sering dipergunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk khususnya di bidang Kesehatan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa AHH merupakan rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani seseorang sejak orang tersebut lahir. Angka ini memperlihatkan semakin tinggi rata-rata usia suatu penduduk, maka diperkirakan semakin lama pula penduduk tersebut dapat hidup. Angka harapan hidup ini erat kaitannya dengan kematian bayi. Semakin tinggi angka kematian bayi, semakin rendah pula angka harapan hidup.



◆ Provinsi Jawa Barat ■ Kota Bogor

Sumber : BPS Jawa Barat (2021)

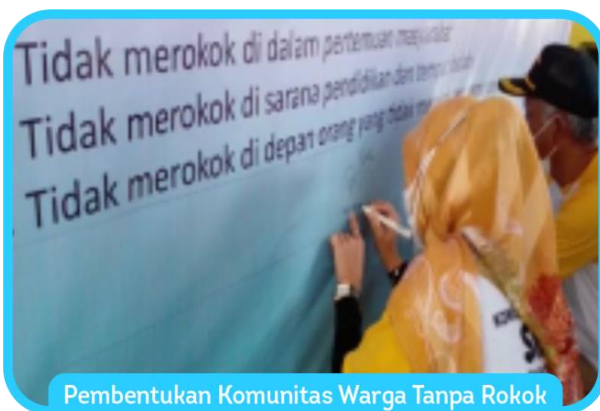
Mulai tahun 2015 – 2021 angka harapan hidup di Kota Bogor mengalami peningkatan. Meskipun belum mencapai target, capaian tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0.21 dibanding tahun 2020 yang mencapai 73,61 tahun. Peningkatan itu menandakan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, capaian AHH Kota Bogor lebih tinggi 0,59 poin. Jika dilihat dari perspektif target akhir RPJMD, capaian Angka Harapan Hidup (AHH) telah terealisasi sebesar 98,54%. Faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan pencapaian AHH Kota Bogor yaitu:

- Penurunan kasus kematian bayi, yaitu untuk tahun 2021 sebanyak 61 kasus, yang disebabkan oleh BBLR (41%), Asfiksia (37%), diare (33%), dan sisanya karena penyebab lain seperti aspirasi, kejang, dan morbus hirschsprung;
- Kondisi kasus kematian ibu rendah yaitu sebanyak 18 kasus, yang disebabkan oleh Covid-19 (83%), pendarahan (11%), dan gangguan sistem peredaran darah (6%);

- c) Prevelensi stunting Kota Bogor berdasarkan hasil BPB Agustus 2021 yaitu 5,33 % (3.875 balita) dari balita yang diukur sebanyak 72.467 balita. Angka tersebut masih di bawah Jabar sebesar 24,5 %.

Program-program prioritas yang mendukung AHH sebanyak 7 (tujuh) program, yaitu:

- Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat;
- Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan Kesehatan;
- Program sediaan farmasi, alat Kesehatan dan makanan dan minuman;
- Program pembinaan keluarga berencana (KB);
- Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
- Program pengawasan keamanan pangan; serta
- Program pengendalian Kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner.



Dalam rangka pencegahan covid 19, upaya yang dilakukan untuk mendukung pencapaian AHH antara lain dengan melakukan kolaborasi dan inovasi dengan unsur kementerian Kesehatan, Kepolisian, TNI POLRI, dan berbagai organisasi kemasyarakatan melalui deteksi dini Covid 19, pemberian vaksinasi, serta pembangunan Rumah Sakit Lapangan.



Peningkatan Angka Harapan Hidup dapat dicapai dengan melaksanakan beberapa upaya sebagai berikut:

- a) Meningkatkan keselamatan ibu melahirkan dan anak melalui Program Nga EMAS (Expanding Maternal & Neonatal Survival), namun dikarenakan adanya Pandemic-Covid 19 pelaksanaan kegiatan hanya bisa dilaksanakan sampai dengan bulan maret;
- b) Meningkatkan pelayanan kesehatan pada balita melalui pembinaan tumbuh kembang balita, remaja dan lansia melalui Peer Conselor, Pos Pelayanan terpadu, namun dikarenakan adanya Pandemic-Covid 19 pelaksanaan kegiatan hanya bisa dilaksanakan sampai dengan bulan maret;
- c) Perbaiki gizi pada balita dan ibu hamil melalui pemberian makanan tambahan, serta kegiatan inovasi Tanggap Leungitkeun Stunting Ti Kota Bogor (Taleus Bogor), pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular;
- d) Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);



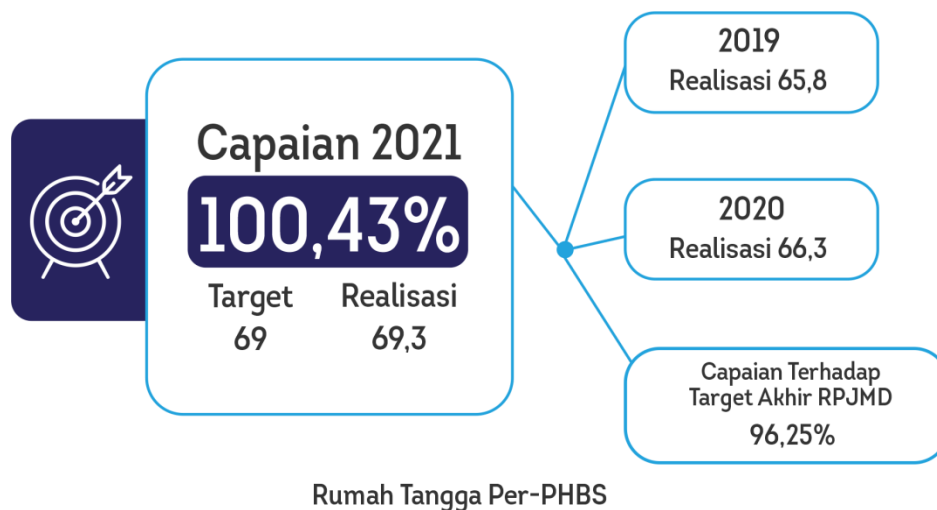
- e) Standarisasi sarana dan pelayanan kesehatan melalui akreditasi puskesmas dan pelayanan kesehatan melalui Program Indonesia Sehat - Pendekatan Keluarga (PIS-PK);
- f) Pemberian jaminan kesehatan kepada penduduk miskin;
- g) Pelayanan kunjungan rumah masyarakat dengan Bogor Anjang Sehat (BAS);
- h) Perbaikan lingkungan sehat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
- i) Pencegahan dan pengendalian penyakit baik penyakit menular, penyakit tidak menular, dan penyakit berbasis lingkungan.

Sasaran II

Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat



Sasaran ini diukur oleh Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS dan Angka Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga. Perangkat daerah yang berkolaborasi mengampu indikator tersebut yaitu Dinas Kesehatan serta Dinas Pemuda dan Olahraga.



Rumah Tangga ber-PHBS ditentukan berdasarkan pencapaian 10 indikator. Apabila ada satu atau dua indikator yang tidak terpenuhi, maka rumah tangga tersebut dikategorikan sebagai rumah tangga tidak ber-PHBS. Data PHBS Rumah Tangga (RT) diperoleh dari hasil survei pendataan PHBS RT yang dilakukan oleh kader dan petugas promosi kesehatan (promkes) puskesmas di masing-masing RW yang telah diberikan pelatihan. Pada tahun 2021, pendataan dilakukan terhadap 210.482 RT dengan jumlah RT yang ber-PHBS sebesar 145.792 (69.3%). Adapun capaian persentase PHBS RT per Kecamatan serta Persentase Capaian 10 Indikator PHBS RT tahun 2016 s.d 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Rumah Tangga ber PHBS per Kecamatan
Tahun 2016 s/d 2021

No	Kecamatan	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
1	Tanah Sareal	69,6	70,2	70	69,3	70,8	71,4
2	Bogor Tengah	50,5	52,4	50,7	50,9	67,7	67,3
3	Bogor Timur	64,5	65,7	60,1	59,9	62,9	63,6
4	Bogor Utara	66,1	67,4	67,1	68,1	70,8	69,4
5	Bogor Selatan	58,8	60,9	68,8	67	57	67,4
6	Bogor Barat	65,6	69,2	65,3	69	65,3	72,1
	Kota Bogor	65	65,2	65,5	65,8	65,8	69,3
	TARGET	64	65	66	67	68	69

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bogor (2021)

Tabel 2.3
Capaian 10 Indikator PHBS RT Tahun 2016 s/d 2021

No	Indikator PHBS	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
1	Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan	90,7	88,9	91,6	95,0	94,4	93,8
2	Memberi bayi ASI eksklusif (0-6 bulan)	70,0	70,1	81,7	72,4	68,4	70,4
3	Menimbang bayi dan balita (0-59) bulan setiap bulan	92,4	89,8	90,5	90,5	83,7	85,7
4	Menggunakan air bersih	97,4	97,6	96,6	98,2	95,5	98,3
5	Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun	93,8	81,2	94,1	96,7	96,3	97,7
6	Menggunakan jamban sehat	83,0	86,9	84,8	86,2	83,4	85,1
7	Memberantas jentik nyamuk	94,6	95,7	93,9	96,3	94,8	96,1
8	Makan sayur dan buah setiap hari	92,9	92,8	93,3	91,9	92,5	95,5
9	Melakukan aktifitas fisik setiap hari minimal 30 menit	93,0	93,5	92	94,4	93,5	94,3
10	Tidak merokok di dalam rumah	63,1	63,8	62,6	65,8	67,5	70,1

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bogor (2021)



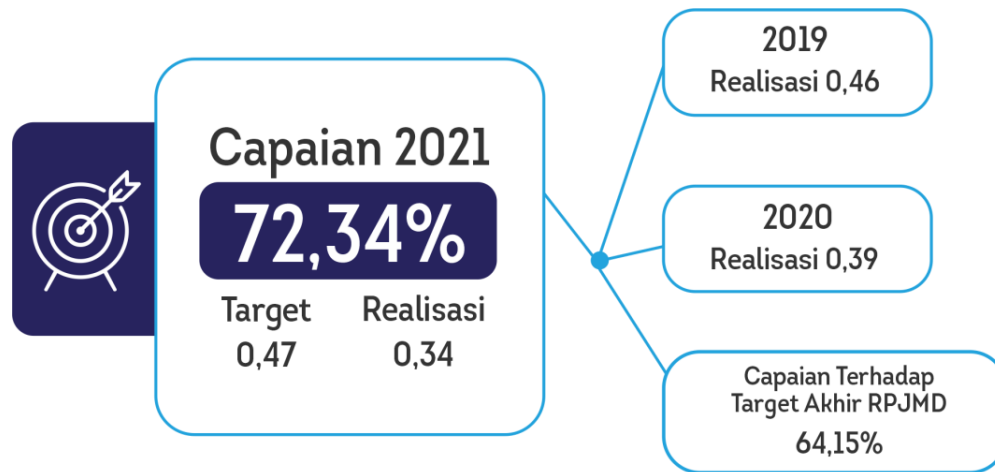
Persentase Rumah Tangga ber-PHBS pada tahun 2021 dapat mencapai target dengan capaian sebesar 100,43% serta meningkat 3 poin dari tahun sebelumnya. Dari perspektif target akhir RPJMD, indikator tersebut telah mencapai 96,25%. Program yang mendukung pencapaian Rumah Tangga ber-PHBS yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan upaya yang telah dilaksanakan yaitu:

- a) Adanya kegiatan Ngariung Sehat yang telah dilaksanakan sejak tahun 2019 dan menjadi program inovasi dalam meningkatkan persentase rumah tangga ber PHBS. Tahun 2020 Kegiatan Ngariung Sehat telah dilaksanakan di 6 lokus di masing-masing kecamatan untuk mengetahui permasalahan di masing-masing wilayah serta adanya solusi dari permasalahan tersebut sehingga cakupan PHBS RT menjadi meningkat. Untuk tahun 2021 kegiatan inovasi ngariung sehat dilaksanakan di lokasi lomba Kesatuan Gerak (Kesrak) PKK Bidang Kesehatan dalam rangka untuk meningkatkan capaian PHBS RT sebagai salah satu penilaian lomba Kesrak;
- b) Penguatan Peran Kader dalam Peningkatan PHBS Rumah Tangga di tingkat kota maupun tingkat puskesmas;
- c) Peningkatan peran serta dan peran aktif organisasi kepemudaan seperti Duta Muda Sehat dan Saka Bakti Husada dalam program kesehatan;
- d) Melibatkan peran aktif UKBM seperti Kelurahan Siaga, Posyandu, Posbindu, RW Siaga Covid dan sebagainya dalam mendukung penerapan PHBS RT di wilayahnya masing-masing;
- e) Peningkatan jejaring kemitraan dengan Tim Penggerak PKK untuk meningkatkan peran kader Dasawisma dalam pembinaan dan peningkatan PHBS di setiap rumah tangga yang menjadi tanggung jawabnya;
- f) Pengembangan program-program inovasi dalam rangka akselerasi pencapaian cakupan PHBS melalui Ngariung Sehat, Kampung Germas;
- g) Penyediaan sarana informasi kesehatan terkait PHBS sebagai salah satu upaya promotif preventif kesehatan melalui media cetak, media sosial, media elektronik;
- h) Integrasi dengan data PIS-PK untuk melakukan intervensi sesuai dengan permasalahan PHBS rumah tangga;
- i) Deklarasi komitmen dan pembentukan Komunitas Warga Tanpa Rokok (KWTR);

- j) Kampanye Masif Perubahan Perilaku Masyarakat di Berbagai Tatanan dengan melibatkan OPD, lintas program Dinkes, media, serta dunia usaha / swasta untuk meningkatkan peran aktif dan jejaring kemitraan "Pentahelix";
- k) Kampanye PHBS, Germas, Covid-19, dan Program Kesehatan Lainnya kepada masyarakat luas Kota Bogor dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat; dan
- l) Kampanye "Geber Lawan Covid" kepada masyarakat luas terkait penerapan protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran Virus Covid 19.

Untuk mendukung implementasi rumah tangga ber-PHBS, upaya lain yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bogor yaitu dengan mencanangkan Kampung BeseK Bojongkerta yang dideklarasikan untuk Gairahkan Pola Hidup Bersih Sehat. BeseK merupakan akronim dari Bebersih Sarerea Pikeun Kasehatan (Bersih-bersih bersama untuk kesehatan). Di kampung ini juga merupakan lokasi binaan program terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS). Tujuan dari gerakan ini adalah untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat.





Angka Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga

Angka Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga (APMO) menunjukkan tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga. Pengukuran APMO dilakukan oleh tenaga Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan Olahraga (SP3OR) melalui survey terhadap masyarakat yang berusia di atas 7 tahun, terdiri dari para pelajar/mahasiswa, PNS/TNI/POLRI/BUMN, pegawai swasta, wiraswasta/wirausaha, petani/nelayan dan lainnya dengan sampel sebesar 10% dari setiap strata. Pada tahun 2021 survey telah dilakukan di Kecamatan Bogor Utara dan Kecamatan Bogor Timur sesuai domisili SP3OR. Dari survey tersebut diperoleh Angka Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga sebesar 0,34.

Capaian tersebut menurun jika dibanding capaian tahun 2020, yaitu mencapai 0,39. Penurunan terjadi akibat pandemi covid-19, yang membuat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menghimbau setiap orang untuk melaksanakan *physical distancing*. Oleh karena itu tempat-tempat olahraga seperti GOR, lapangan, serta fasilitas olahraga lainnya ditutup untuk menghindari terjadinya kerumunan sebagai upaya memotong rantai penyebaran covid-19. Akibatnya setiap orang secara tidak langsung dipaksa untuk melakukan segala aktivitas termasuk olahraga di rumah.

Berbagai upaya yang dilakukan pada tahun 2021 untuk peningkatan prestasi dan pemasyarakatan olahraga, yaitu:

- a. Penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi melalui:
 - 1) koordinasi dan kerjasama lintas dektoral dan antar tingkat pemerintahan;

- 2) peningkatan potensi sumberdaya olahraga tingkat kota dan prestasi olahraga di tingkat kota dan nasional;
- 3) penataan dan pengembangan manajemen keolahragaan.
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui:
 - 1) pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
 - 2) pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga.
- c. Pengelolaan olahraga melalui:
 - 1) peningkatan bibit olahragawan dan cabang olahraga unggulan
 - 2) pemberdayaan dan pengembangan induk organisasi cabang olahraga, klub olahraga, sanggar olahraga, dan sentra pembinaan olahraga.
- d. Penyelenggaraan Kejuaraan Keolahragaan, yaitu:
 - 1) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga di tingkat Kota dan Propinsi dalam rangka penguatan fondasi bangunan olahraga nasional;
 - 2) Fasilitasi keikutsertaan dan penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat nasional.
- e. Pembinaan dan Pengembangan Pelaku Olahraga, melalui:
 - 1) Peningkatan kemampuan manajemen pembina olahraga;
 - 2) Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga keolahragaan termasuk tenaga teknis penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
 - 3) Pembinaan olahragawan andalan nasional.
- f. Pemberdayaan Olahraga Profesional, melalui:
 - 1) Pembinaan organisasi olahraga profesional dan pengembangan tenaga profesional keolahragaan;
 - 2) Pengawasan dan pengendalian olahraga professional.
- g. Peningkatan Prasarana dan sarana Olahraga, yaitu:
 - 1) Perencanaan pembangunan sarana prasarana olahraga di setiap kecamatan;
 - 2) Inventarisasi dan penetapan prasarana olahraga di tingkat kota, desa dan kelurahan;
 - 3) Perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, serta pengawasan prasarana dan sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan industri olahraga.
- h. Peningkatan Peran Serta Masyarakat, melalui:

- 1) Promosi kegiatan pemerintah dalam pelayanan keolahragaan;
- 2) Mediasi masyarakat dalam berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan pelayanan kegiatan olahraga;
- 3) Advokasi kemitraan masyarakat pada program pemerintah di bidang keolahragaan, termasuk apresiasi dan penghargaan.



Kota Bogor Raih Penghargaan Kota Ramah Sepeda dari Bike to Work Indonesia

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga, Pemerintah Kota Bogor terus melakukan berbagai upaya diantaranya dengan memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana olahraga. Terbukti pada tahun 2021, Kota Bogor berhasil meraih penghargaan Kota Ramah Sepeda dari Bike To Work Indonesia (B2W) bersama Yogyakarta dengan kategori Kota Besar/Ibukota Provinsi. Kota Bogor pertama kali membangun jalur sepeda pada 2015 di seputar Istana dan Kebun Raya Bogor, kemudian dilanjutkan di ruas jalan lainnya sehingga total memiliki 25,8KM. Penyediaan jalur sepeda ini tidak sekedar sebagai sarana olahraga, juga sebagai bagian dari konsep green transportation yang terus dikembangkan.

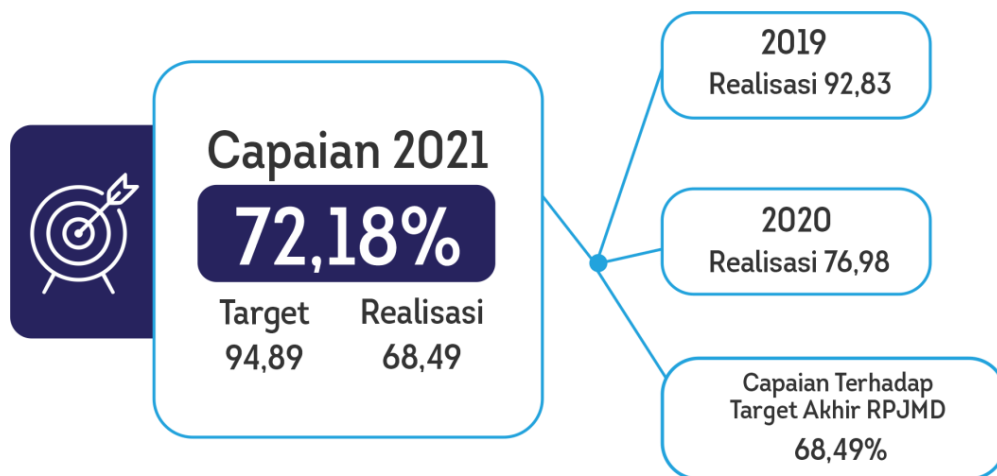
Sasaran 3

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Sehat di Kawasan Perumahan dan Permukiman



Sasaran ini diukur oleh Indikator Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Air Minum yang Aman, Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Sistem Air Limbah yang layak, Persentase Luasan Kawasan Kumuh Kewenangan Kota, dan Persentase Reduksi Sampah. Perangkat daerah yang berkolaborasi mengampu indikator

tersebut yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Perumahan dan Permukiman.



Rumah Tangga yang dilayani Air Minum yang Aman

Air minum adalah Air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Standar kualitas air minum ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Ketersediaan air, terutama air minum menjadi salah satu penentu kualitas hidup suatu masyarakat. Berdasarkan data capaian program peningkatan sanitasi dasar Kota Bogor Tahun 2021, bahwa perentase rumah tangga yang dilayani air minum yang aman di Kota Bogor pada

tahun 2021 mencapai 68,49%. capaian tersebut menurun dari tahun sebelumnya sebesar 8,49%, hal ini disebabkan adanya perubahan penentuan standar yang semula 1 rumah terdiri dari 6 jiwa menjadi 1 rumah hanya 4 jiwa sesuai standar dari Kementerian PUPR dan hasil audit BPKP terhadap PERUMDA Tirta Pakuan.

Perhitungan Capaian tersebut diperoleh melalui capaian pelayanan air minum Jaringan perpipaan sesuai data pelanggan PERUMDA Tirta Pakuan. Kualitas dan kuantitas air minum yang dikelola oleh PERUMDA Tirta Pakuan Kota Bogor sudah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, sehingga secara kualitas sudah memenuhi Baku Mutu Kualitas Air. Selain itu, pada tahun 2021 juga dilaksanakan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah dengan sasaran untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum terlayani jaringan perpipaan dari Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Pakuan Kota Bogor di Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara sebanyak 250 Sambungan Rumah.



Rumah Tangga yang Dilayani Air minum yang Aman per Kecamatan Tahun 2021

Kecamatan	Jaringan Perpipaan (PDAM)		Bukan Jaringan Perpipaan (NON PDAM)	
	Jiwa	RT/KK	Jiwa	RT/KK
Bogor Selatan	13.360	32.590	34.336	8.584
Bogor Timur	72.484	18.121	11.212	2.803
Bogor Tengah	82.804	20.701	4.904	1.226
Tanah Sereal	136.552	34.138	34.660	8.665
Bogor Utara	116.904	29.226	20.008	5.002
Bogor Barat	124.068	31.017	43.428	10.857

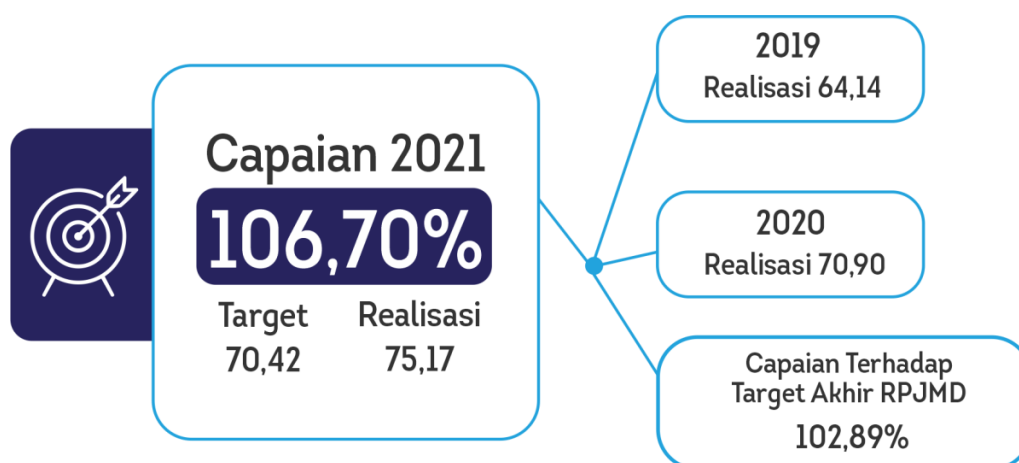
Sumber : Dinas PUPR Kota Bogor (2021)

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target pelayanan air minum yang aman baik yang melalui jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan yaitu:

- Melaksanakan sosialisasi perubahan perilaku masyarakat dan promosi layanan;
- Dukungan dari berbagai stakeholder dan masyarakat;
- Dukungan pendanaan dari APBD Kota, APBD Provinsi, APBN, DAK, dan dana lainnya yang sah;
- Dukungan aspek legalitas yang mendukung tercapainya akses air minum yang aman; dan
- Jaminan ketersediaan air baku.



PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor terus meningkatkan pelayanan air minum yang aman bagi masyarakat, terbukti pada tahun 2021 PDAM Tirta Pakuan berhasil meraih penghargaan dari Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) Award 2021 untuk kategori BUMD Air Minum Sehat dengan Inovasi Teknologi Informasi untuk operasional di perusahaan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan air minum yang lebih baik untuk pelanggan. Teknologi informasi yang diterapkan yaitu Pengembangan Enterprise Resource Planning (ERP) terintegrasi, Pengembangan Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA), Pengembangan Environmental Protection Agency Network (EPANET), Pengembangan Geographic Information System (GIS), dan Pembangunan Ruang Command Center.



Rumah Tangga yang dilayani Air Limbah yang Layak

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama (Permen PUPR Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik). Jenis pelayanan dasar pengolahan air limbah domestik dapat dilaksanakan melalui penyelenggaraan dua sistem pengelolaan, yang terdiri dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).

Penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan air limbah domestik yang ramah lingkungan, sehingga tercapai peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan yang lebih baik dan sehat. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa pengelolaan air limbah domestik termasuk ke dalam urusan wajib

Pemerintah Daerah dan merupakan pelayanan dasar bagi masyarakat. Tantangan air limbah domestik di perkotaan akan semangat kompleks selaras dengan percepatan penambahan jumlah penduduk dan luasan permukiman.

Secara sederhana, semakin padat dan besar pertumbuhan suatu kota, diperlukan penerapan teknologi yang lebih tinggi tingkatannya, yang akan berpengaruh terhadap kualitas efluen lebih baik. Dengan kata lain, teknologi yang rendah menyisakan tingkat pencemaran yang tinggi dan memerlukan lahan yang lebih luas, sementara itu teknologiyang lebih tinggi menyisakan tingkat pencemaran yang lebih rendah serta kebutuhan lahan yang lebih kecil. Oleh karena itu pemilihan teknologi perlu mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dari kelompok sasaran serta kemampuannya untuk berpartisipasi. Karena pelayanan sanitasi harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat kota.

Persentase rumah tangga yang dilayani system air limbah yang layak dapat terealisasi 75,17% dari target 70,42%. Capaian tersebut diperoleh dari total 242.064 sambungan rumah, yang telah menjadi akses layak sebesar 169.235 sambungan rumah dan akses aman sebesar 12.587 sambungan rumah. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bahwa Pelayanan Dasar Air Limbah Domestik terdiri dari jenis pelayanan dasar, penerima pelayanan dasar, dan mutu pelayanan dasar. Jenis pelayanan dasar pengolahan air limbah domestik dapat dilaksanakan melalui penyelenggaraan dua sistem pengelolaan, yaitu Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T). Pada tahun 2021, dilaksanakan penambahan penyediaan sistem air limbah yang layak bagi 471 sambungan rumah dengan upaya sebagai berikut:

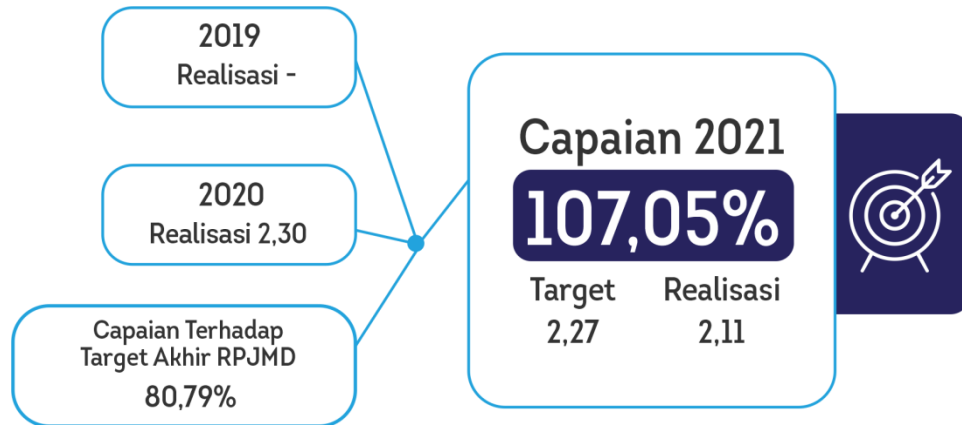
- a. Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota;
- b. Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman;
- c. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat;
- d. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman;
- e. Penyediaan Sarana Pengangkut Lumpur Tinja;

- f. Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT; dan
- g. Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT.



Di samping upaya-upaya tersebut, juga telah diterapkan berbagai strategi dalam pengembangan air limbah domestik melalui penyiapan perencanaan maupun penyusunan regulasi yang terkait dengan pengelolaan air limbah domestik diantaranya

penyusunan DED IPLT dan IPAL Tegal Gundil, serta JAKSTRADA Pengelolaan Air Limbah Domestik.



Luasan kawasan Kumuh Kewenangan Kota

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 653.45-282 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh, menyebutkan bahwa luasan kawasan kumuh di Kota Bogor mencapai 511,84 ha dan luasan kawasan kumuh kewenangan kota mencapai 310,93 ha. Sampai dengan tahun 2021, luas kawasan kumuh yang berhasil diintervensi mencapai 60,81 ha dan tersisa 250,12 ha yang belum tertangani. Sehingga persentase luasan kawasan kumuh yang menjadi kewenangan kota dapat terealisasi sebesar 2,11% dari target 2,27%. Capaian tersebut diperoleh dari kolaborasi antara program dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota. Salah satu program kolaborasi adalah Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia serta mendukung gerakan 100-0-100, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Program Kotaku telah membantu penanganan kumuh di Kota Bogor.

Pada Tahun 2020 Kota Bogor mendapatkan bantuan untuk penataan kawasan kumuh di 12 Kelurahan, yaitu pada Kelurahan Balumbang Jaya, Kelurahan Bubulak, Kelurahan Gunung Batu, Kelurahan Lohi, Kelurahan Margajaya, Kelurahan Semplak, Kelurahan Kebon Kalapa, Kelurahan Sempur, Kelurahan Katulampa, Kelurahan Bantarjati, Kelurahan Ciparigi dan Kelurahan Kedung Jaya. Namun pada tahun 2021,



terdapat penurunan jumlah kelurahan yang mendapatkan bantuan penataan kawasan kumuh dari APBN, yaitu hanya untuk 9 Kelurahan yang terdiri dari Kelurahan Kedungwaringin, Kelurahan Tanah Baru, Kelurahan Babakan, Kelurahan Sindangsari, Kelurahan Muarasari, Kelurahan Baranangsiang, Kelurahan Harjasari, Kelurahan Cipaku dan Kelurahan Rangga Mekar. Sedangkan pada anggaran APBD Kota, kegiatan yang dilakukan adalah perbaikan jalan dan drainase di 10 lokasi kumuh pada Kelurahan Babakan Pasar, Kelurahan Gudang, Kelurahan Pabaton, Kelurahan Paledang, Kelurahan Tegallega, Kelurahan Cilendek Barat, Kelurahan Curug Mekar, Cilendek Timur, Pasir Mulya, Pasir Jaya dan perbaikan rumah tidak layak huni di lokasi SK Kumuh.

Tabel 2.4
Total Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Kota Per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Total Luas Kumuh (Ha)	Capaian Luas Kawasan Kumuh Hasil Intervensi (Ha)	
				2020	2021
1	Bogor Selatan	13	45,66	0,00	8,39
2	Bogor Timur	3	29,30	4,30	0,00
3	Bogor Tengah	6	30,92	2,59	3,20
4	Bogor Barat	13	7,68	21,72	4,79
5	Bogor Utara	5	49,93	5,83	5,50
6	Tanah Sareal	10	76,44	4,49	0,00
Total		50	310,93	38,93	21,88

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor (2021)

Upaya atau intervensi yang telah dilaksanakan tahun 2021 untuk mengurangi luasan kawasan kumuh yaitu dengan cara menata sarana prasarana lingkungan yang meliputi:

1. Pembangunan jogging track di bantaran sungai Ciliwung Kelurahan Sempur;



2. Pembangunan dan perbaikan jalan dan saluran drainase di lokasi Kampung Perca Kelurahan Sindangsari;



3. Perbaikan/Pembangunan Drainase Lingkungan Pada Lokasi Kumuh di Kelurahan Pasir Mulya;



4. Perbaikan/Pembangunan Drainase Lingkungan Pada Lokasi Kumuh di Kelurahan Cilendek Barat;



5. Perbaikan/Pembangunan Drainase Lingkungan Pada Lokasi Kumuh di Kelurahan Cilendek Barat;



6. Perbaikan/Pembangunan Drainase Lingkungan Pada Lokasi Kumuh di Kelurahan Pasir Jaya;



7. Perbaikan Jalan Pada Lokasi Kumuh di Kelurahan Gudang;



8. Perbaikan jalan Pada Lokasi Kumuh di Kelurahan Pasir Mulya;



9. Perbaikan jalan Pada Lokasi Kumuh di Kelurahan Curug Mekar;



10. Perbaikan jalan dan drainase Pada Lokasi Kumuh di Kelurahan Rangga Mekar

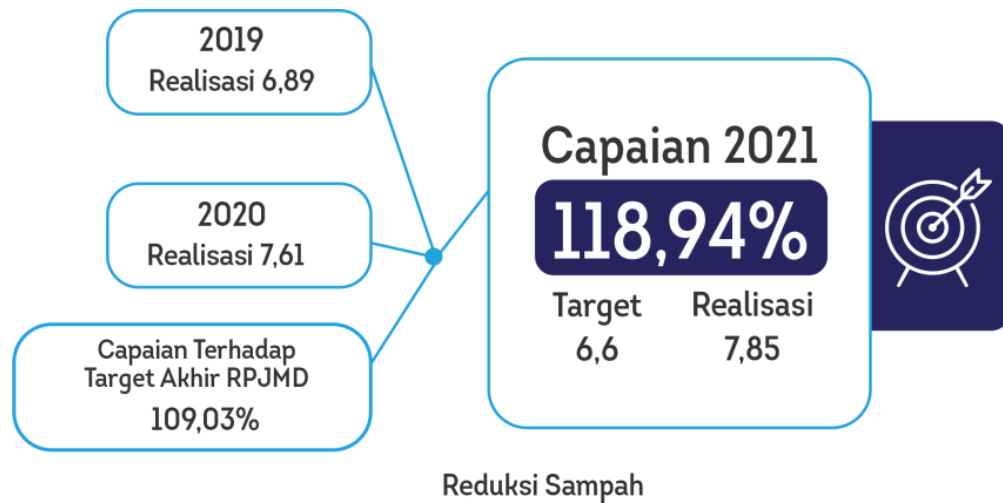


Keberhasilan menurunkan jumlah kawasan kumuh, tidak terlepas dari kolaborasi penanganan kawasan kumuh antara Pemerintah Kota Bogor dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan yang harus dihadapi dalam rangka menurunkan jumlah kawasan kumuh. Antara lain, belum semua stakeholder mengacu pada perhitungan kumuh tertentu (R0), penataan tata ruang yang masih berorientasi pada pemugaran, adanya keterbatasan lahan dalam menuntaskan 7 indikator kumuh, adanya keterbatasan anggaran dalam penanganan kumuh, kurangnya sinergitas antar perangkat daerah yang ikut terlibat dalam penanganan kawasan kumuh, serta masih kurangnya kesadaran masyarakat di kawasan kumuh untuk ikut terlibat dalam perbaikan di wilayahnya masing-masing.

Upaya yang perlu dilakukan untuk peningkatan capaian penurunan kawasan kumuh di tahun-tahun mendatang yaitu melalui:

- a. Peningkatan sinergitas antar perangkat daerah yang terlibat dalam penanganan kawasan kumuh;
- b. Perhitungan pengurangan kumuh mengacu pada metode yang sama;
- c. Penentuan konsep penataan ruang dan penanganan kumuh kedepan melalui peremajaan dan relokasi;
- d. Membangun budaya hidup sehat dan peduli lingkungan di masyarakat;
- e. Pelaksanaan pembangunan yang berorientasi untuk mendukung ekonomi warga sasaran;
- f. Pelaksanaan Vocational Training di lokasi kawasan kumuh yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan

g. Membangun kelompok pemelihara dan pengelola yang aktif.



Pada tahun 2021 reduksi sampah dapat terealisasi sebesar 7,85% dari target sebesar 6,6%. Capaian tersebut diperoleh dari jumlah sampah non organik yang dikelola oleh TPS 3R sebesar 1,042 ton/hari dibandingkan dengan jumlah keseluruhan timbulan sampah sebesar 643,529 ton/hari. Reduksi sampah merupakan upaya mengelola sampah yang tidak terangkut ke TPA dengan pengelolaan sampah berbasis Reduce Reuse Recycle (3R). Capaian reduksi sampah dihasilkan dari 28 lokasi pengelolaan sampah di TPS 3R yang berasal dari pengelolaan sampah organik dan sampah an organik serta dari Bank Sampah yang ada di Kota Bogor sebanyak 381 unit yang berada di setiap Kelurahan di Kota Bogor. Jumlah KK yang dilayani sebanyak 13.791 KK dan jumlah warga yang sudah terbiasa memilah sampah di rumah tangga sebanyak 13.791 KK. Jika dibandingkan dengan target akhir perencanaan RPJMD, persentase reduksi sampah telah terealisasi sebesar 109,03%. Program prioritas pendukung pencapaian indikator ini yaitu Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional dengan berbagai upaya yang telah dilaksanakan, diantaranya yaitu:

1. Melaksanakan pembangunan Aplikasi Data WR Pelayanan Sampah dan aplikasi Penilaian Kinerja KSM TPS 3R yang bertujuan untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan persampahan;
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) TPS 3R yang dilakukan secara sidak maupun rutin terjadwal dalam pengelolaan sampah di TPS 3R;

3. Melaksanakan sosialisasi secara bottom up (berdasarkan permintaan warga) dan tidak massal sehingga lebih tepat sasaran dan efektif;
4. Menetapkan target pemilahan sampah baik di rumah tangga yang dilayani oleh TPS 3R dan Bank Sampah maupun mengoptimalkan pemilahan sampah di TPS 3R dan Bank Sampah dengan target yang berbeda sesuai dengan kemampuan SDM, jumlah layanan dan komitmen KSM TPS 3R di masing-masing TPS 3R;
5. melakukan penimbangan setiap sampah yang masuk ke TPS 3R;
6. Pembangunan fasilitas pengurangan sampah 3R berbasis masyarakat berupa bangunan sarana pengomposan di 28 lokasi, alat pengolahan air kotor sebanyak 5 unit, sarana prasarana mesin pengolah sampah, serta peningkatan sarana penunjang TPS 3R di dua lokasi;
7. Pengelolaan sampah 3R berupa pengolahan sampah di sumber di 28 lokasi, pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat di 15 lokasi, pemeliharaan sarana prasarana 3R di 15 lokasi, penyelenggaraan uji kualitas kompos, penyediaan tenaga pemilah sampah.
8. Pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan sampah diantaranya melalui gerebek dapur, pemilahan sampah, pembuatan lubang resapan biopori di wilayah maupun di sekolah, serta pelatihan manajemen bank sampah dan TPS3R dalam pemanfaatan sampah organik dengan teknologi biokonversi dan budidaya maggot;
9. Penerapan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di pasar moderen dan pusat perbelanjaan melalui Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik yang berisi larangan penyediaan kantong plastik di toko ritel dan mal;
10. Launching Program Pasar bebas kantong plastik di dua pasar di Kota Bogor yaitu Pasar Kebon Kembang dan Pasar Baru Bogor; dan
11. Pelaksanaan sosialisasi pengelolaan sampah melalui Bank Sampah serta sosialisasi pengelolaan lingkungan hidup di 6 kecamatan.





Untuk melakukan perbaikan kondisi di tahun-tahun mendatang, upaya yang akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia baik personil di Seksi Pengembangan Teknologi Penanggulangan Sampah Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup maupun personil di Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) TPS 3R;

- b. Menambah jumlah lokasi TPS 3R, melengkapi sarana prasarana di TPS 3R, serta menambah jumlah layanan rumah TPS 3R;
- c. Menambah jumlah bank sampah di setiap kelurahan; dan
- d. Menerapkan punishment dan reward kepada KSM TPS 3R dalam mengelola sampah di TPS 3R serta membuat pengangkutan sampah terjadwal sesuai jenisnya.

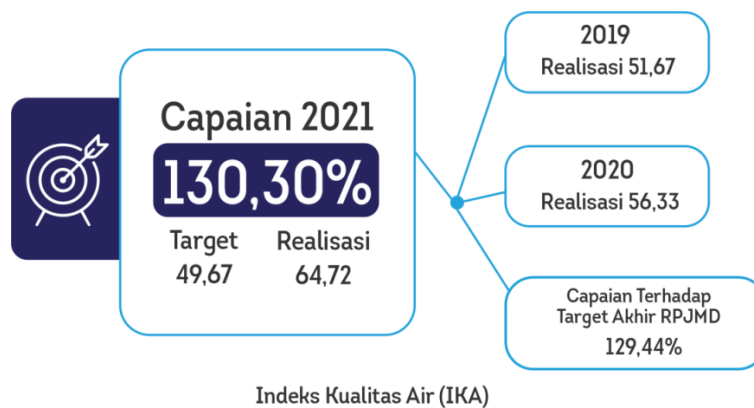


Sasaran 4.

Terkendalinya sumber-sumber pencemar dan / atau kerusakan lingkungan



Sasaran ini diukur oleh indikator Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara. Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu ketercapaian indikator tersebut yaitu Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.



Indeks Kualitas Air (IKA) dihitung berdasarkan hasil pengujian kualitas air sungai pada 30 lokasi di DAS Ciliwung, DAS Cisadane, dan Sungai Angke. Pengujian tersebut dilakukan 2 kali dalam setahun yaitu pada musim penghujan dan musim kemarau. Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) mengacu kepada Surat Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor S.318/PPKL/SRT/REN.0/12/2020 tentang Metode Perhitungan IKLH 2020 -2024. Berdasarkan hasil pengujian tersebut kemudian diperoleh nilai indeks kualitas air tahun 2021 sebesar 64,72. Capaian tersebut meningkat 8,39 poin dari tahun sebelumnya. Bila dibandingkan dengan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD), indikator Indeks Kualitas Air (IKA) telah mencapai 129,44%.



Tabel 2.5

Data Status Mutu Air dengan Metode Indeks Pencemar Tahun 2021

No	Sungai	Jumlah Skor (Storet)	Status Mutu (Storet)	Indeks Pencemaran (IP)			Status Mutu (IP)		
				Hulu	Tengah	Hilir	Hulu	Tengah	Hilir
Musim Penghujan Tahun 2021									
1	Ciliwung	0	B	0,76	0,78	0,75	B	B	B
2	Cilbalok	0	B	0,75	0,75	0,76	B	B	B
3	Ciparigi	-10	TR	5,52	3,50	4,91	TS	TS	TS
4	Ciluar	0	B	0,75	0,74	0,74	B	B	B
5	Cisadane	0	B	0,77	0,76	0,76	B	B	B
6	Sindang Barang	0	B	0,77	0,76	0,76	B	B	B
7	Cipakancilan	0	B	0,75	0,75	0,75	B	B	B
8	Cianten	0	B	0,75	0,75	0,75	B	B	B
9	Cidepit	-20	TS	1,99	1,82	1,54	TR	TR	TR
10	Angke	0	B	0,75	0,75	0,75	B	B	B
Musim Kemarau Tahun 2021									
1	Ciliwung	-28	TS	5,61	5,62	6,88	TS	TS	TS
2	Cilbalok	-52	TB	5,51	6,29	6,38	TS	TS	TS
3	Ciparigi	-36	TB	5,84	5,96	6,38	TS	TS	TS
4	Ciluar	-40	TB	5,30	4,91	5,91	TS	TR	TS
5	Cisadane	-46	TB	6,72	6,02	5,68	TS	TS	TS
6	Sindang Barang	-38	TB	5,95	6,22	6,29	TS	TS	TS
7	Cipakancilan	-50	TB	6,15	5,66	5,63	TS	TS	TS
8	Cianten	-46	TB	5,75	5,57	4,80	TS	TS	TR
9	Cidepit	-58	TB	5,49	8,10	5,36	TS	TS	TS
10	Angke	-50	TB	5,61	6,24	6,06	TS	TS	TS

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor (2021)

Tabel 2.6

Indeks Kualitas Air

Status	Jumlah	Persentase Pemenuhan Mutu Air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks per Mutu Air
Memenuhi	45	75%	70	52,52
Cemar Ringan	15	25%	50	12,2
Cemar Sedang	0	0%	30	0
Cemar Berat	0	0%	10	0
Total	60			
Indeks Kualitas Air Kota Bogor 2021				64,72
Indeks Kualitas Air Kota Bogor 2020				56,33
Indeks Kualitas Air Kota Bogor 2019				51,67
Indeks Kualitas Air Kota Bogor 2018				49,67
Indeks Kualitas Air Kota Bogor 2017				34,44
Indeks Kualitas Air Kota Bogor 2016				27,33

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor (2021)

Capain Indeks Kualitas Air yang melampaui target didukung oleh Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup melalui beberapa upaya pengendalian pencemaran sebagai berikut:

1. Terbentuknya Satuan Tugas Naturalisasi Ciliwung berdasarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor 660.45-247 tahun 2018 tentang Pembentukan Satuan Tugas Naturalisasi Ciliwung Kota Bogor yang melibatkan masyarakat serta sector lainnya diluar Pemerintah Kota Bogor;
2. Melakukan Edukasi kepada masyarakat (pelajar, ibu rumah tangga, pegawai kantoran, kelompok pemuda/karang taruna) untuk tidak membuang sampah disungai dan melakukan pengelolaan sampah sejak dari sumbernya;
3. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi melakukan pencemaran air sungai dan melakukan monitoring terhadap pengelolaan IPAL kegiatan usaha;

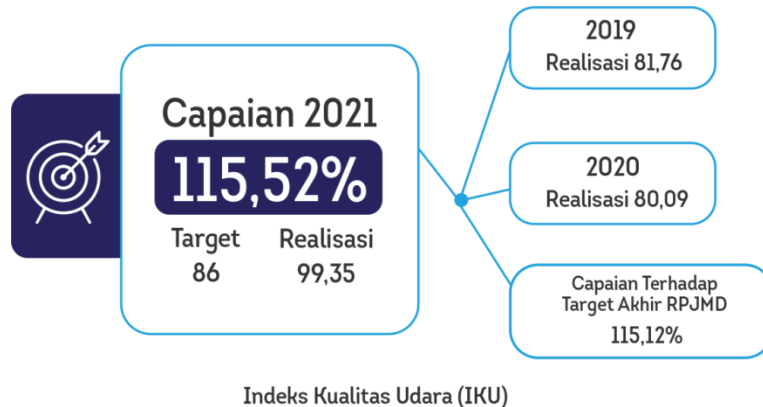
4. Memberlakukan sanksi/tindakan tegas terhadap perilaku pencemaran lingkungan;
dan
5. Bekerja sama dengan berbagai komunitas masyarakat untuk membersihkan sampah di sungai.



Untuk melakukan perbaikan kondisi di tahun-tahun mendatang, upaya yang akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi sumber pencemar di sepanjang ruas sungai dan situ di Kota Bogor untuk dijadikan dasar dalam pengelolaan dan pengendalian pencemar yang masuk ke dalam sungai maupun situ;
2. Menetapkan daya tampung beban pencemaran air sungai di Kota Bogor sehingga dapat menentukan kuota izin pembuangan limbah cair ke aliran air;
3. Memberikan kesadaran dan edukasi terhadap masyarakat di berbagai kalangan (pelajar, ibu rumah tangga, pegawai kantor, kelompok pemuda/karang taruna) tentang arti lingkungan hidup sehingga mereka lebih lebih mencintai lingkungan hidupnya serta memberlakukan sanksi atau tindakan terhadap pelaku pencemaran lingkungan;
4. Membuat iklan layanan masyarakat tentang pentingnya mencegah pencemaran air sungai dan situ dalam bentuk reklame atau iklan baliho, pamflet ataupun brosur di media elektronik maupun media sosial;
5. Membentuk forum peduli lingkungan Kota Bogor agar dapat meminimalisir pencemar serta menjaga kondisi kualitas situ dan sungai;

6. Memberi sanksi hukum kepada pelaku pencemaran di sekitar situ dan sumur apabila melakukan pembuangan limbah langsung tanpa pengolahan; dan
7. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik masyarakat melalui IPAL terpusat baik skala kawasan maupun skala kota.



Realisasi Indeks Kualitas Udara pada tahun 2021 yaitu 99,35 atau tercapai 115,52%. Indeks kualitas udara dihitung berdasarkan hasil pengamatan kualitas udara ambien yang dilakukan dengan metode *passive sampler* dengan parameter NO₂ dan SO₂. Pemantauan dilakukan 2 kali dalam setahun yaitu metode *passive sampler* musim penghujan dan metode *passive sampler* musim kemarau pada 9 lokasi pemantauan manual aktif (*active sampler*) yaitu Kelurahan Cilendek Timur (sub urban), Terminal Bubulak (*roadside*), Pertigaan Tugu Narkoba (*roadside*), Terminal Damri (pusat kota), Kelurahan Cimahpar (sub urban), Perumahan Baranangsiang (sub urban), Pertigaan Empang (*roadside*), PT. Nutrifood (industri), dan Stasiun Bogor (pusat kota). Selain sembilan lokasi tersebut, pemantauan juga dilakukan secara manual pasif (*pasive sampler*) pada 4 (empat) lokasi berikut: Cilendek Timur (pemukiman), Pos Polisi pada Pertigaan Tugu Narkoba (transportasi), Bank Jabar Banten (perkantoran), dan PT. Good Year (industri).

Hasil Perhitungan Passive Sampler Tahun 2021

$$IKU = 100 - \left[\frac{50}{0,9 (I_{eu} - 0,1)} \right]$$

IKU = 99,35

Indeks Kualitas Udara (IKU) merupakan salah satu instrumen untuk mengukur tingkat pencemaran udara di suatu wilayah secara nasional, provinsi, maupun



kabupaten/kota. Dalam kajian ini pengukuran parameter udara menggunakan data hasil pengukuran *passive sampler* untuk parameter SO₂ dan NO₂. Hasil perhitungan indeks kualitas udara Kota Bogor Tahun 2021 sebesar 99,35 masuk kategori sangat baik. Capaian Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2021 meningkat dari tahun sebelumnya, dan bila dibandingkan dengan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD), indikator Indeks Kualitas Air (IKA) telah mencapai 115,12%. Capaian Indeks Kualitas Udara yang melampaui target didukung oleh Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup melalui beberapa upaya pengendalian pencemaran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembangunan pedestrian untuk jalur sepeda dan pejalan kaki;
2. Pelaksanaan pengujian emisi kendaraan;
3. Pelaksanaan Program Kampung Iklim;
4. Pelaksanaan Pembangunan taman tematik.
5. Pelaksanaan Pelebaran jalan dan relokasi pedagang pasar bogor; dan
6. Pelaksanaan Aksi Penanaman pohon.

Untuk peningkatan kondisi di tahun-tahun mendatang, upaya yang akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

1. Membangun dan menambah Ruang Terbuka Hijau untuk menambah serapan sumber pencemar udara;
2. Membangun persepsi dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang dampak pencemaran udara;
3. Membuat program Pengendalian Pencemaran Udara secara terkoordinasi di Kota Bogor untuk mendukung Program Langit Biru;
4. Membentuk forum peduli lingkungan Kota Bogor agar dapat meminimalisir pencemar serta menjaga kondisi kualitas udara; dan
5. Memberikan sanksi hukum kepada pelaku pencemaran udara.

Dalam rangka pengendalian sumber-sumber pencemar dan/ atau kerusakan lingkungan, Tahun 2021 Pemerintah Kota Bogor mendapatkan Tiga Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup. Pertama, penghargaan sebagai daerah pembina Program Kampung Iklim (Proklim) Utama Tingkat Nasional tahun 2021 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kedua, penghargaan sertifikat Program Kampung Iklim Kategori Madya yang diberikan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, Laksmi Dhewanthi yang berlokasi di RW 10 Kelurahan

Katulampa, Kecamatan Bogor Timur. Ketiga, penghargaan Raksa Prasada penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) kategori terbaik kabupaten/kota tingkat provinsi Jawa Barat tahun 2021.

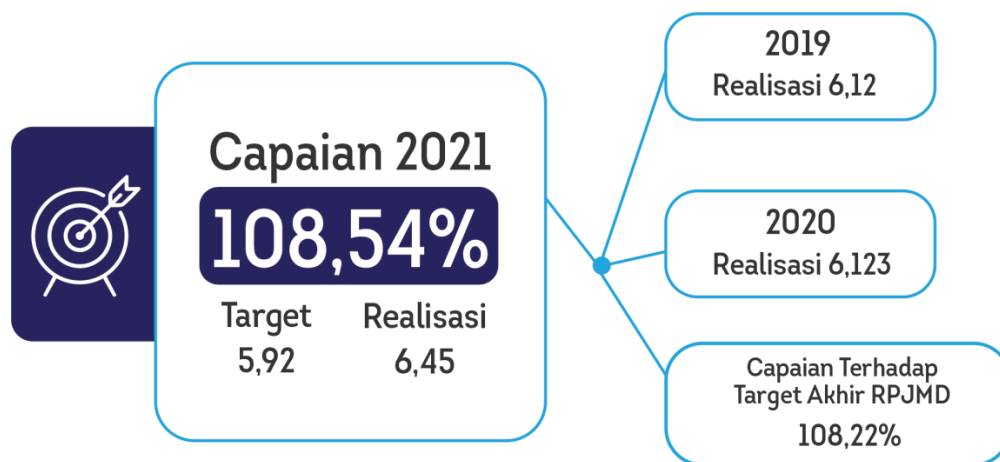


Sasaran 5

Meningkatnya Kualitas Ruang Terbuka Hijau Perkotaan



Sasaran ini diukur oleh indikator Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik. Perangkat daerah yang berkolaborasi mengampu indikator tersebut yaitu Dinas perumahan dan Permukiman serta Dinas Lingkungan Hidup.



Luas Ruang Terbuka Hijau Publik

Kualitas ruang terbuka hijau tahun 2021 dapat terealisasi sebesar 6,45% dari target sebesar 5,92%. Capaian tersebut diperoleh berdasarkan penambahan luas RTH publik, sehingga sampai dengan tahun 2021 telah mencapai 96,48 Ha. Dari total 711

Ha luas ruang terbuka hijau publik, 45,84 Ha merupakan taman skala kota, taman skala lingkungan, dan taman jalur hijau jalan, serta 50,64 Ha merupakan TPU hijau. Hasil capaian penambahan ruang terbuka hijau pada tahun 2021 lebih berfokus kepada pembangunan taman skala kota yaitu taman Alun-alun Kota Bogor seluas 1,7 Ha dan taman jalur hijau dan taman lingkungan seluas 0,6 Ha, sehingga total penambahan luasan ruang terbuka hijau tahun 2021 adalah 2,3 ha dari target sebesar 1,7 ha

Upaya pencapaian target penambahan ruang terbuka hijau publik tahun 2021 dilaksanakan melalui:

1. Peningkatan kualitas RTH di 16 Lokasi yaitu taman situ anggaleana, taman cipaku P2KH, taman jalur hijau Jl.Pengadilan, jalur hijau eks PKL Kecamatan Tanah Sareal, Jalur Hijau JL.Siliwangi, Jalur Hijau Jl. Kresna Raya, Jalur Hijau Jl.Sudirman, Taman median jalur hijau Kecamatan Bogor Timur, Taman Median Jalur Hijau Kecamatan Bogor Utara, revitalisasi taman dinas, jalur hijau eks PKL Kecamatan Bogor Tengah, kebun bibit ciremai ujung, kebun bibit heulang, lapangan sempur, lapangan kresna, dan taman Malabar.



2. Pembangunan Alun-alun Kota Bogor seluas 1,7 ha



3. Pembangunan Dekorasi Taman pada 3 lokasi



4. Pembangunan ruang terbuka hijau seluas 0,6 ha di taman lingkungan dan taman jalur hijau



MISI 2

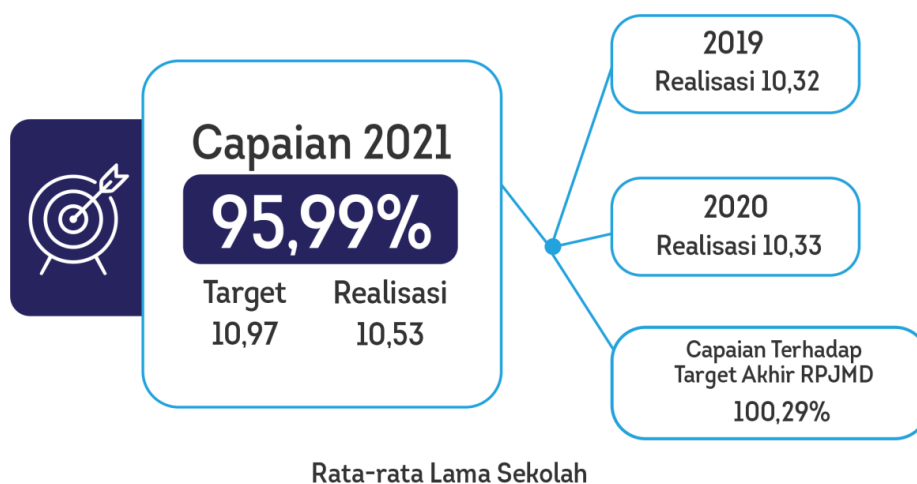
MEWUJUDKAN KOTA BOGOR YANG CERDAS

Sasaran 6

Meningkatnya Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal



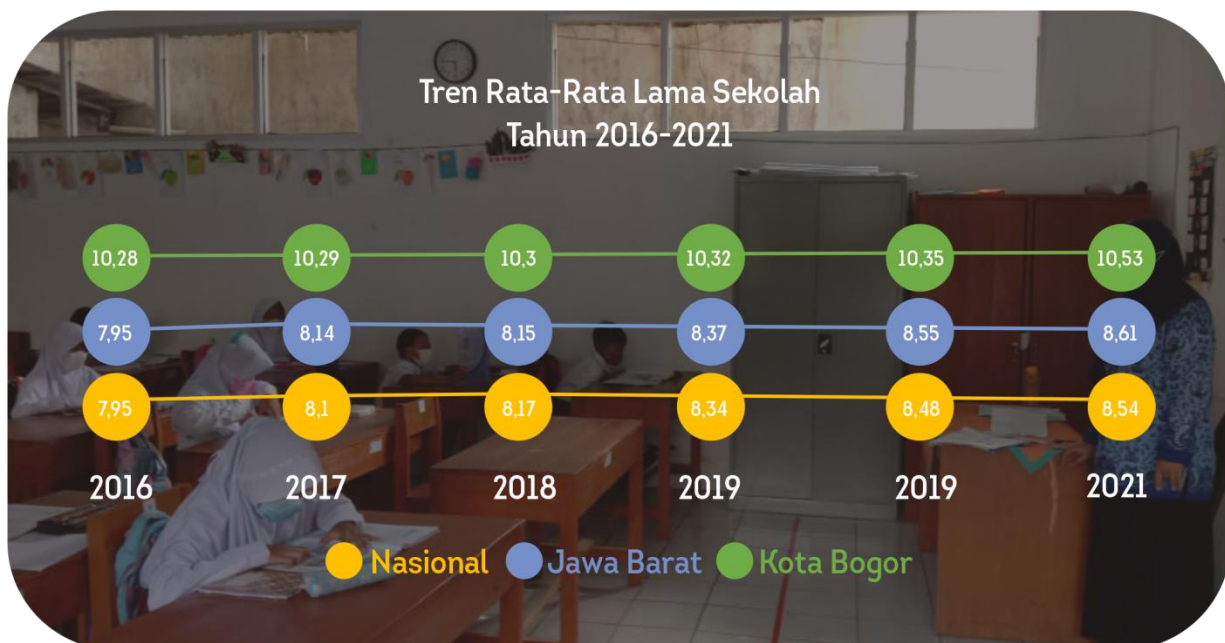
Sasaran ini diukur oleh Indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Perangkat Daerah yang mengampu indikator tersebut yaitu Dinas Pendidikan dengan didukung oleh Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum, Program Pendidik dan Tenaga Pendidik, Program Pengendalian Perizinan Pendidikan, serta Program Pengembangan Bahasa dan Sastra.



Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang diselesaikan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan

formal yang pernah dijalani. Indikator RLS ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Standar UNDP (Badan Nasional Pembangunan PBB) adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun.

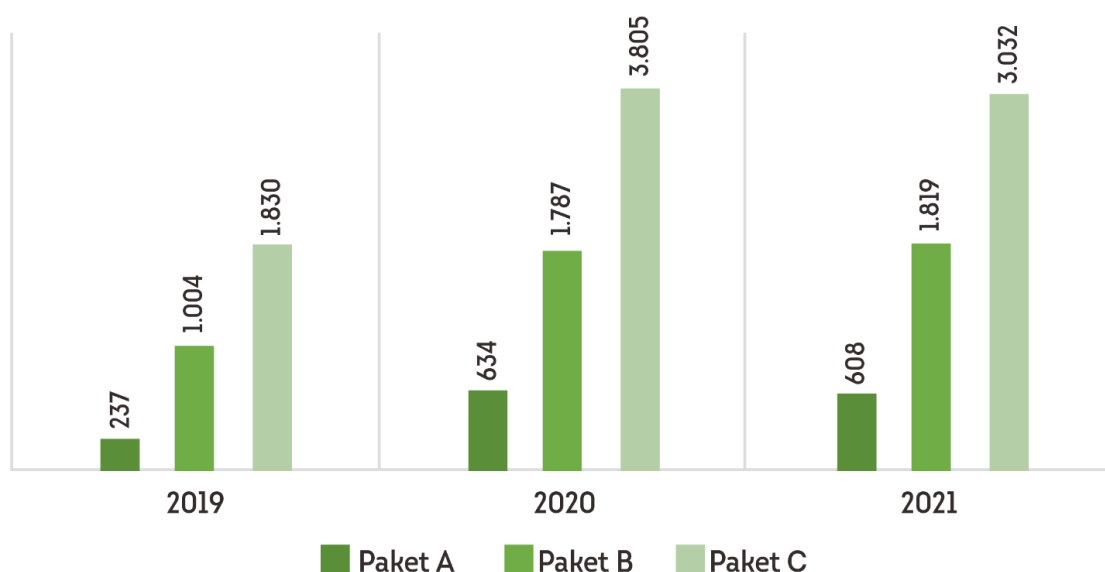
Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Bogor dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Angka rata-rata lama sekolah tahun 2021 dapat terealisasi sampai 10,53. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan warga berusia 15 tahun ke atas sudah mencapai kelas 2 SMA lebih. Kondisi ini mengalami peningkatan sebesar 0,2 poin dari tahun sebelumnya dan bila dilihat dari perspektif target akhir perencanaan jangka menengah, indikator rata-rata lama sekolah telah mencapai 100,29 %.



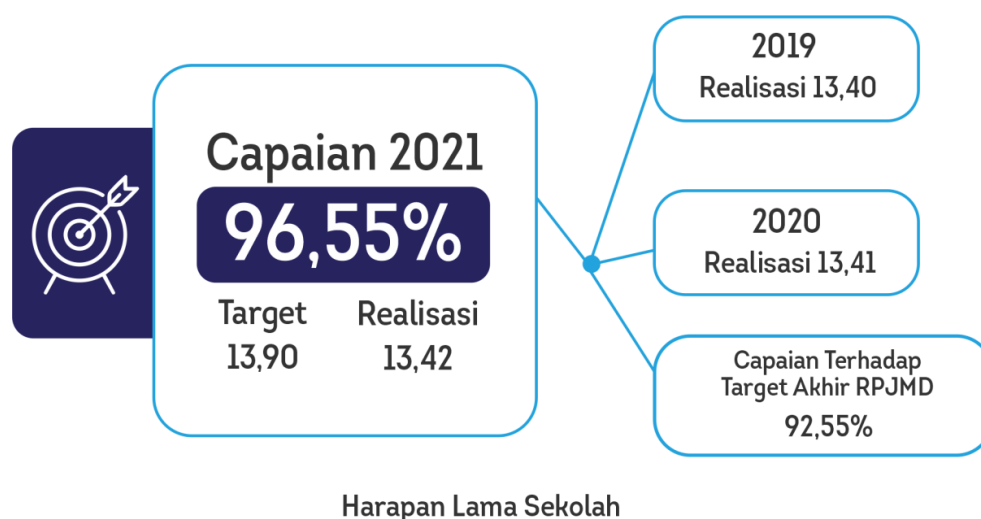
Sumber : BPS (2021)

Meskipun belum mencapai target, pencapaian peningkatan indikator ini diakselerasi melalui berbagai upaya kolaboratif dan inovatif, diantaranya melalui peningkatan pendidikan kesetaraan yang merupakan bagian dari pendidikan non formal yang memberikan layanan pendidikan program paket A setara SD, program paket B setara SMP, dan program paket C setara SMA. Pendidikan kesetaraan mempunyai sasaran peserta didik yang spesifik, yaitu anak usia sekolah maupun dewasa yang belum menyelesaikan pendidikan formal.

Peningkatan Peserta Program Pendidikan Kesetaraan di Kota Bogor

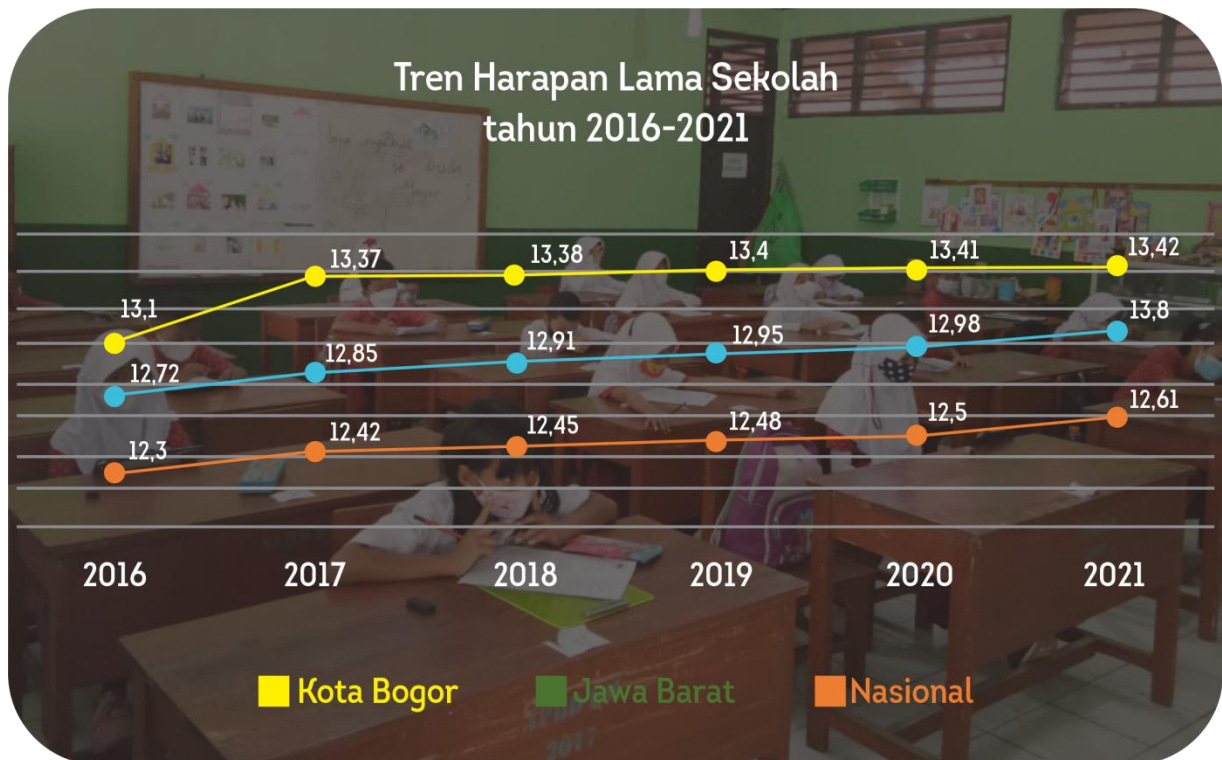


Sumber : Dinas Pendidikan (2021)



Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Angka HLS menunjukkan peluang anak 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. Angka Harapan Lama Sekolah Kota Bogor pada tahun 2021 dapat terealisasi sebesar 13,42. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2021 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,42 tahun atau setara dengan Diploma I. capaian tersebut meningkat 0,01 poin dari tahun sebelumnya, dan jika dilihat dari

perspektif target akhir perencanaan jangka menengah, indikator angka harapan lama sekolah telah mencapai 92,55%.



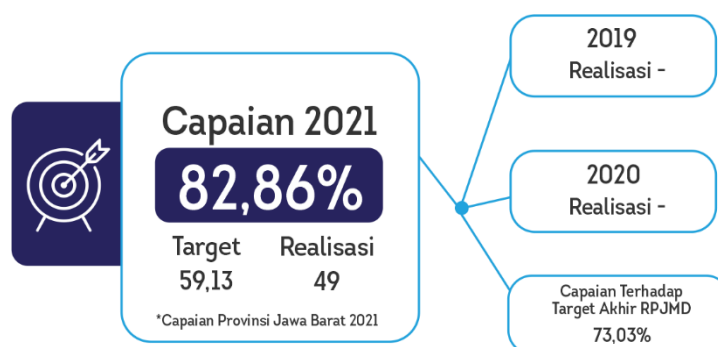
Sumber : BPS (2021)

Sasaran 7

Meningkatnya Kualitas Generasi Muda (*Smart People*)



Untuk mewujudkan sasaran Meningkatkan Kualitas Generasi Muda (*Smart People*), diukur melalui Indikator Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Perangkat daerah yang berkolaborasi mengampu indikator tersebut yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.



Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Pembangunan pemuda merupakan agenda strategis dalam rangka mempersiapkan generasi masa depan yang tangguh dan mampu berperan dalam pembangunan secara keseluruhan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *The Sustainable Development Goals* (SDGs) telah menempatkan pemuda beserta peranan mereka dalam proses menuju pembangunan yang berkelanjutan.

Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan menandai era baru pembangunan kepemudaan yang bersifat *cross-cutting*. Salah satu amanat Peraturan

Presiden tersebut yaitu penyusunan Indeks Pelayanan Kepemudaan atau yang lebih dikenal dengan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang merupakan sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. IPP secara substantif merefleksikan lima isu besar yang dihadapi para pemuda yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi politik dan kepemimpinan, serta masalah gender dan diskriminasi. Indikator ini diukur oleh BAPPENAS dan Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan menggunakan metode survey.

Penghitungan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Kota Bogor dengan target sebesar 59,13 tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2021 disebabkan adanya refocusing anggaran untuk penanganan Pandemi Covid 19. Namun menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2021, capaian Indeks Pembangunan Pemuda skala nasional mencapai 54 dan Jawa Barat sebesar 49. Capaian IPP nasional dari tahun 2015-2021 mengalami peningkatan yang sangat minim dan hampir stagnan, yaitu dari 48,67 pada tahun 2015 meningkat menjadi 54,00 pada tahun 2021. Sedangkan capaian IPP Provinsi Jawa Barat menurun dari tahun sebelumnya, yaitu dari 50 pada tahun 2020 menjadi 49. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi covid-19 yang menghambat perkembangan indikator pembentuk IPP dan menjadi faktor utama menurunnya IPP.

Meskipun IPP belum diketahui realisasinya, terdapat berbagai upaya yang dilakukan untuk peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan, yaitu:

a. Penyadaran pemuda melalui:

- 1) Peningkatan wawasan pemuda dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis mencakup pendidikan kebangsaan/bela negara dan akhlak mulia, penumbuhan kesadaran/kepedulian terhadap lingkungan dan hukum, serta pemahaman kemandirian ekonomi;
- 2) Peningkatan peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan.

b. Pemberdayaan pemuda melalui:

- 1) Peningkatan potensi, kapasitas, kreativitas, dan kemampuan berorganisasi pemuda;
- 2) Penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan;



- 3) Perluasan kesempatan memperoleh serta meningkatkan kompetensi keterampilan.
 - 4) Peningkatan daya saing pemuda Indonesia di tingkat regional dan internasional.
- c. Pengembangan kepemimpinan pemuda melalui:
- 1) Penetapan kebijakan strategis pengembangan kepemimpinan pemuda;
 - 2) Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan, pengkaderan, dan pendampingan pembentukan kader pemimpin.
 - 3) Pengembangan forum kepemimpinan pemuda.
- d. Pengembangan kewirausahaan pemuda melalui:
- 1) Peningkatan dan perluasan menciptakan peluang pekerjaan;
 - 2) Pelaksanaan pelatihan, pemagangan, pendampingan, kemitraan dan promosi pembentukan pemuda kader wirausaha.
- e. Pengembangan kepeloporan pemuda melalui:
- 1) Pengembangan inovasi, keberanian dalam melakukan terobosan, dan budaya kreatif pemuda;
 - 2) Pelaksanaan pelatihan dan pendampingan penumbuhan pemuda kader pelopor yang dapat sesuai dengan karakteristik daerah setempat.
- f. Peningkatan sinkronisasi dan kemitraan kepemudaan melalui:
- 1) Program sinergis antar sector dalam hal penyadaran pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
 - 2) Penyusunan kajian dan penelitian Bersama tentang persoalan pemuda;
 - 3) Pengembangan kemitraan berbasis program dalam pelayanan kepemudaan.
- g. Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui:
- 1) Inventarisasi organisasi kepemudaan, mahasiswa, dan kepelajaran;
 - 2) Peningkatan kreativitas dan inovasi, pengasahan kematangan intelektual, penyaluran minat bakat, serta penumbuhan rasa percaya diri, semangat kesetiakawanan social, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - 3) Peningkatan mutu pengelolaan organisasi kepemudaan;
 - 4) Akreditasi tingkat kesesuaian dengan pengaturan dalam Undang-undang nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.
- h. Peningkatan peran serta masyarakat melalui:
- 1) Promosi kegiatan pemerintah dalam pelayanan kepemudaan;
 - 2) Mediasi masyarakat dalam menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan pemuda;
 - 3) Advokasi kemitraan masyarakat pada program pemerintah di bidang kepemudaan, termasuk apresiasi dan penghargaan.

- i. Pemberian penghargaan kepemudaan yaitu pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi, organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, Lembaga pemerintah, badan usaha, kelompok masyarakat, dan perseorangan yang berjasa dalam memajukan potensi pemuda.



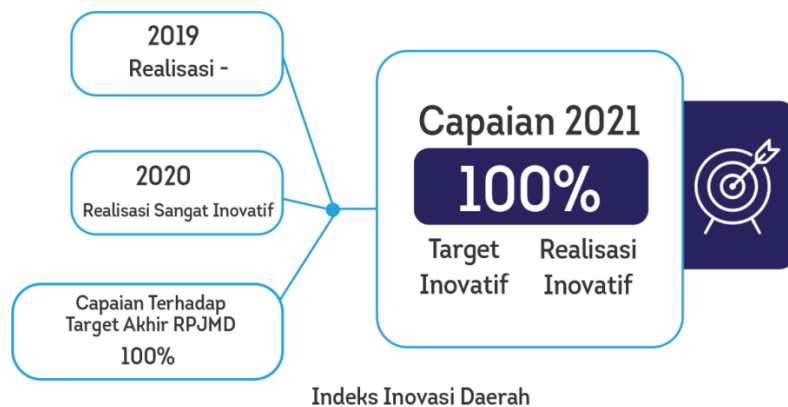
Selain itu, untuk mendukung pencapaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), dilaksanakan Jambore Remaja Kota Bogor yang bertujuan untuk memupuk kebersamaan dan semangat para remaja dalam rangka meningkatkan kreativitas, pengetahuan, dan pemahaman remaja. Jambore tersebut dilaksanakan selama tiga hari yang diisi dengan berbagai pembekalan oleh para narasumber yang kompeten.

Sasaran 8

Meningkatnya Kreativitas dan Inovasi Masyarakat



Untuk mewujudkan Sasaran Meningkatkan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat, diukur melalui indikator Indeks Inovasi Daerah. Perangkat daerah yang berkolaborasi mengampu indikator tersebut yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan didukung oleh seluruh perangkat daerah.



Indeks Inovasi Daerah merupakan himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pelaksanaan penilaian Indeks Inovasi Daerah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Fungsi Indeks Inovasi Daerah dalam mendukung reformasi birokrasi pemerintahan daerah adalah sebagai pusat data inovasi daerah berdasarkan aplikasi indeks inovasi daerah, sebagai sarana pelaporan inovasi daerah, sebagai instrument pengukuran inovasi daerah, untuk penghitungan tambahan penghasilan pegawai daerah, dan bahan untuk penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 002.6-5848 Tahun 2021 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2021 bahwa

capaian Indeks Inovasi Daerah Kota Bogor tahun 2021 dapat terealisasi dengan skor 57,80 dan mendapat Predikat Inovatif. Keberhasilan dari pencapaian target ini karena adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari Pemerintah Kota Bogor dalam memberikan apresiasi terhadap inovasi yang muncul dari masyarakat dalam bentuk pemberian penghargaan, dan dukungan dari Perangkat Daerah dalam melakukan pembinaan terhadap inovasi yang muncul serta adopsi inovasi untuk masyarakat.

Pada Tahun 2021, terdapat 68 inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Visi dan Misi dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024. Inovasi tersebut diperoleh dari inovasi perangkat daerah, dan inovasi masyarakat melalui Lomba Kreativitas Inovasi Urang Bogor (KRIBO). KRIBO diikuti oleh 86 inovator dan sebanyak 76 inovator lolos dalam seleksi administrasi. Dari 76 inovator tersebut, terdapat 54 inovasi yang sudah diimplementasikan di masyarakat. Secara umum, untuk setiap inovasi yang diimplementasikan dapat menunjang satu atau lebih dari satu misi dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sebanyak 43 inovasi yang diimplementasikan guna menunjang tercapainya Misi ke-1 yaitu Mewujudkan Kota Bogor yang Sehat;
- b. Sebanyak 60 inovasi yang diimplementasikan guna menunjang tercapainya Misi ke-2 yaitu Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas; dan
- c. Sebanyak 42 inovasi yang diimplementasikan guna menunjang tercapainya Misi ke-3 yaitu Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera.



Kampung Sehat Untuk Reproduksi



Kampung Germas



Kampung Trantibum



Kampung Perca

Sasaran 9

Meningkatnya Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan, dan Toleransi Masyarakat



Untuk mewujudkan sasaran Meningkatkan Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan, dan Toleransi Masyarakat, diukur melalui Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Kerukunan Umat Beragama. Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator tersebut yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, serta Sekretariat Daerah.

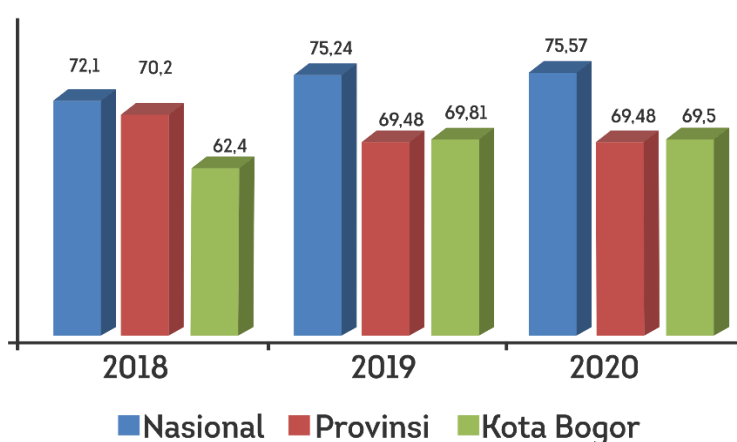


Indeks Pembangunan Gender (IDG) merupakan indikator yang menggambarkan adanya peranan aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik serta digunakan sebagai ukuran menggambarkan kapabilitas dan peranan perempuan dan



laki-laki dalam aspek ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Penghitungan IDG dilakukan pada tiga dimensi yaitu (1) Keterwakilan di parlemen dengan indikator proporsi keterwakilan di parlemen laki-laki dan perempuan; (2) Pengambilan keputusan dengan indikator proporsi dari manajer, staf administrasi, pekerja profesional, dan teknisi laki-laki dan perempuan, serta (3) Dimensi distribusi pendapatan dengan indikator upah buruh non pertanian laki-laki dan perempuan. Indikator ini diukur oleh Badan Pusat Statistik dengan metode penentuan target menggunakan metode survey.

Indeks Pemberdayaan Gender



Sumber : BPS (2021)

Realisasi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2021 belum dapat diketahui realisasinya dari target 70,50, hal ini disebabkan karena Badan Pusat Statistik (BPS) masih belum mempublikasikan data realisasi indikator dimaksud. Capaian IDG Kota Bogor tahun 2020 mencapai 69,03 dan meningkat 0,12 poin dari tahun 2019. Jika dibandingkan dengan IDG Provinsi Jawa Barat, realisasi Kota Bogor lebih tinggi 0,02 poin, namun masih lebih rendah dari capaian IDG Nasional yang mencapai 75,57.

Untuk mendukung capaian peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kembali meraih Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2020 Kategori Madya tingkat kota dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Penghargaan APE tersebut diberikan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PPPA kepada kementerian atau lembaga, pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten atas pelaksanaan pembangunan yang menjamin kesetaraan dan keadilan gender, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga hasilnya sejauh mana.



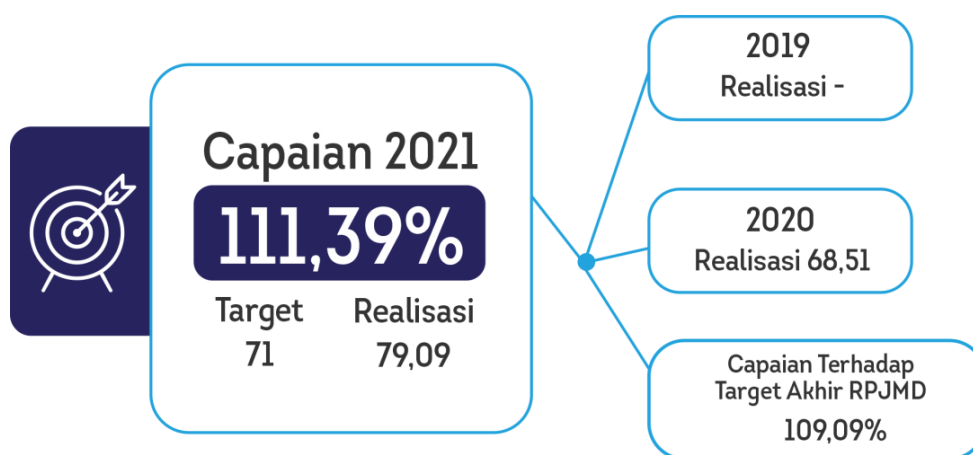
Peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) didukung oleh Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, serta Program Perlindungan Perempuan.



Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender(PUG)



Kegiatan Pemberdayaan Perempuan

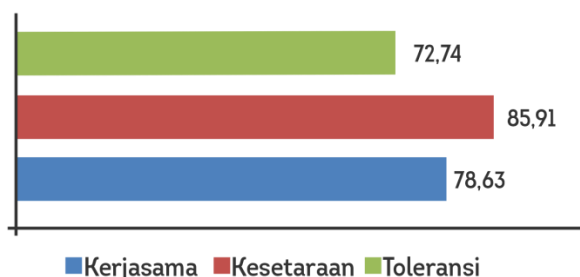


Indeks Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan umat beragama merupakan kehidupan umat beragama yang harmonis, toleransi, damai, saling menghargai dan menghormati perbedaan agama dan kebebasan menjalankan ibadah masing-masing. Indeks Kerukunan Umat Beragama diukur melalui survei persepsi masyarakat Kota Bogor berdasarkan tiga indikator yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Indikator toleransi merepresentasikan sikap saling menerima, menghormati/ menghargai perbedaan. Kesetaraan, mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas. Selanjutnya, kerjasama menggambarkan keterlibatan aktif bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati juga simpati kepada kelompok lain dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan.

Indeks kerukunan umat beragama kota bogor 2021

79,09

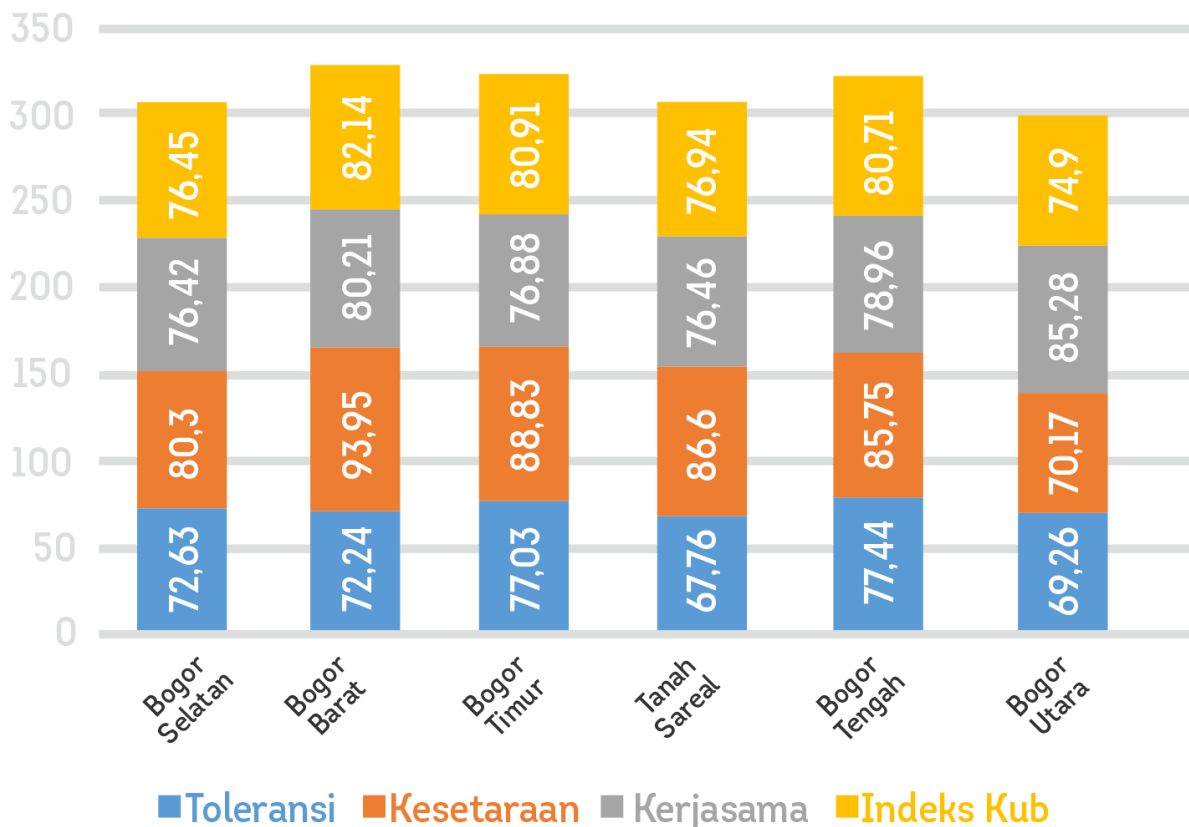


Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (2021)

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (2021)

Pelaksanaan pengukuran survei indeks kerukunan umat beragama dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif terhadap 40 kelurahan yang terpilih secara acak mewakili kelurahan lainnya yang ada di Kota Bogor. Berdasarkan survei tersebut diperoleh Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Bogor Tahun 2021 sebesar 79,09 dengan capaian 111,39%, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, indikator ini telah mencapai 109,09%. Hal ini dapat diartikan bahwa kerukunan umat beragama kota bogor berada dalam kondisi baik dengan nilai toleransi antar umat beragama berada pada angka 72,74, nilai kesetaraan umat beragama dengan angka 85,91, serta nilai kerjasama umat beragama yang menunjukkan nilai 78,63. Selanjutnya berdasarkan hasil survei tersebut, Kecamatan Bogor Barat menjadi kecamatan yang paling baik nilai Indeks Kerukunan Umat Beragamanya dibandingkan dengan kecamatan lain dengan skor indeks 82,14.

Indeks Kerukunan Umat Beragama 6 Kecamatan di Kota Bogor



Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (2021)

Faktor yang mendorong terciptanya kerukunan umat beragama di Kota Bogor yaitu melalui peningkatan rasa kebersamaan persatuan dan kesatuan seluruh elemen masyarakat di Kota Bogor, pelaksanaan deteksi/pengurangan konflik yang bernuansa



SARA yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban serta penyelenggaraan pemerintah daerah, mendorong dan meningkatkan toleransi antar umat beragama, mendorong aktivitas lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan, menjalin hubungan yang harmonis dalam melaksanakan kegiatan pemerintah daerah antara masyarakat dengan unsur pemerintah daerah baik TNI maupun POLRI.

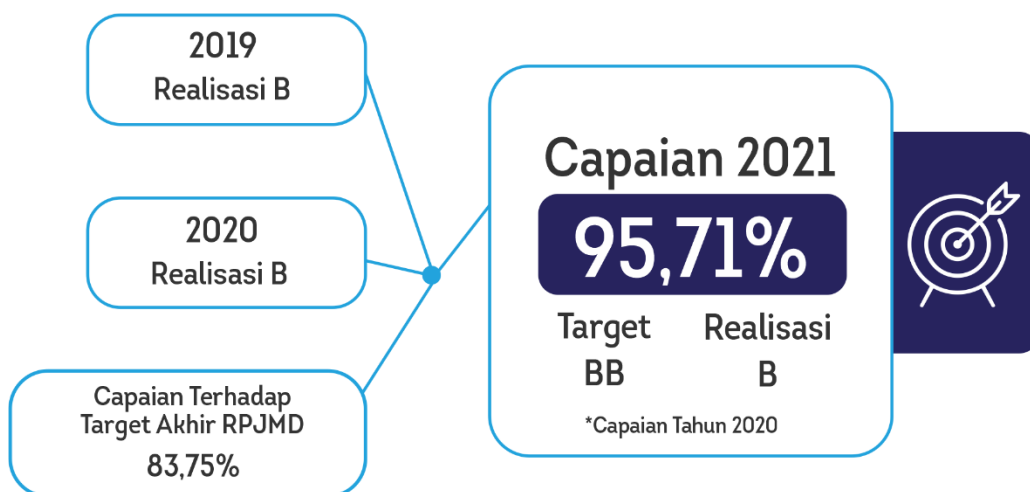
Program yang mendukung ketercapaian Indeks Kerukunan Umat Beragama meliputi Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik, Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik, Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Sasaran 10

Tercapainya Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel



Untuk mewujudkan Sasaran Tercapainya Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel, diukur melalui indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator tersebut yaitu Sekretariat Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.



Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* reformasi Birokrasi 2010-2025 yang kemudian



dituangkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Tujuan dari Reformasi Birokrasi yaitu menciptakan birokrasi pemerintah yang professional dengan karakter adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Adapun area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan yaitu organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik dan pola pikir (mindset), serta budaya kerja aparatur.

Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2021 masih belum dapat diketahui realisasinya, karena sampai dengan laporan ini disusun, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku lembaga yang melakukan perhitungan indikator tersebut belum mempublikasikan data realisasi tahun 2021. Namun pada tahun 2020 realisasinya telah mencapai nilai 67,01 atau berpredikat B. Capaian ini belum memenuhi target yang ditetapkan. Meskipun, jika dibandingkan dengan tahun 2019 capaian tahun 2020 lebih baik, yaitu meningkat dari 66,10 menjadi 67,01.

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bogor mendapatkan nilai 34,30 pada komponen pengungkit/proses, dan 32,71 pada komponen hasil. Komponen proses dinilai berdasarkan penilaian terhadap 8 (delapan) area perubahan, masing-masing adalah Manajemen Perubahan, Penataan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Sedangkan penilaian komponen hasil ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi serta survei persepsi internal maupun eksternal Pemerintah Kota Bogor.

Pencapaian reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Bogor diakselerasi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu penerapan sistem merit, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penerapan akuntabilitas kinerja dan keuangan. Pada aspek manajemen SDM, Pemerintah Kota Bogor mendapatkan penghargaan dari Komite Aparatur Sipil Nasional (KASN) Tahun 2021 terkait Penilaian Penerapan Sistem Merit dalam

manajemen ASN kepada Instansi Pemerintah dengan kategori Sangat Baik. Meritokrasi adalah sistem yang menekankan kepastasan atau kelayakan seseorang dalam menduduki posisi atau jabatan tertentu berdasarkan kompetensi. Pemerintah Kota Bogor berada di urutan pertama dengan nilai 335,5. Kemudian disusul di bawahnya ada Pemerintah Kabupaten Sinjai (334,5), Pemerintah Kabupaten Wajo (333), Pemerintah Kabupaten Karawang (329,5), Pemerintah Kabupaten Sumedang (328,5) dan Pemerintah Kota Pekanbaru (325,5).



Pada sektor penguatan tata laksana, Pemerintah Kota Bogor berhasil meraih Indeks SPBE sebesar 3,11 dengan predikat baik. Untuk mendukung penanganan Pandemi Covid-19, Pemerintah Kota Bogor juga telah membangun aplikasi SALUR (Sistem Kolaborasi dan Solidaritas untuk Rakyat) untuk melakukan pendataan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial akibat covid 19. Selain itu, Pemerintah Kota Bogor juga mentransformasi pengelolaan pengadaan barang/jasa dari konvensional menjadi digital. Dalam aspek akuntabilitas kinerja dan keuangan, Pemerintah Kota Bogor memperoleh predikat Opini BPK WTP selama 5 (lima) tahun berturut-turut.



Pada aspek penguatan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Kota Bogor mendapatkan Penghargaan JDIH Terbaik I dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu wilayah dengan tata pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Terbaik I Kategori Pemerintah Daerah (Pemda).



Pada aspek peningkatan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kota Bogor berinovasi untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan melalui penyediaan Layanan Drive Thru bagi warga dalam mengambil dokumen kependudukan dengan jam operasional pada saat jam kerja pukul 08.00 - 16.00 WIB dan drive thru malam pukul 18.30 - 21.00 WIB.



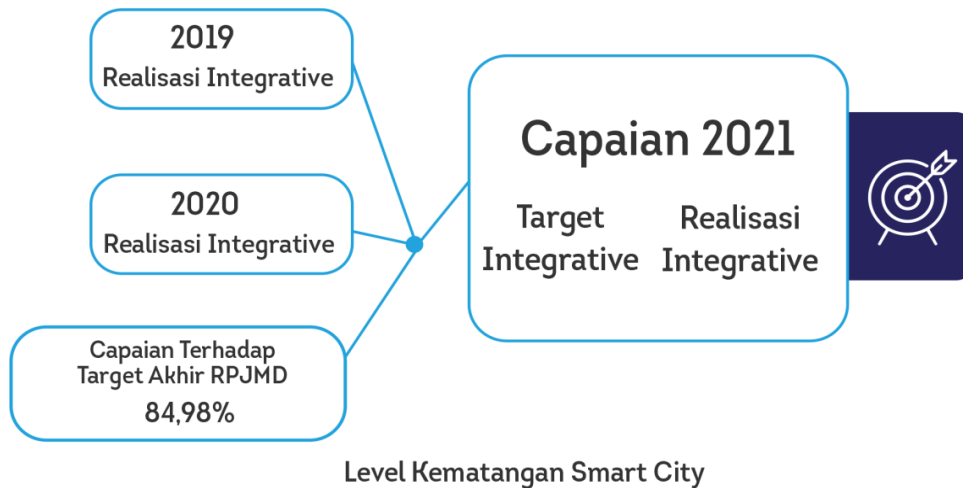
Upaya yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bogor diakselerasi oleh 20 program, yang diantaranya berperan penting dalam pencapaian IRB yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Penyelenggaraan Pengawasan, Program Kepegawaian Daerah, Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah serta Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Sasaran 11

Meningkatnya Kualitas Layanan Kegiatan Ekonomi Masyarakat, Kualitas Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, serta Pengelolaan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi



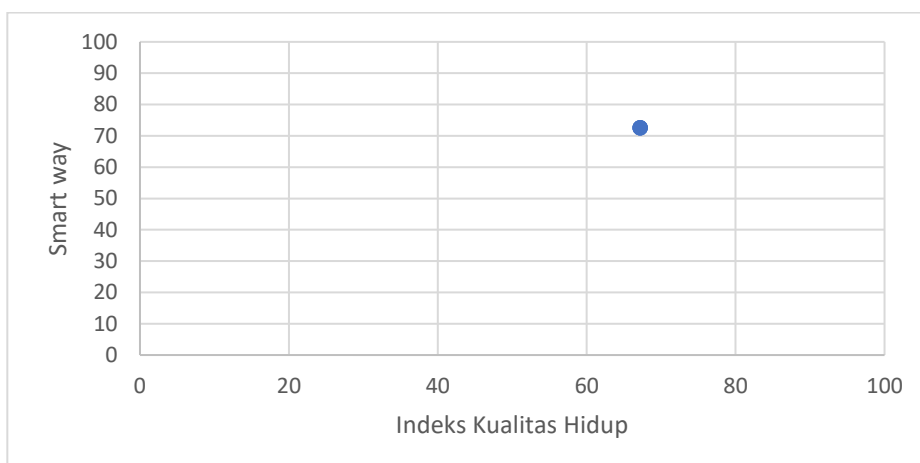
Untuk mewujudkan Sasaran Meningkatkan Kualitas Layanan Ekonomi Masyarakat, Kualitas Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, serta Pengelolaan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi, diukur melalui indikator Level Kematangan Smart City. Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator tersebut yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



Smart city merupakan kota yang dapat mengelola berbagai sumber dayanya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai tantangan kota dengan menggunakan solusi cerdas untuk menyediakan infrastruktur dan memberikan layanan-layanan kota yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya. Institut Teknologi Bandung (ITB) sebagai salah satu lembaga pendidikan di Indonesia melakukan penelitian terkait evaluasi kota cerdas, salah satunya dengan menyelenggarakan Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI) sebagai bagian dari evaluasi implementasi kota cerdas Indonesia

Level Kematangan Smart City Kota Bogor tahun 2021 mendapatkan nilai 68% atau berada pada level *Integrative*, meningkat dari penilaian sebelumnya pada tahun 2019 yang mendapatkan nilai 61,13% dan masih berada pada level yang sama yaitu *Integrative*. Nilai tersebut diperoleh dari hasil pengukuran indeks kualitas hidup warga (62) dan *smart way* (74) atau cara untuk mengelola kota dengan efektif dan efisien.

Hasil Penilaian Kota Bogor Tahun 2021



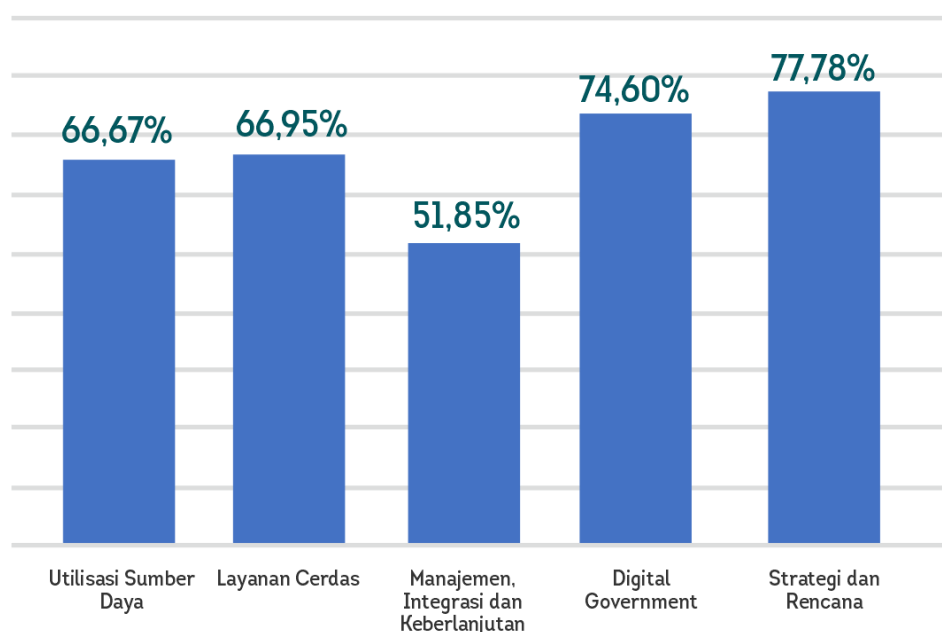
Sumber : RKCI (2021)



Nilai kualitas hidup diukur berdasarkan kondisi ekonomi, sosial kemasyarakatan, lingkungan dan sentiment masyarakat, sementara smart way diukur berdasarkan kemampuan kota untuk mengelola sumberdaya, mengelola layanan, digital government, dan strategi keberlanjutan untuk pengelolaan kota. Kota Bogor telah melakukan berbagai upaya yang komprehensif dalam implementasi kota cerdas. Secara umum pemerintah kota telah mengelola sumberdaya yang dimiliki kota baik sumberdaya alam, manusia, maupun infrastruktur. Secara khusus Kota Bogor tidak memiliki sumberdaya alam, namun telah mengidentifikasi dan mencoba memberdayakan beberapa situs budaya keurbakalaan, potensi wisata sungai. Sumberdaya lain yang teridentifikasi sebagai potensi kota adalah geografis Kota Bogor sebagai kota penyangga dan transit area wisata yang memunculkan potensi perdagangan dan hotel untuk mendukung pariwisata.

Disamping pariwisata untuk mendukung peningkatan ekonomi, Pemerintah kota Bogor saat ini tengah mendukung peningkatan UMKM, lingkungan hidup dan infrastruktur. Beberapa program pelatihan digulirkan untuk penguatan UKM, modul-modul e-commerce mulai dikembangkan untuk membantu UKM untuk memasarkan produknya. Dalam konteks layanan pemerintah kota Bogor juga masih memiliki beberapa permasalahan yang krusial dan masih belum bisa dikelola secara optimal. Transportasi, permasalahan lahan dan lingkungan menjadi fokus dari pemerintah untuk kedepan. Khususnya terkait keberadaan lahan yang relatif sangat sedikit.

Pengelolaan Kota (Smart way)



Sumber : RKCI (2021)

Beberapa inovasi terus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat seperti penguatan UMKM melalui branding yang tepat, Bogor tanpa plastik yang merupakan salah satu solusi untuk meminimalisir permasalahan lingkungan yang berasal dari sampah plastik, dan urban agriculture sebagai alternatif pertanian, sementara untuk permasalahan transportasi substitusi 1 bus ganti 3 angkot menjadi salah satu solusi yang tengah digalakan meskipun masih belum optimal.

Tatakelola di lingkungan Kota Bogor cukup baik dan terarah dengan keberadaan Masterplan atau rencana pengembangan kota cerdas yang dimiliki dan telah diformalkan dalam SK walikota. Demikian pula keberadaan dewan pelaksana dan dewan perencanaan untuk eksekusi dari setiap kegiatan yang ada pada masterplan. Keterlibatan stakeholder lain seperti Pendidikan, industri dan masyarakat menjadi salah satu kunci pengembangan kota cerdas di Kota Bogor. Pemerintah selalu menggandeng stakeholder lain untuk memastikan setiap kegiatan akan tepat guna. Namun permasalahan yang muncul adalah bagaimana melakukan strategi untuk menjaga sustainabilitas setiap program yang dikembangkan, belum adanya strategi formal berbasis standar yang digunakan selain *monev* rutin yang dilakukan sebagai bahan evaluasi kegiatan.

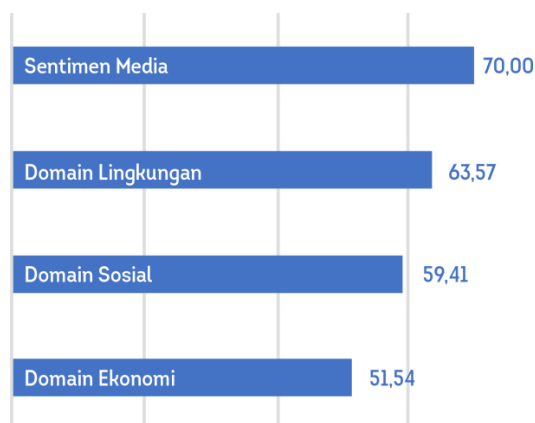
Keseriusan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan dasar juga ditunjukkan dalam mengelola layanan publik. Penguatan infrastruktur dan layanan teknologi informasi dan implementasi Layanan public terintegrasi (Graha Tiasa) saat ini telah mampu melakukan akomodir 14 instansi dan 145 layanan di tahun 2021, hal ini dilakukan untuk memaksimalkan layanan publik yang cepat melalui konsep digital government. Nilai 74,60 terkait digitalisasi dihasilkan dari keberadaan rencana TIK, dan keterhubungan seluruh OPD melalui jaringan internal Kota Bogor. Meskipun demikian infrastruktur yang cukup baik masih belum didukung oleh personil untuk mengelola IT cukup yang merata di setiap OPD. Masih banyak layanan lain yang direncanakan dikembangkan oleh pemerintah, namun demikian pada tahun 2020 dan 2021 layanan yang dikembangkan banyak yang belum optimal karena *force majeure* terkait munculnya pandemic covid 19 yang menyebabkan terjadi perubahan dalam penyerapan anggaran.

Penilaian terkait Indeks kualitas hidup di Kota Bogor menunjukkan bahwa apa yang dilakukan pada pengelolaan kota akan berdampak pada kondisi kota. Berdasarkan hasil penilaian indeks kualitas hidup Kota Bogor ada pada nilai 58,17.



Nilai ini menunjukkan bahwa kualitas hidup di kota bogor ada pada posisi scattered, dimana beberapa layanan dan kondisi umum di kota bogor belum optimal. Parameter dari indeks kualitas hidup ini adalah ekonomi, sosial, lingkungan dan sentiment analisis yang berasal dari berita online dan membahas tentang kondisi kota Bogor.

Nilai Capaian Kualitas Hidup (Quality of Life)



Sumber : RKCI (2021)

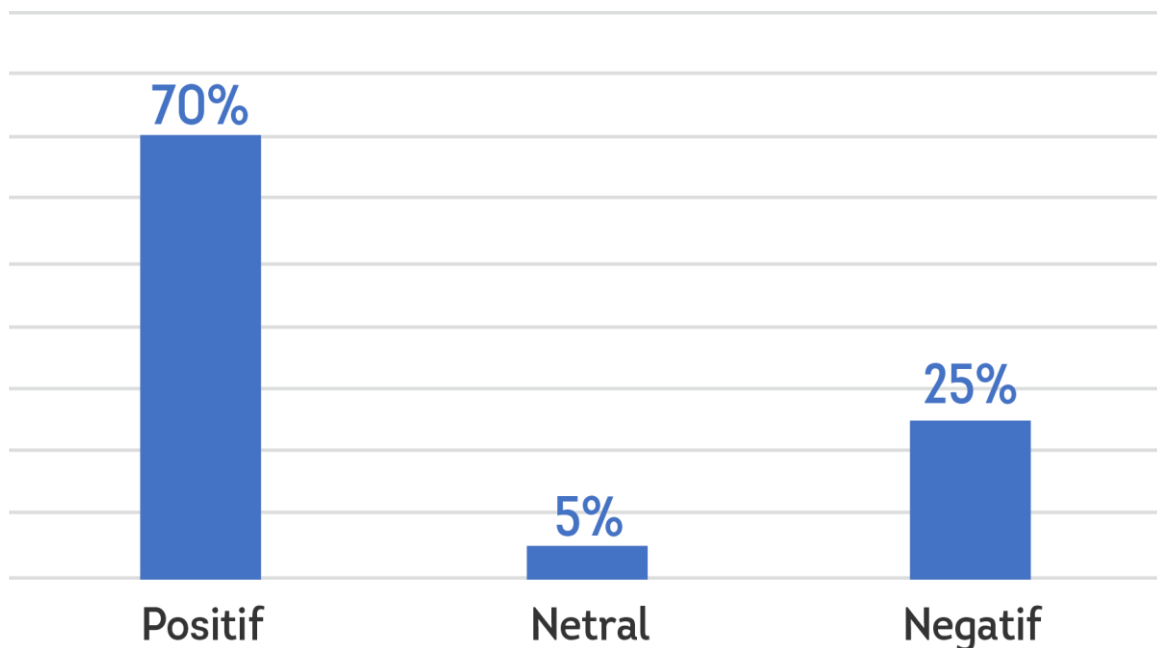
Nilai capaian kualitas hidup kota bogor terdiri dari kondisi eksisting umum kota bogor dibidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Berdasarkan hasil penilaian meskipun usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kota terus dilakukan, dampaknya masih belum optimal hal ini dapat dilihat dari beberapa hal seperti jumlah penduduk miskin yang mencapai 6,68% dan tingkat pengangguran terbuka yang mencapai 9,74%, hal ini diyakini terjadi semenjak pandemic covid 19 yang secara langsung memberikan dampak pada ekonomi kota. Meskipun demikian berbagai usaha-usaha penguatan terus dilakukan diberbagai bidang. UMKM dan Pariwisata dapat menjadi menjadi sektor yang diandalkan, saat ini potensi hotel dan penginapan masih belum tercapai secara maksimal dengan accupansi hanya 50%.

Capain domain sosial lebih baik dibanding dengan ekonomi, meskipun dalam situasi pandemi namun kota masih mampu membuat masyarakat tetap dapat melakukan aktivitas untuk mendapatkan pelayanan dasar seperti kesehatan, Pendidikan, pelayanan public dan lain sebagainya. Kegiatan belajar mengajar masih dapat dilakukan dengan baik. Akses menuju transportasi umum masih bisa didapat. Demikian pula dengan pelayanan publik yang masih terus berjalan. Dukungan layanan TIK menjadi salah satu trigger seluruh layanan sosial masih bisa berjalan. Hal serupa juga terjadi pada domain lingkungan, dimana beberapa indikator sudah mulai

diimplementasikan dengan baik. Meskipun belum terlalu tinggi substitusi energi dengan energi yang ramah lingkungan sudah mulai dilakukan, demikian pula dengan program hemat energi yang terus disosialisasikan oleh pemerintah. Permasalahan lingkungan yang krusial di kota bogor adalah terkait dengan Ruang terbuka hijau yang masih belum memenuhi kondisi ideal 30%, permasalahan lahan memang menjadi permasalahan di kota bogor, tidak hanya untuk ruang terbuka, namun untuk pemukiman juga.

Permasalahan dan solusi yang dilakukan oleh pemerintah kota bogor juga secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Hal ini berhasil dipotret oleh riset ini. Salah satu parameter dari RKCI dan RTDI adalah sentiment media online, melalui crawling informasi terkait implementasi implementasi kota cerdas di kota Bogor.

Sentimen Analisis Kota Bogor



Sumber : RKCI (2021)

Pemberitaan di media online terkait implementasi kota cerdas di kota Bogor mencatat 70% pemberitaan positif yang membahas program implementasi smart city di berbagai bidang, namun ada juga pemberitaan negative sekitar 25%, sementara 5% lain bersifat netral. Isu positif yang muncul menyangkut beberapa implementasi seperti beberapa dinas yang saling bekerjasama untuk mempersiapkan PTM, antisipasi kebencanaan yang dilakukan BPBD terkait bencana yang musim hujan seperti banjir,

pohon tumbang dan rumah roboh. Sementara isu negatif kota bogor terkait dengan pengelolaan aset yang tidak optimal.

Isu lain yang berhasil ditelusuri di media terkait dengan penguatan UMKM yang terus bertambah dan dibina agar berkembang mendukung ekonomi digital kota Bogor, dan isu penguatan kesehatan terkait dengan vaksinasi warga. Sementara terkait lingkungan pengelolaan sampah perlu perhatian yang serius agar masyarakat tidak terganggu dengan tumpukan sampah. Isu Lain yang berkembang adalah transformasi budaya yang mengarah kepada penguatan toleransi antar beragama yang terjadi, serta pentingnya penyelamatan konservasi dan cagar budaya kebun raya bogor.

Pada tahun 2021 Pemerintah Kota Bogor mendapatkan berbagai penghargaan untuk mendukung capaian Level Kematangan *Smart City*. Dalam bidang ekonomi, Pemerintah Kota Bogor telah mendapatkan empat penghargaan dalam digitalisasi ekonomi dan stabilitas inflasi pada tahun 2021 dari Bank Indonesia, yaitu pertama mendapatkan Penghargaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebagai peringkat pertama se-Jawa Barat karena telah mengimplementasikan elektronifikasi di sisi belanja sebesar 100%. Kedua yaitu mendapatkan penghargaan Apresiasi Jawara Ekonomi Digital Jawa Barat (Ajeg Jabar) sebagai kota terbaik pertama dalam implementasi ETPD. Ketiga mendapatkan penghargaan kota terbaik ke-III dalam digitalisasi ekonomi daerah, serta keempat mendapatkan penghargaan Program Inflasi Unggul Juara Lahir Bathin (Pinunjul) sebagai Kota Terbaik Keempat.



Kemudian dari bidang lingkungan, Pemerintah Kota Bogor juga mendapatkan penghargaan Smart Environment dari Kementerian Komunikasi dan Informatika mengenai Program Bogor tanpa kantong plastik untuk mewujudkan tata kelola lingkungan hidup yang baik dan berkelanjutan. Smart environment merupakan lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan, keberlanjutan sumber daya, keindahan fisik maupun non fisik, visual maupun tidak, bagi masyarakat dan publik lingkungan yang bersih tertata dan ruang terbuka hijau yang stabil.



Program prioritas yang mendukung tercapainya indikator Level Kematangan Smart City yaitu Program Informasi dan Komunikasi Publik dan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.

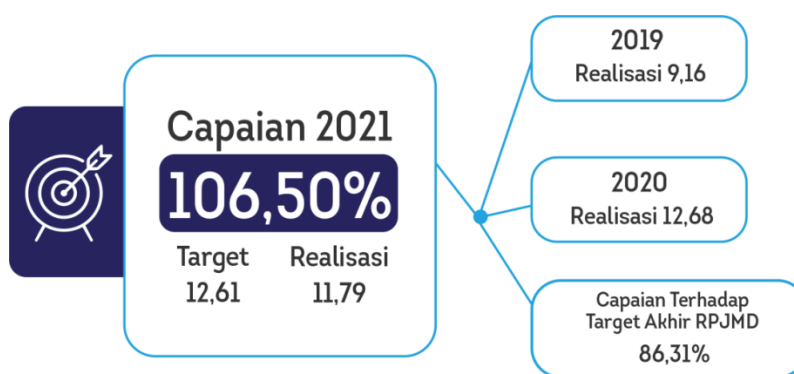
MISI 3 MEWUJUDKAN KOTA BOGOR YANG SEJAHTERA

Sasaran 12

Menurunnya Tingkat Pengangguran

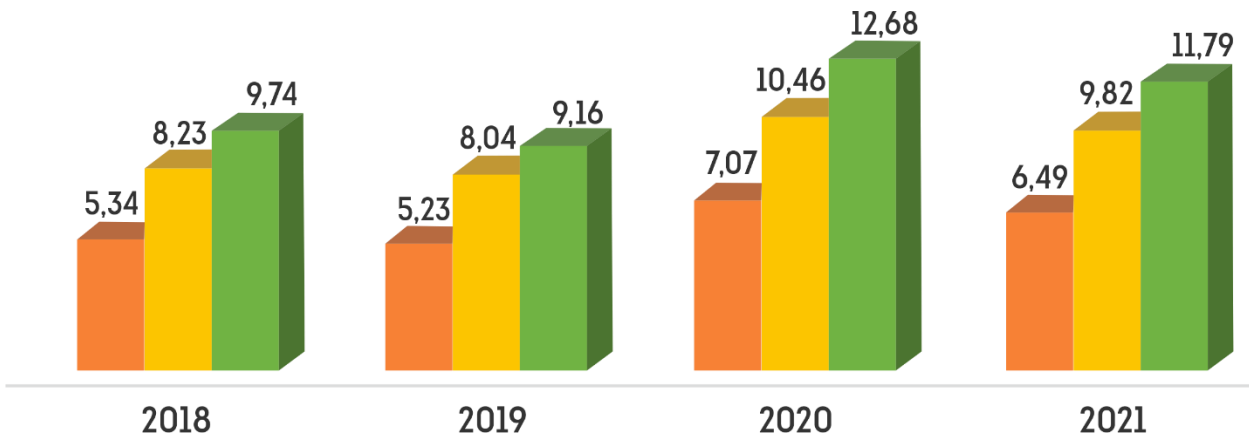


Untuk mewujudkan Sasaran Menurunnya Tingkat Pengangguran, diukur melalui indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Perangkat daerah yang mengampu indikator ini yaitu Dinas Tenaga Kerja.



Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bogor pada tahun 2021 mencapai 11,79 dengan capaian 106,50%. Dibandingkan dengan tahun 2020, capaian tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,89 poin dan jika dibandingkan dengan target rencana jangka menengah (RPJMD) telah mencapai 86,31%. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bogor lebih tinggi dari capaian TPT Provinsi Jawa Barat yang mencapai 9,82 serta capaian nasional sebesar 6,49.



Sumber : BPS (2021)

Indikator ini didukung oleh Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, Program Hubungan Industrial, serta Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kemudian diakselerasi melalui upaya kolaboratif dan inovatif diantaranya yaitu:

1. Pelaksanaan Bursa Kerja Expo secara online melalui website <https://bogorkerja.kotabogor.go.id>;
2. Pemberian Kerja Sementara (padat Karya) terhadap tenaga kerja yang terkena dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan tenaga kerja yang dirumahkan karena terdampak pandemi covid 19;
3. Pelaksanaan penyuluhan bimbingan jabatan dan pembinaan bursa kerja khusus yang dilakukan untuk meningkatkan kesiapan diri calon pencari kerja atau siswa-siswi maupun mahasiswa -mahasiswi perguruan tinggi sebelum memasuki dunia kerja;
4. Pelaksanan penyuluhan ketenagakerjaan tentang Angkatan kerja khusus/disabilitas;
5. Pelaksanaan pembekalan tenaga kerja mandiri yang bertujuan untuk mempersiapkan calon tenaga kerja dapat berwirausaha atau memajukan bidang usahanya;
6. Penyiapan wirausaha baru yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapan diri generasi pengusaha atau pelaku yang memiliki rintisan usaha dalam menjalankan usaha dengan memberikan pelatihan Manajemen Pengelolaan, Manajemen Produksi dan Manajemen Pemasaran;



7. Pelaksanaan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja dan penganggur;
8. Pelaksanaan pelatihan keterampilan berbasis masyarakat seperti tata rias wajah, souvenir, menjahit dan hidroponik;
9. Pelatihan Pemagangan mandiri; dan
10. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

Tabel 2.7
Penyerapan Tenaga Kerja Tahun 2021

No	Uraian	Keterangan		Laki-Laki	Perempuan
		Sudah Bekerja	Wirausaha		
1	Penempatan Melalui Laporan dari Perusahaan	199	-	156	43
2	Pelatihan Keterampilan Berbasis Masyarakat	-	80	24	56
3	PKWT	1.159	-	675	484
4	Peserta Pemberian Kerja Sementara (PKS)	-	38	38	
5	Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri dan Wirausaha Baru	-	40	5	35
6	Pelatihan Berbasis Kompetensi (BLK)	88	-	47	41
7	Pemagangan Mandiri	288	-	154	134
8	LPK Kota Bogor	548	-	252	296
Jumlah		2.282	158	1.351	1.089
Total		2.440		2.440	

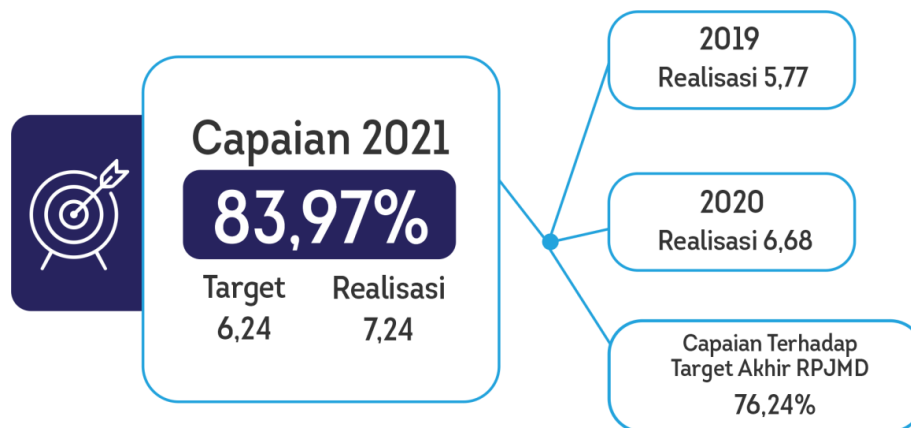
Sasaran 13

Menurunnya Tingkat Kemiskinan



diukur melalui indikator Angka Kemiskinan. Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator ini yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Sosial, dan Sekretariat Daerah.

Untuk mewujudkan Sasaran Menurunnya Tingkat Kemiskinan,



Angka Kemiskinan

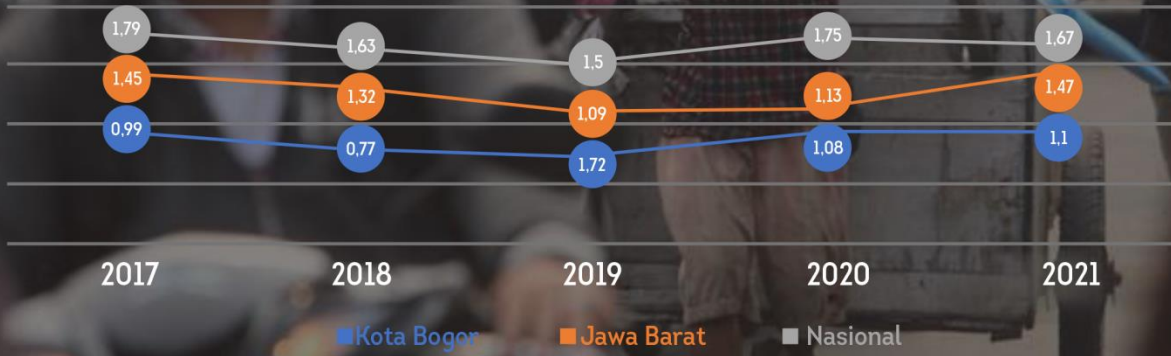
Badan Pusat Statistik menyatakan, angka kemiskinan di Kota Bogor pada tahun 2021 mencapai 7,24%. Artinya sebanyak 7,24% penduduk Kota Bogor merupakan penduduk miskin atau yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah Rp. 480.001,-. Jumlah penduduk miskin Kota Bogor terus mengalami penurunan dari tahun 2017-2019, sehingga pada tahun 2019 tercatat jumlah penduduk miskin di Kota Bogor sebanyak 5,77% atau sebanyak 63.970 orang. Namun adanya Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan 2021 berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan di Kota Bogor dari 75.040 orang (6,68%) tahun 2020 menjadi 80.090 orang (7,24%) pada tahun 2021. Adanya PHK besar-besaran akibat Pandemi Covid-19 juga memberi dampak yang sangat signifikan dalam meningkatkan angka kemiskinan di Kota Bogor.



Sumber : BPS (2021)

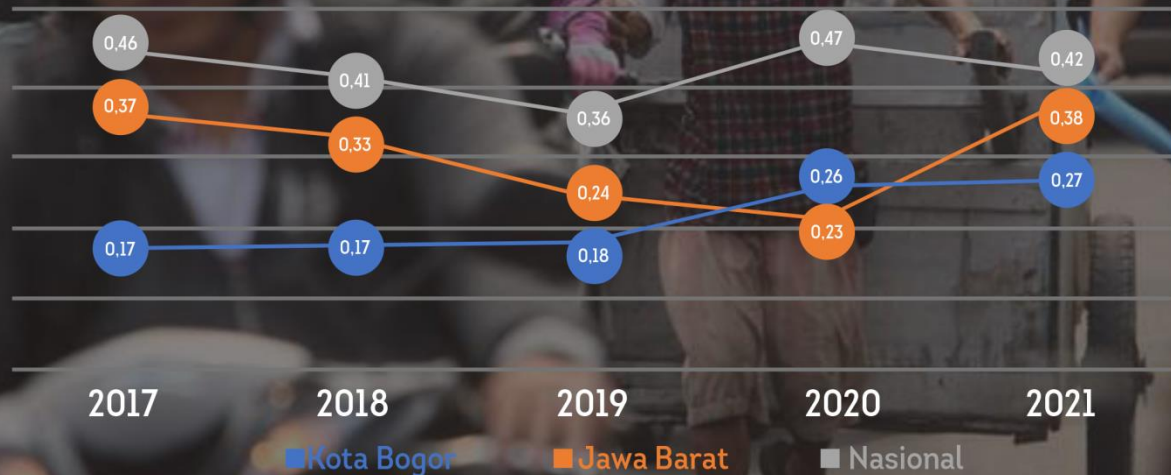
Pada Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap*) tahun 2021, nilai Kota Bogor mencapai 1,10. Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan alat analisa yang digunakan untuk mengukur jarak antara rata-rata pendapatan kelompok miskin secara agregat dengan garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Nilai ini sangat berguna untuk menentukan target sasaran bantuan dan program, karena dapat menunjukkan biaya yang dibutuhkan untuk mengentaskan kemiskinan. Nilai yang diperoleh tahun 2021 naik dibanding tahun 2020 yang mencapai 1,08. Kenaikan tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kota Bogor cenderung semakin menjauhi garis kemiskinan. Selanjutnya pada Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity*) tahun 2021, nilai Kota Bogor mencapai 0,27. Indeks Keparahan Kemiskinan menggambarkan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Tren Indeks Kedalaman Kemiskinan Tahun 2017-2021



Sumber : BPS (2021)

Tren Indeks Keparahan Kemiskinan Tahun 2017-2021



Sumber : BPS (2021)



Program yang mendukung untuk mewujudkan penurunan tingkat kemiskinan yaitu Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, serta Program Perlindungan dan Jaminan Sosial. Efektivitas pelaksanaan program ditunjang oleh semakin membaiknya penetapan target atau sasaran program bantuan melalui penggunaan Basis Data Terpadu yang gencar disosialisasikan. Beberapa upaya yang telah dilaksanakan selama tahun 2021 oleh Pemerintah kota Bogor untuk menekan angka kemiskinan terdiri dari:

1. Program Keluarga Harapan (PKH);

PKH merupakan bantuan sosial bagi masyarakat miskin untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi serta pendampingan. Pada tahun 2021, jumlah penerima PKH sebanyak 29.978 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dengan total anggaran Rp. 81.738.250,-.

2. Pemberian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);

BPNT adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di tempat usaha yang menjual bahan pangan yang telah bekerjasama dengan Bank Penyalur (e-Waroeng). Penerima manfaat mendapat bantuan sebesar Rp. 200.000,-/KPM per Bulan, dimana sesuai ketentuan bantuan tersebut tidak dapat diambil secara tunai tetapi dapat dipergunakan khusus untuk membeli kebutuhan sehari-hari berupa sembako yaitu karbohidrat (beras), sumber protei hewani (telur, ayam, daging dan ikan segar), nabati (kacang-kacangan, tahu, tempe), vitamin dan mineral (buah dan sayur). Adapun jumlah penerima bantuan Program BPNT Tahun 2021 sebanyak 55.480 KPM..

3. Pemberian bantuan kepada disabilitas berupa kursi roda bagi 52 orang;

4. Pemberian bantuan bagi 150 orang anak yatim sebesar Rp. 300.000,- per orang; serta

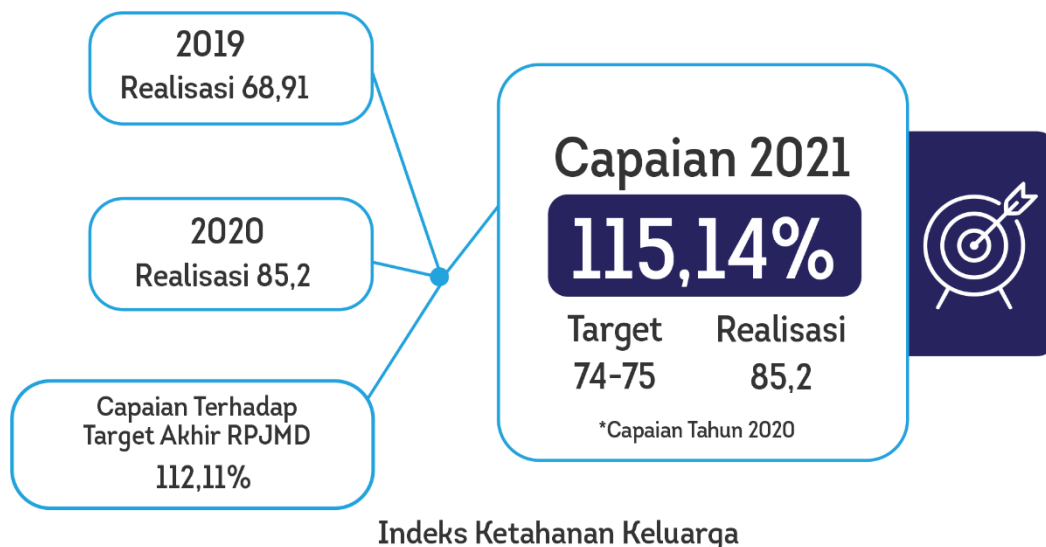
5. Pemberian bantuan bagi anak terlantar dan anak yang memerlukan perlindungan khusus sebanyak 15 orang sebesar Rp. 1.200.000,- per orang.

Sasaran 14

Meningkatnya Kualitas Ketahanan Keluarga



Untuk mewujudkan Sasaran Meningkatkan Kualitas Ketahanan Keluarga, diukur melalui indikator Indeks Ketahanan Keluarga (IKK). Perangkat daerah yang berkolaborasi mengampu indikator ini yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta Dinas Perumahan dan Permukiman.



Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga, Indeks Ketahanan Keluarga (IKK) disusun atas dimensi-dimensi ketahanan yang dijabarkan dalam sejumlah variabel dan indikator pengukuran. Dimensi tersebut, yaitu legalitas dan struktur keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi, ketahanan sosial budaya, dan kemitraan gender.

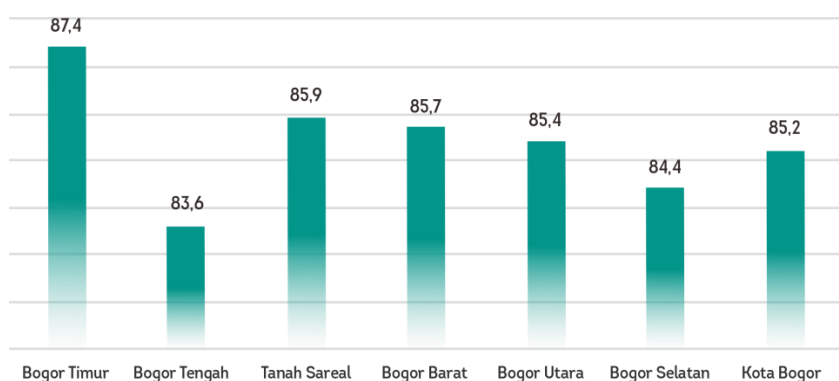
Perhitungan Indeks Ketahanan Keluarga di Kota Bogor dengan target 74-75, tidak dapat direalisasikan pada tahun 2021. Penanganan prioritas pandemi covid 19



telah menyebabkan adanya *refocusing* anggaran, sehingga kegiatan penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga pada tahun 2021 tidak dapat dilaksanakan.

Indeks Ketahanan Keluarga Kota Bogor tahun 2020 mencapai 85,2. Berdasarkan kategori BPS capaian tersebut termasuk kategori sangat tinggi, demikian juga untuk seluruh wilayah kecamatan. Apabila dilihat berdasarkan wilayah kecamatan, maka empat wilayah kecamatan yaitu kecamatan Bogor Timur, Tanah Sareal, Bogor Barat dan Bogor Utara memiliki nilai Indeks Ketahanan Keluarga di atas rata-rata Indeks Ketahanan Keluarga Kota Bogor dan dua kecamatan yaitu kecamatan Bogor Tengah dan Bogor Selatan masih dibawah rata-rata Indeks Ketahanan Keluarga Kota Bogor. Indeks Ketahanan Keluarga tertinggi adalah Kecamatan Bogor Timur (87,4) dan terendah adalah kecamatan bogor Tengah (83,6).

Rata-rata Indeks Ketahanan Keluarga Kota Bogor Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020



Sumber : BPS Kota Bogor (2020)

Apabila dilihat berdasarkan wilayah kecamatan, sebagian besar keluarga (lebih dari 80%) memiliki indeks ketahanan keluarga dengan kategori sangat tinggi. Walaupun demikian, keluarga dengan kategori rendah dan sangat rendah masih ditemukan dan tersebar di semua wilayah kecamatan. Kecamatan Bogor Tengah memiliki persentase keluarga dengan indeks ketahanan keluarga kategori rendah dan sangat rendah tertinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya.

Tabel 2.8
Sebaran Keluarga Berdasarkan Kategori Indeks
Ketahanan Keluarga dan Kecamatan

Kecamatan	Persentase Disetiap Kategori				
	Sangat Tinggi	Tinggi	Cukup	Rendah	Sangat Rendah
Bogor Timur	92,0	3,5	2,2	0,7	1,6
Bogor Tengah	81,4	7,0	3,0	2,1	6,6
Tanah Sereal	86,3	5,0	2,9	1,4	4,4
Bogor Barat	86,5	4,8	2,5	1,4	4,8
Bogor Utara	86,2	4,5	2,8	1,9	4,7
Bogor Selatan	84,6	6,3	3,0	1,1	5,0

Sumber : BPS Kota Bogor (2020)

Berdasarkan hasil penilaian indeks ketahanan keluarga, terdapat beberapa rekomendasi yang harus diperbaiki, diantaranya yaitu:

1. Dimensi ekonomi memiliki pengaruh yang paling signifikan terhadap ketahanan keluarga, tetapi di sisi lain dimensi ekonomi memiliki indeks paling rendah dibandingkan dimensi lainnya. Oleh karena itu, penguatan ekonomi menjadi hal yang prioritas perlu untuk dilakukan;
2. Kepemilikan tabungan menjadi indikator kuat yang mencerminkan dimensi ekonomi. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan lagi sosialisasi gerakan menabung dan manfaatnya, termasuk juga memberikan edukasi kepada masyarakat di Kota Bogor khususnya di wilayah dengan pendapatan per kapita rendah untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan keluarga, menerapkan gaya hidup sederhana, tidak konsumtif dan menggunakan strategi koping keuangan yang sehat, tidak terilit hutang riba, dan lain-lain;
3. Meskipun Kota Bogor memiliki ketahanan keluarga yang sangat tinggi tetapi masih ditemukan indeks ketahanan keluarga yang rendah dan sangat rendah. Oleh karena itu, program-program bantuan untuk keluarga dengan ketahanan keluarga rendah dan sangat rendah harus menjadi prioritas dalam program pemberdayaan ekonomi atau program bantuan lainnya agar ketahanan keluarganya semakin meningkat;



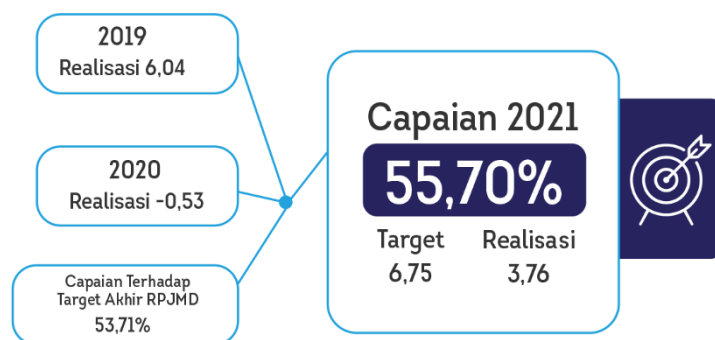
4. Dimensi lain yang memiliki pengaruh kuat terhadap ketahanan keluarga adalah dimensi sosial psikologis. Hal ini berarti program penguatan ekonomi harus diikuti dengan program penguatan internal keluarga, misalnya melalui program sekolah ibu, peningkatan kapasitas pendamping desa/kelurahan, peningkatan kegiatan BKB, BKL, BKR, PIK-R, Puspaga atau Posyandu, peningkatan kapasitas ibu atau istri serta ayah dan suami melalui majelis taklim yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan, serta edukasi keluarga *online*;
5. Peningkatan pada semua dimensi ketahanan keluarga melalui berbagai program dengan melibatkan perangkat daerah terkait sehingga pembangunan keluarga bersifat holistik, sinergis dan *integrative*; dan
6. Capaian indeks ketahanan keluarga di setiap kecamatan dan kelurahan menunjukkan masih ada yang tinggi, rendah, termasuk juga kesenjangan antar wilayah antara capaian tinggi dan rendah. Oleh karena itu, program-program pembangunan keluarga di setiap kecamatan atau kelurahan memiliki skala prioritas yang berbeda-beda dalam menjalankan program dan kegiatannya .

Sasaran 15

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi



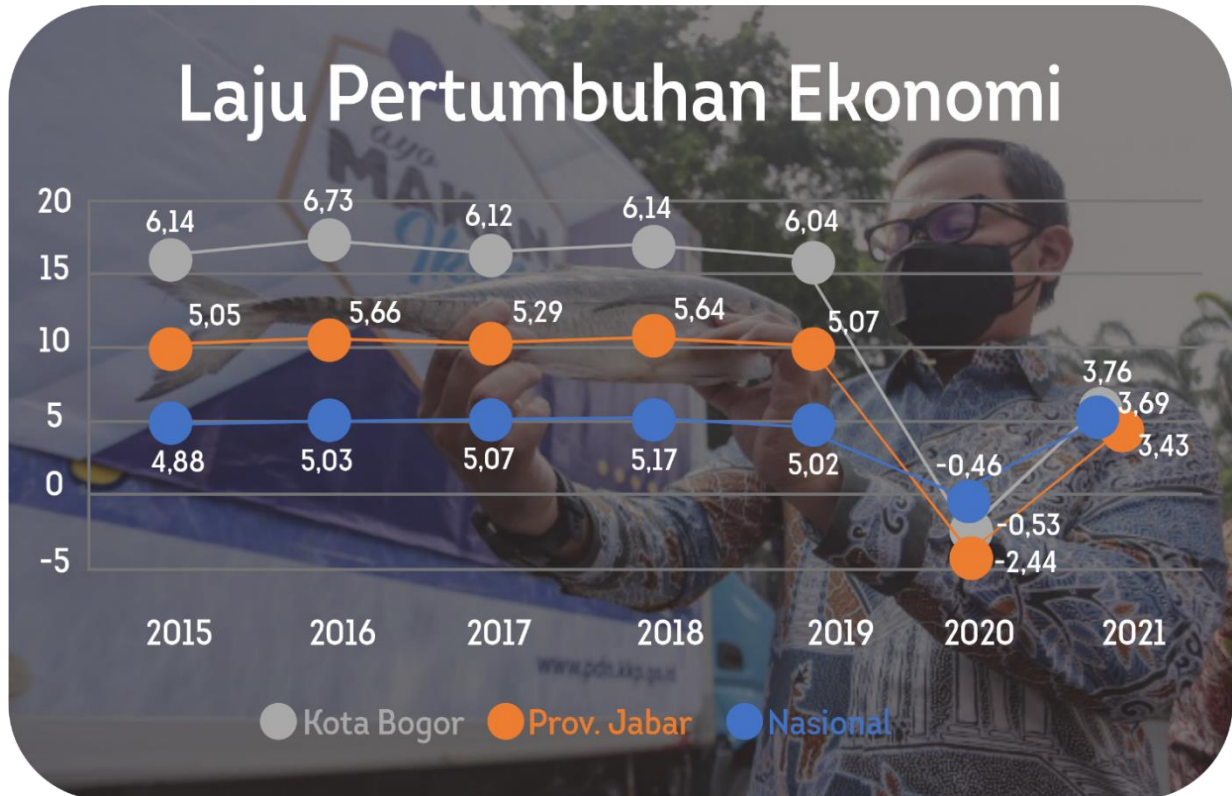
Untuk mewujudkan Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi, diukur melalui indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Per Kapita, Pengeluaran Per Kapita, serta Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit. Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator tersebut yaitu Dinas Koperasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Badan Pendapatan daerah, serta Sekretariat Daerah.



Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Laju pertumbuhan ekonomi kota Bogor kurun waktu 2017-2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 yaitu sebesar 6,12%, meningkat menjadi 6,14% pada tahun 2018 dan mengalami perlambatan pada tahun 2019 yaitu menjadi 6,04%. Pada

tahun 2020, capaian laju pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor terealisasi sebesar -0,53% dan meningkat kembali pada tahun 2021 dengan realisasi sebesar 3,76%.



Sumber : BPS dan BPS Jawa Barat (2020)

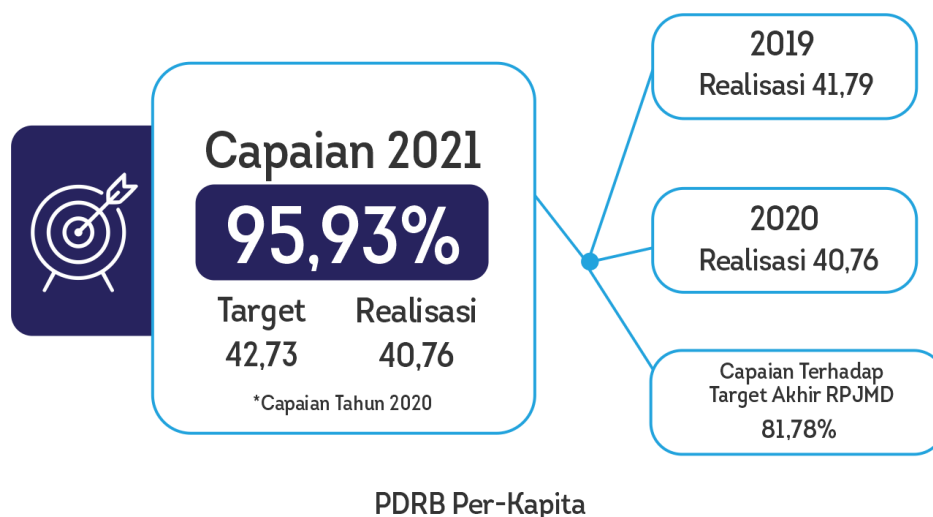
Dampak dari adanya Pandemi Covid-19 terhadap perekonomian yaitu menurunnya tingkat konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang memiliki proporsi terbesar dalam pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan di semua provinsi. Konsumsi rumah tangga di Kota Bogor diperkirakan menurun sejalan dengan penurunan di Provinsi Jawa Barat yang disebabkan oleh penurunan daya beli, peningkatan pengangguran, dan masyarakat yang lebih banyak menyimpan uangnya karena motif berjaga-jaga. Selain itu, pertumbuhan investasi yang memiliki tujuan dalam penyerapan tenaga kerja dan penciptaan pertumbuhan ekonomi juga mengalami penurunan di semua provinsi. Di Kota Bogor, diperkirakan investasi menurun sejalan dengan penurunan di Provinsi Jawa Barat, antara lain disebabkan oleh penurunan realisasi PMDN. Melemahnya sektor perdagangan dan industri berdampak pada meningkatnya pengangguran dan PHK saat Pandemi Covid-19. Sebanyak 42% warga sempat menganggur dan di PHK saat pandemi, sementara 7%

diantaranya menganggur sebelum pandemi dan sisanya sebanyak 58% tetap sama seperti sebelum pandemi.

Strategi yang dilaksanakan untuk pemulihan ekonomi berfokus pada program-program dan kegiatan yang dapat membangkitkan sektor perekonomian diantaranya yaitu:

1. Menurunkan tingkat pengangguran melalui:
 - a. menciptakan kesempatan kerja dengan kolaborasi dengan pengusaha, UMKM, BUMN/BUMD, Perbankan dan Profesional serta NGO;
 - b. peningkatan skill angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
 - c. menumbuhkan wirausaha baru, inkubasi bisnis dan start up firm;
 - d. melaksanakan program pemagangan pencari kerja dengan berkoordinasi dengan industry;
 - e. penataan dan pembinaan pekerja informal; serta
 - f. meningkatkan perlindungan tenaga kerja.
2. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat miskin melalui:
 - a. perlindungan sosial bagi masyarakat miskin atau berpotensi rentan miskin;
 - b. meningkatkan kemampuan ekonomi bagi masyarakat miskin
 - c. Conditional Cash Transfer bagi masyarakat miskin; serta
 - d. meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat miskin;
 - e. meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mengurangi kemiskinan.
3. Meningkatkan peran dan daya saing UMKM/IKM, pelaku ekonomi kreatif dan koperasi dalam perekonomian melalui:
 - a. Peningkatan daya saing koperasi, UMKM, IKM dan pelaku ekraf melalui pembinaan dan pendampingan, peningkatan kualitas kelembagaan, dukungan dan pembiayaan usaha;
 - b. Fasilitasi dan peningkatan kemampuan pemasaran serta perluasan jaringan distribusi;
 - c. Peningkatan kualitas produksi dan packaging;
 - d. Subsidi pada penyediaan bahan baku dan proses produksi;

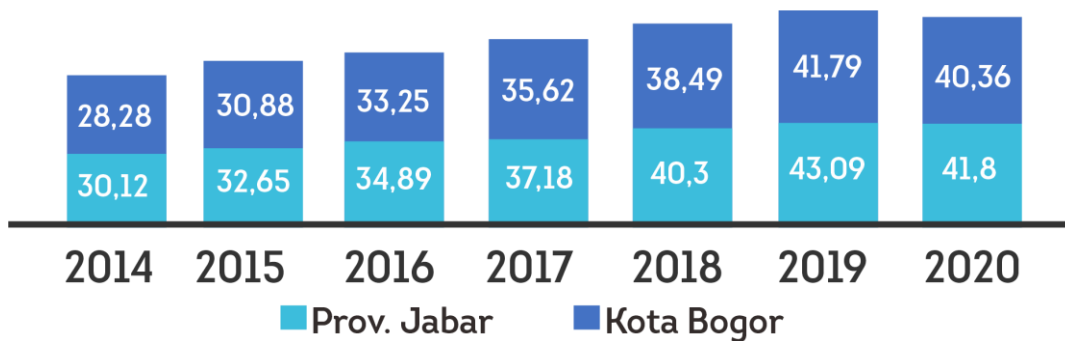
- e. Kerjasama dengan industri besar dan menjadi bagian dari rantai nilai industri besar; serta
 - f. Akselerasi pemanfaatan IT dalam proses produksi dan pemasaran.
4. Meningkatkan iklim investasi dan daya saing daerah melalui:
- a. Akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi;
 - b. Optimalisasi sector ekonomi unggulan kota bogor;
 - c. Menyediakan layanan public dan perizinan yang responsive, mudah dan cepat melalui layanan terintegrasi secara elektronik;
 - d. Redistribusi pusat aktivitas dan pertumbuhan ekonomi di wilayah kota bogor; serta
 - e. Pengendalian ruang kota yang kondusif.



Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kota Bogor tahun 2021 belum dapat diketahui realisasinya. Sampai dengan laporan ini disusun, Badan Pusat Statistik (BPS) masih belum mempublikasikan data realisasi tahun 2021. PDRB per kapita merupakan pembagian dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dengan jumlah penduduk dalam periode waktu yang sama, sebagai salah satu cara untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita. Berdasarkan PDRB per Kapita dapat diketahui besarnya pengeluaran setiap penduduk di suatu daerah. Apabila melihat *trend* sampai dengan tahun 2019, PDRB perkapita Kota Bogor ADHB dari tahun ke tahun selalu mengalami pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2017 PDRB per kapita tercatat sebesar 35,62 juta rupiah. Secara nominal terus

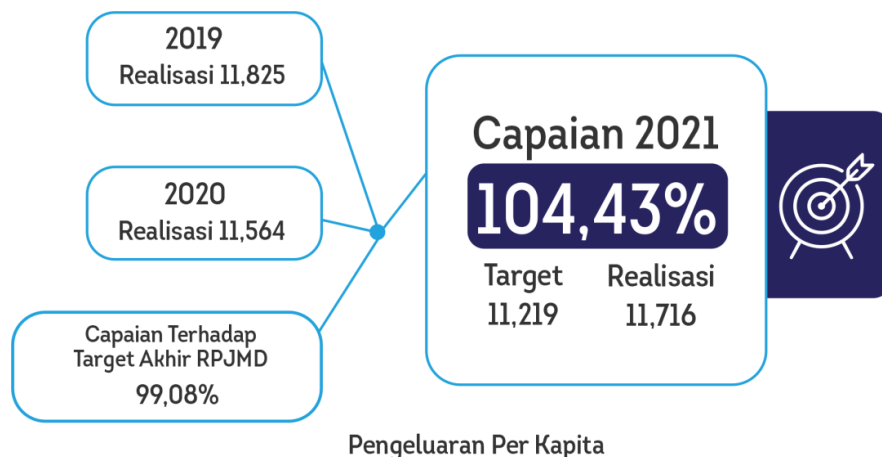
mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 41,79 juta rupiah. Namun pada tahun 2020, PDRB per kapita Kota Bogor menurun menjadi 40,76 juta rupiah. Hal ini dalatarbelakangi oleh adanya dampak dari adanya Pandemi Covid-19 terhadap perekonomian yaitu menurunnya tingkat konsumsi rumah tangga yang disebabkan oleh penurunan daya beli, peningkatan pengangguran, dan masyarakat yang lebih banyak menyimpan uangnya karena motif berjaga-jaga.

PDRB Per Kapita Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat 2014-2020



Sumber : BPS Jawa Barat, 2021

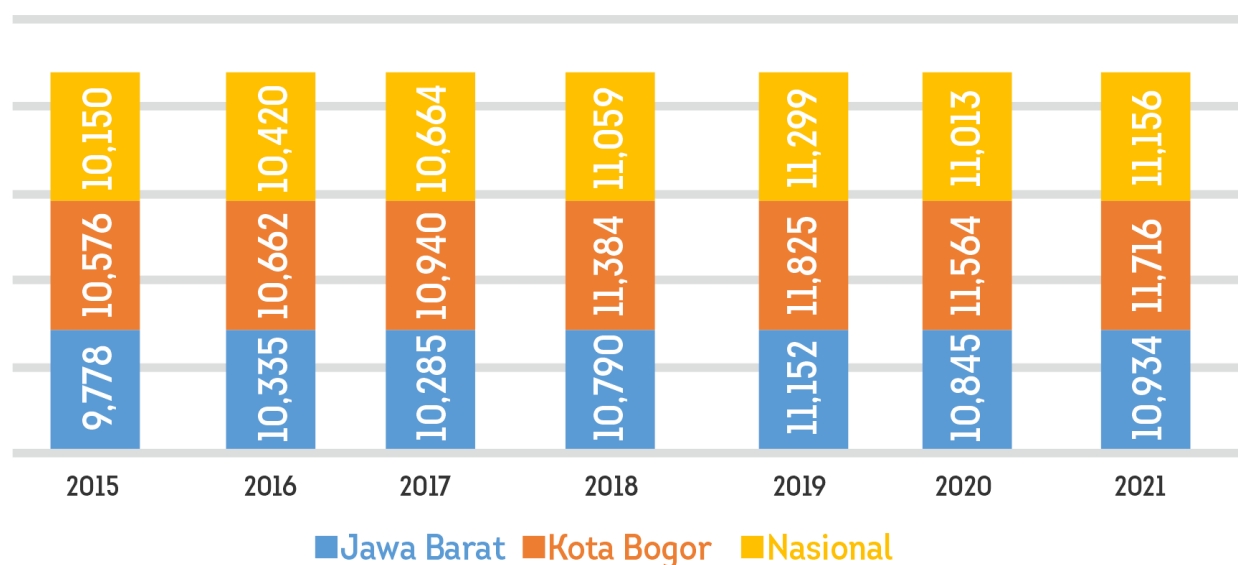
Nilai PDRB dapat mencerminkan gambaran perekonomian wilayah secara umum serta tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Ukuran PDRB yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara kasar adalah nilai PDRB per kapita. Laju pertumbuhan PDRB Per kapita menandakan terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat Kota Bogor secara umum sebagai akibat dari peningkatan output produksi sektor ekonominya. Namun demikian, angka kemakmuran yang diperoleh dari implikasi kenaikan PDRB per kapita belum dapat dijadikan ukuran baku kesejahteraan masyarakat karena belum mengandung unsur pemerataan distribusi pendapatan.





Pengeluaran per kapita merupakan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran per kapita di Kota Bogor mengalami peningkatan sebesar 152.000 (1,31%), dimana pada Tahun 2020 sebesar 11.564.000 menjadi 11.716.000 di Tahun 2021. Jumlah tersebut naik 1,31% persen bila dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan pada Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 261.000 (2.20%), dimana pada Tahun 2019 sebesar 11.825.000 menjadi sebesar 11.564.000 di Tahun 2020 akibat adanya pandemi Covid-19. Dari data tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita di Kota Bogor pada Tahun 2021 masih lebih baik dengan pengeluaran per kapita nasional yaitu sebesar 11.156.000 dan Provinsi Jawa barat sebesar 10.934.000. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan di Kota Bogor menurut komoditas dan kelompok pengeluaran sebesar 1.960.500, rata-rata konsumsi kalori per kapita sehari menurut kelompok komoditas makanan dan kelompok pengeluaran sebesar 2.088,72, dan untuk rata-rata konsumsi protein per kapita sehari menurut kelompok komoditas makanan dan kelompok pengeluaran sebesar 61.16.

Tren Pengeluaran Perkapita Tahun 2018-2021



Sumber : BPS (2021)

Tabel 2.9

Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut komoditas dan kelompok pengeluaran

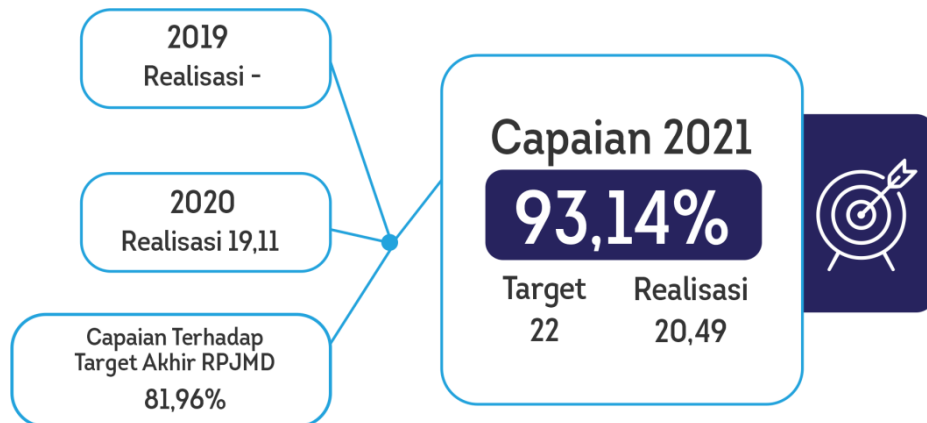
No	Kelompok Komoditas	Kelompok Pengeluaran			Total Rata-rata Pengeluaran
		40% Terbawah	40% Tengah	20% Teratas	
1	Padi-padian	57.238	70.069	83.081	67.536
2	Umbi-umbian	5.119	8.833	12.521	8.084
3	Ikan/Udang/Cumi/ Kerang	26.998	52.247	111.743	54.029
4	Daging	23.929	47.003	146.372	54.029
5	Telur dan Susu	27.713	61.860	112.429	58.301
6	Sayur-sayuran	38.808	71.027	91.891	62.235
7	Kacang-kacangan	10.263	17.084	26.757	16.288
8	Buah-buahan	13.364	35.813	98.496	36.351
9	Minyak dan Kelapa	13.438	18.274	24.330	17.549
10	Bahan Minuman	16.350	22.225	31.999	21.827
11	Bumbu-bumbuan	10.205	18.248	30.132	17.404
12	Konsumsi Lainnya	11.873	18.950	24.017	17.131
13	Makanan dan Minuman Jadi	131.940	285.000	661.591	298.983
14	Rokok dan Tembakau	62.142	102.645	96.468	85.213
	Jumlah Makanan	449.382	829.276	1.551.971	821.639
15	Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	190.446	489.522	1.718.950	615.412
16	Aneka Barang dan Jasa	64.849	186.449	955.544	291.410
17	Pakaian. Alas khaki dan Tutup kepala	11.597	35.138	129.537	44.573
18	Barang Tahan Lama	5.469	31.869	232.516	61.376
19	Pajak, Pungutan dan Asuransi	19.485	63.579	364.678	106.068
20	Keperluan Pesta dan Upacara/Kenduri	2.483	11.085	73.069	20.002
	Jumlah Bukan Makan	294.349	817.693	3.474.294	1.138.861
	Rata-rata Pengeluaran Bogor	743.730	1.646.968	5.026.211	1.960.500

Tabel 2.10
Rata-rata konsumsi kalori per kapita sehari menurut kelompok komoditas makanan dan kelompok pengeluaran

No	Kelompok Komoditas	Kelompok Pengeluaran			Total Rata-rata Konsumsi kalori
		40% Terbawah	40% Tengah	20% Teratas	
1	Padi-padian	815,53	851,32	752,89	811,96
2	Umbi-umbian	27,90	34,43	28,80	30,69
3	Ikan/ Udang/ Cumi/ Kerang	28,18	40,97	55,90	38,84
4	Daging	59,28	102,41	178,13	100,28
5	Telur dan Susu	54,28	90,01	113,98	80,51
6	Sayur-sayuran	26,93	37,75	34,95	32,86
7	Kacang-kacangan	42,87	50,42	61,35	49,58
8	Buah-buahan	24,80	40,43	65,84	39,25
9	Minyak dan Kelapa	254,43	322,65	317,63	294,36
10	Bahan Minuman	57,68	69,53	79,20	66,72
11	Bumbu-bumbuan	5,96	8,66	10,85	8,02
12	Konsumsi Lainnya	66,66	81,95	73,50	74,15
13	Makanan dan Minuman Jadi	333,00	491,88	657,94	461,50
14	Rokok dan Tembakau	0,00	0,00	0,00	0,00
Rata-rata Konsumsi Kota Bogor		1.797,51	2.222,38	2.403,97	2.088,72

Tabel 2.11
Rata-rata konsumsi protein per kapita sehari menurut kelompok komoditas makanan dan kelompok pengeluaran

No	Kelompok Komoditas	Kelompok Pengeluaran			Total Rata-rata Konsumsi kalori
		40% Terbawah	40% Tengah	20% Teratas	
1	Padi-padian	19,18	20,06	17,11	19,12
2	Umbi-umbian	0,32	0,44	0,44	0,39
3	Ikan/ Udang/ Cumi/ Kerang	5,03	7,41	10,27	7,03
4	Daging	3,78	6,63	12,04	6,57
5	Telur dan Susu	3,05	5,07	6,39	4,52
6	Sayur-sayuran	1,43	1,95	1,78	1,71
7	Kacang-kacangan	4,12	5,03	6,11	4,89
8	Buah-buahan	0,27	0,44	0,77	0,44
9	Minyak dan Kelapa	0,08	0,16	0,12	0,12
10	Bahan Minuman	0,46	0,54	0,75	0,55
11	Bumbu-bumbuan	0,24	0,37	0,45	0,33
12	Konsumsi Lainnya	1,31	1,57	1,45	1,44
13	Makanan dan Minuman Jadi	9,44	15,02	657,94	14,0
14	Rokok dan Tembakau	0,00	0,00	0,00	0,00
Rata-rata Konsumsi Kota Bogor		48,71	64,68	79,05	61,16



Proporsi Kredit UMKM Terhadap Total Kredit

Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit tahun 2021 dapat terealisasi sebesar 20,49%, meningkat 1,38% dari tahun sebelumnya. Proporsi kredit yang diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar Rp. 5.117.656.000.000,- dari total seluruh pinjaman sebesar Rp. 24.975.452.000.000,-



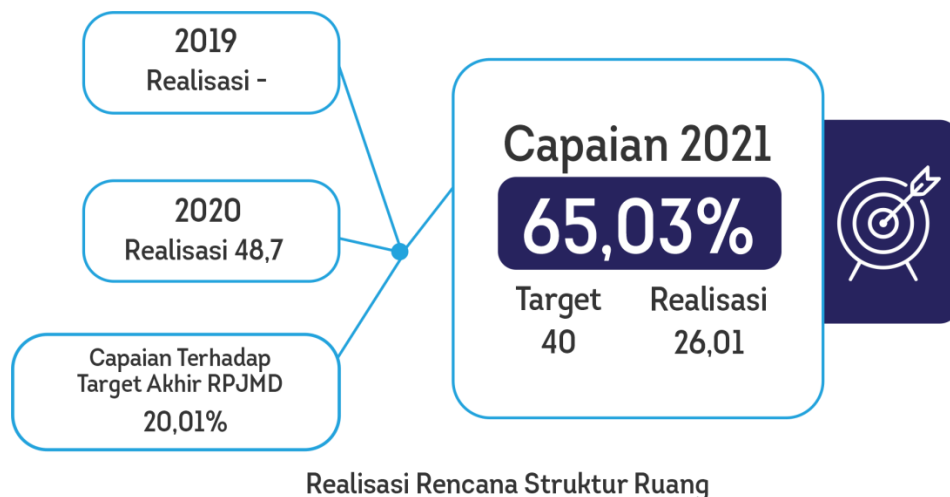
Pada Tahun 2021 Pemerintah Kota Bogor berhasil meraih penghargaan sebagai debitur terbaik untuk kategori debitur Pemerintah Daerah yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Investasi, Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sasaran 16

Meningkatnya Kualitas Ruang yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi



Untuk mewujudkan Sasaran Meningkatkan Kualitas Ruang yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi, diukur melalui indikator Persentase Realisasi Rencana Struktur Ruang dan Persentase Realisasi Rencana Pola Ruang. Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator tersebut yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Dinas Lingkungan hidup.

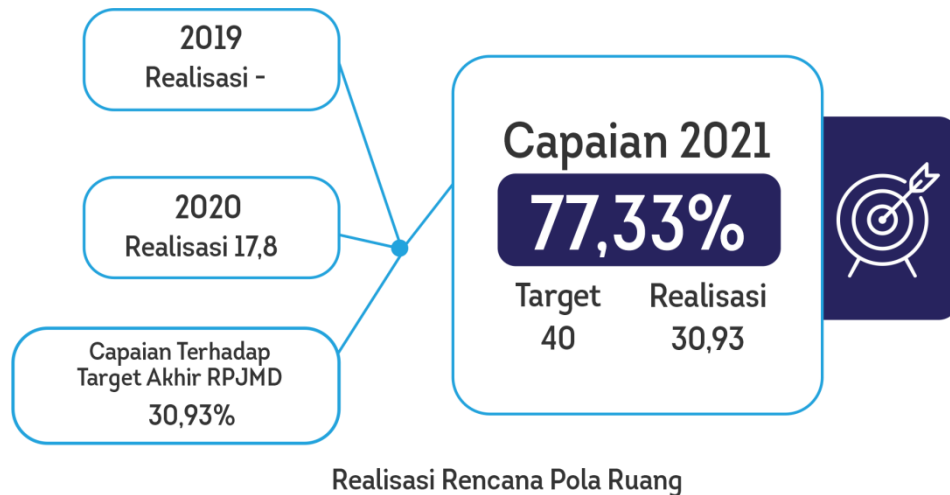


Persentase ketercapaian rencana struktur ruang sampai dengan tahun 2021 dapat terealisasi sebesar 26,01%. Capaian tersebut diperoleh dari hasil evaluasi penilaian

pelaksanaan program pemanfaatan ruang RTRW Kota Bogor pada tahun anggaran 2021. Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian di antaranya meliputi :

- a. Realisasi Program Pembangunan Jalan, diantaranya pembangunan akses konektivitas dari jalan parung banteng (R3) ke jalan tol jagorawi (KM 42,5);
- b. Realisasi program konversi angkutan kota ke angkutan massal berbasis jalan dengan pengembangan dan pengoperasian angkutan umum bis kita melalui program *Buy The Service* (BTS)
- c. Realisasi Program Jaringan Air Minum melalui penambahan jumlah dan kapasitas reservoir, Pembangunan jaringan pipa transmisi dan distribusi, Pembangunan jaringan pipa transmisi dan distribusi, Pembangunan system penyediaan air minum dengan menggunakan sumber air ekonomis (mata air) dan air tanah dalam untuk sumber air minum komunal serta mengendalikan pembangunan fisik di kawasan sumber mata air.
- d. Realisasi Program Pengembangan Air Limbah melalui pengembangan system pengelolaan air limbah secara terpusat dengan septic tank komunal, peningkatan pengguna sanitasi berbasis masyarakat yang ramah lingkungan, peningkatan pengawasan terhadap sistem instalasi pengolahan air limbah (IPAL) non domestik, penambahan sarana operasional pelayanan truk tinja, pembangunan instalasi biogas IPLT, serta perencanaan sistem offsite dengan septic tank komunal.
- e. Realisasi program persampahan melalui peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah sesuai dengan volume sampah kota, peningkatan cakupan daerah pelayanan pengelolaan sampah, pengelolaan sampah dengan program 3R, bank sampah, lomba persampahan, pembuatan tempat pengelolaan sampah terpadu skala lingkungan, mengembangkan pola kerjasama dengan pihak swasta maupun elemen masyarakat dalam pengelolaan persampahan.
- f. Realisasi Program jaringan drainase melalui penanganan drainase tersier, normalisasi sungai dan saluran, revitalisasi sempadan sungai sesuai dengan fungsinya, optimalisasi/rehabilitasi saluran drainase primer, pengamanan embung-embung dan situ yang telah ada dari pendangkalan dan pembangunan fisik, naturalisasi Ciliwung.

g. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau.



Persentase ketercapaian rencana struktur ruang sampai dengan tahun 2021 dapat terealisasi sebesar 30,93%. Capaian tersebut diperoleh dari hasil evaluasi penilaian pelaksanaan indikasi program perwujudan rencana pola ruang dalam RTRW Kota Bogor pada tahun anggaran 2021. Pencapaian kinerja indikator tersebut didukung oleh:

- Peningkatan dan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk mewujudkan arah pembangunan Kota Bogor sebagai Green City seperti penataan Kawasan alun-alun dan penataan Kawasan situ gede;
- Peningkatan wisata seperti agro wisata yang berada di kelurahan mulyaharja, wisata kampung tematik seperti kampung perca di kelurahan sindangsari;
- Peningkatan akses dan proses perizinan yang menjadi lebih mudah, salah satunya melalui pembangunan Mal Pelayanan Publik yang menyediakan pelayanan perizinan secara online;
- Peningkatan promosi investasi untuk meningkatkan daya Tarik investasi pada sector perumahan, perdagangan dan jasa;
- Penetapan dan sosialisasi Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031;
- Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan bangunan Gedung; dan
- Pembangunan jalur hijau sebagai bagian dari ruang terbuka hijau.



Untuk peningkatan target di tahun mendatang, akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

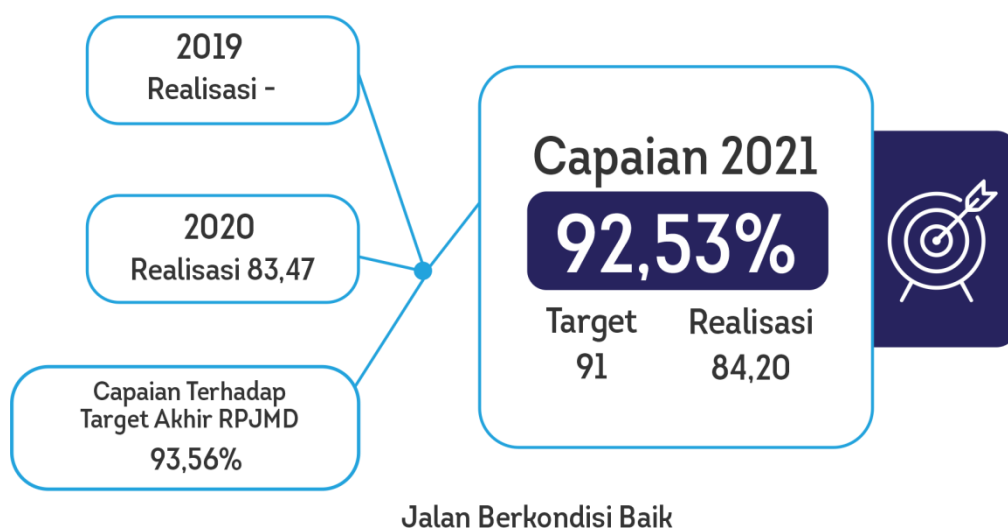
- a. Proses penetapan Perwali tentang Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) untuk Wp Samida (WP A) dan WP Purwa (WP D);
- b. Proses pembahasan RDTR WP Pasima (WP B), WP utara (WP C) dan WP Daksina (WP E);
- c. Pembangunan ruang terbuka hijau;
- d. Pengendalian dan pengawasan bangunan gedung; dan
- e. Sosialisasi Perwali terkait RDTR.

Sasaran 17

Meningkatnya Kualitas dan Konektivitas Infrastruktur dan Transportasi



Untuk mewujudkan Sasaran Meningkatkan Kualitas dan Konektivitas Infrastruktur dan Transportasi, diukur melalui indikator Persentase Jalan Berkondisi Baik dan Persentase Cakupan Pelayanan Angkutan Umum. Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator tersebut yaitu Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.



Persentase jalan berkondisi baik sampai dengan tahun 2021 dapat terealisasi sebesar 84,20%. Dari total panjang jalan kota 864,132 km, jalan yang berkondisi baik

baru mencapai 727,56 km. capaian ini masih belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 91%. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan suhu, cuaca, temperatur udara, material konstruksi perkerasan, kondisi tanah yang tidak stabil, muatan kendaraan-kendaraan berat yang melebihi kapasitas, serta volume kendaraan yang semakin meningkat.

Tabel 2.12
Rincian Panjang Jalan Kota Beserta Kondisi Permukaannya

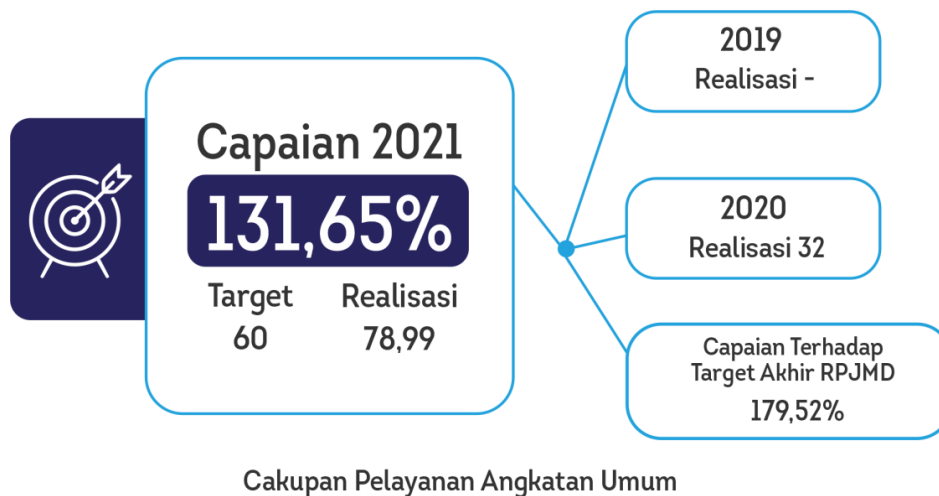
No	Kecamatan	Panjang Jalan Kota	Kondisi Permukaan Jalan (KM)					
			Baik		Rusak Ringan		Rusak Berat	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	Tanah Sareal	202,18	64,842	183	10,852	15,00	0,089	2,50
2	Bogor Utara	126,5	125,502	111,4	27,787	13,5	6,727	1,3
3	Bogor Timur	88	52,214	79,43	15,172	5,623	1,626	1,596
4	Bogor Selatan	173,05	131,364	133,22	4,766	24,01	-	15,83
5	Bogor Tengah	72,32	96,971	58,63	19,051	12,11	1,197	0,12
6	Bogor Barat	202,35	129,555	161,8	29,356	35,14	2,316	4,87
Jumlah Total		864,132	600,448	727,56	106,984	105,41	11,886	26,26

Sumber : Dinas PUPR Kota Bogor (2021)

Untuk pencapaian target tahun 2021, telah dilaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung yaitu:

1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang bertujuan untuk membuat perencanaan jalan dan jembatan yang akan digunakan untuk pelaksanaan fisik pembangunan di TA 2022. Hasil dari Kegiatan ini adalah Dokumen Perencanaan Jalan dan Jembatan di Kota Bogor;
2. Pembebasan Lahan/Tanah Penyelenggaraan Jalan untuk membantu pelaksanaan pengadaan lahan di simpang semplak, Dokumen Perencanaan Pengadaan Lahan untuk Kampung Sawah-R3 serta Dokumen Perencanaan Pengadaan Lahan untuk BIRR;
3. Pembangunan Jalan untuk meningkatkan tingkat kemantapan jalan dan trotoar, dengan panjang total jalan yang dibangun sebesar 5.865,7Km, dan panjang total pembangunan trotoar sebesar 2.595,3 Km;

4. Rekonstruksi Jalan untuk meningkatkan persentase panjang jalan berkondisi mantap sepanjang 26.880 m1;
5. Rehabilitasi Jalan sepanjang 2.100 m1;
6. Pemeliharaan Berkala Jalan;
7. Pemeliharaan Rutin Jalan sepanjang 495.690,45 m2;
8. Pembangunan 2 Unit Jembatan dengan total 17,1 Km;
9. Rehabilitasi 3 Unit Jembatan dengan total 33,8 Km; serta
10. Pemeliharaan Rutin Jembatan.



Persentase Cakupan Pelayanan Angkutan Umum tahun 2021 dapat terealisasi sebesar 78,99% atau tercapai 131,65%. Capaian tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 32%. Upaya yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator tersebut yaitu:

1. Dalam rangka pengembangan wilayah Kota Bogor dan mengurangi beban di pusat kota, dilakukan pengembangan cakupan wilayah pelayanan angkutan umum ke wilayah pinggiran untuk pemerataan pembangunan. Dalam mengembangkan system angkutan massal dan rerouting angkot, prinsip yang digunakan adalah penataan jaringan trayek utama dan jaringan trayek cabang atau pengumpan (*feeder*).
2. Pelaksanaan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan melalui Pengembangan *Bogor Intelligent Transport System* (BITS) dan pemasangan perlengkapan jalan. Pemasangan rambu lalu lintas, pengecatan marka jalan, peningkatan dan pemeliharaan APILL, serta pengadaan dan pemasangan cermin tikungan khususnya di kawasan rawan kecelakaan dan

rawan kemacetan mampu meningkatkan aspek keselamatan dan kelancaran lalu lintas di wilayah Kota Bogor.

3. Penambahan personil lapangan non-ASN melalui pengadaan Pegawai Kontrak Waktu Tertentu (PKWT) Petugas Operasional Lalu Lintas dalam mendukung pelaksanaan pengendalian operasional lalu lintas dengan sistem penugasan pada 7 (tujuh) wilayah pengendalian dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
4. Dilaksanakan kompensasi kendaraan/penghapusan angkutan umum sebanyak 18 (delapan belas) unit yang terdiri dari 4 trayek, yaitu trayek 02-AK (5 kendaraan), Trayek 03-AK (3 kendaraan), Trayek 07-AK (6 kendaraan) dan Trayek 09-AK (4 kendaraan).
5. Dilaksanakan program rerouting (penggabungan trayek), reduksi (peremajaan) hingga konversi (3 angkot menjadi 1 bus). Program ini tidak saja untuk mengurangi jumlah angkutan perkotaan (angkot) tapi juga memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi warga
6. Peluncuran Biskita, yaitu program pengembangan angkutan umum terintegrasi dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yang berbasis pembayaran secara non tunai dan menggunakan teknologi terkini demi meningkatkan keamanan dan kenyamanan mobilisasi masyarakat. Peluncuran Biskita Trans Pakuan merupakan layanan angkutan umum massal dengan konsep *Bus Rapid Transit* (BRT) di Kota Bogor dalam menghadirkan layanan angkutan umum massal sesuai standar pelayanan minimal melalui subsidi berbasis skema *Buy The Service* (BTS). Biskita Trans Pakuan ini diproyeksikan akan menggantikan angkot-angkot di Kota Bogor dengan sistem konversi yaitu 3 unit angkot akan digantikan menjadi 1 unit bus. Sehingga sampai dengan akhir tahun 2021 terdapat 49 bis yang menggantikan 147 angkot.

Akuntabilitas Keuangan

Realisasi PAD Kota Bogor Tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sebagaimana tertuang dalam tabel sebagai berikut :



Tabel 2.13
Realisasi Penerimaan PAD Kota Bogor Tahun 2016-2021

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
1	PENDAPATAN DAERAH						
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH						
1.1.1	Pajak Daerah	492.138.653.391	555.477.512.682	592.978.746.862	689.543.006.040	509.039.468.746	565.600.000.000,00
1.1.2	Retribusi Daerah	62.727.631.456	49.046.366.179	48.414.245.997	51.362.153.192	35.010.375.259	36.033.010.539,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	33.107.211.225	29.949.487.128	26.772.427.406	28.241.844.911	31.927.293.792	32.420.552.150,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	33.107.211.225	267.354.262.108	240.081.650.933	246.737.212.776	292.069.787.730	382.002.477.379,11
	TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH	783.873.587.219	901.827.628.097	908.247.071.198	1.015.884.216.919	872.046.925.527	1.075.240.926.213,11

Sumber: Diolah dari Laporan keuangan Kota Bogor 2016-2021

PAD selama kurun waktu 2016-2019 mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu tingkat pertumbuhan rata-rata per tahunnya adalah berkisar 11.17%, namun menurun pada tahun 2020 disebabkan adanya pandemi covid 19 dan meningkat kembali pada tahun 2021. Peningkatan PAD ini disebabkan oleh peningkatan yang cukup signifikan pada semua komponen PAD kecuali komponen retribusi daerah yang setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Komponen Pendapatan Asli Daerah yang mengalami peningkatan yang sangat signifikan adalah Komponen Pajak Daerah dimana rata-rata pertumbuhan per tahunnya mengalami peningkatan sebesar 9.79% dan komponen Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah yang mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 36.34%.

Pandemi Covid-19 yang terjadi secara global pada Maret 2020 hingga saat ini, telah menyebabkan tekanan yang cukup berat bagi sistem Kesehatan terutama bagi upaya pencegahan penularan dan menekan kematian. Berdasarkan pola penyebaran Covid-19 saat ini, identifikasi kerentanan dan terdampak relatif parah adalah daerah padat, daerah dengan struktur lapangan kerja informal nonpertanian relatif besar, dan daerah dengan struktur ekonomi menonjol di sektor pariwisata, industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi. Tekanan besar pada sistem kesehatan terutama pada pencegahan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, jaminan kesehatan (health

security), dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, terutama untuk deteksi dan surveilans, uji laboratorium, penyediaan alat pelindung, dan alat kesehatan.

Tidak berbeda dengan ekonomi dunia, ekonomi Indonesia juga terkena dampak negative Covid-19. Dampak negatif dirasakan oleh hampir semua pelaku ekonomi. Pendapatan dan konsumsi masyarakat turun tajam sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat (physical distancing). Investasi diperkirakan terdampak sebagai akibat terganggunya neraca keuangan perusahaan karena turunnya penerimaan dan terhentinya beberapa aktivitas produksi. Perdagangan internasional terdampak akibat rendahnya aktivitas perdagangan di tingkat global yang juga menyebabkan turunnya harga komoditas. Tidak hanya itu, kesehatan sektor keuangan juga diperkirakan menurun, seiring dengan kemungkinan meningkatnya non performing loan (NPL) dan volatilitas di pasar keuangan. Berbagai gangguan tersebut berdampak pada sasaran makro dan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan melambat hingga mencapai -0,4-2,3 persen, dengan risiko menuju negatif jika penanganan penyebaran pandemi Covid-19 berlangsung lebih lama.

Dengan adanya kebijakan pembatasan social dalam rangka menekan laju persebaran virus Covid-19 maka secara otomatis berpengaruh terhadap menurunnya aktivitas ekonomi. Penurunan Penerimaan Pajak Daerah berupa pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir sangat terpengaruh signifikan karena menurunnya aktivitas pariwisata di Kota Bogor. Berbagai kebijakan dan strategi telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor sebagai upaya untuk tetap mendorong penerimaan sector pajak daerah di masa pandemi, antara lain :

1. Memberikan Stimulus bagi Wajib Pajak di Kota Bogor yang jenis usahanya terkena dampak akibat Pandemi COVID-19, melalui penetapan peraturan Walikota sebagai berikut :
 - a. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penetapan Pembayaran Pajak Terhutang untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Sebagai Dampak Status Kejadian Luar Biasa Covid-19. Peraturan Wali Kota ini memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak, 4 (empat) jenis Pajak Daerah tersebut diatas, dalam pembayaran masa pajak bulan April, Mei, dan Juni 2020 jatuh tempo pembayaran pajaknya tidak dikenakan denda sanksi administrasi sampai tanggal 30 Juni 2020.



- b. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020 dan Penghapusan Sanksi Administrasi Tunggakan PBB P2 masa Pajak sampai dengan Tahun 2019 Sebagai Dampak Kejadian Luar Biasa COVID-19. Peraturan Wali Kota ini memberikan kemudahan bagi masyarakat yang memiliki Objek PBB P2 di Kota Bogor mendapatkan pengurangan ketetapan PBB P2 tahun 2020 dengan pembayaran masa pajak bulan April sebesar 15%, dan masa Pajak Bulan Mei sebesar 10%, serta masa Pajak di Bulan Juni sebesar 5%. Dan pembebasan pembayaran sanksi administratif tunggakan PBB P2 Sampai dengan tahun 2019.
 - c. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengurangan Pajak Terhutang BPHTB Tahun 2020 sebagai Dampak Status Kejadian Luar Biasa COVID-19 di Kota Bogor. Peraturan Wali Kota ini memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak BPHTB untuk mendapatkan pengurangan sebesar 10% untuk masa Pajak Bulan Mei dan Juni 2020.
2. Mendorong percepatan pemulihan sector ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19, terutama pemulihan dan penguatan pertumbuhan sector Jasa, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan tetap memperhatikan protocol kesehatan.
 3. Memantapkan Sistem dan Prosedur Operasional Pemungutan Pajak Daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi yang memberikan kemudahan pelayanan bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak di era adaptasi kebiasaan baru (AKB);
 4. Mengoptimalkan pendapatan asli daerah dengan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha, salah satunya melalui penataan reklame dan sebagainya.
 5. Mendorong inovasi dalam pengendalian aktivitas ekonomi masyarakat di era adaptasi kebiasaan baru untuk mempercepat pengembalian pertumbuhan ekonomi daerah.

Dari sisi belanja, berikut ini adalah gambaran realisasi belanja pada Tahun 2020-2021 berdasarkan struktur belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah, sebagaimana dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.14
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020-2021

	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021
BELANJA DAERAH	2.290.571.687.339,00	2.635.887.353.918,00
Belanja Operasi		
1. Belanja Pegawai	1.010.375.376.986,00	1.091.969.295.660,00
2. Belanja Bunga	5.427.749.091,00	4.047.853.424,00
3. Belanja Subsidi	-	-
4. Belanja Hibah	93.233.837.587,00	68.284.278.577,00
5. Belanja Bantuan Sosial	43.678.702.506,00	49.817.650.000,00
6. Belanja Barang & Jasa	798.213.394.942,00	981.669.499.791,00
Belanja Modal	276.157.283.029,00	418.698.367.423,00
Belanja Tak Terduga	62.350.812.198,00	21.400.409.034,00
Belanja Transfer		
1. Belanja Bagi Hasil		
2. Belanja Bantuan Keuangan	1.134.531.000,00	1.660.750.000,00

Sumber : diolah dari Laporan Keuangan Daerah tahun 2021

Dalam mengukur penilaian kinerja capaian keuangan dalam laporan ini dilakukan pengukuran kinerja keuangan terhadap Belanja yang mendukung pelaksanaan pencapaian Kinerja Pemerintah Kota Bogor. Berikut Pengukuran Kinerja Keuangan yang dihitung dengan membandingkan Pagu Anggaran dengan Realisasi yang mendukung setiap sasaran kinerja:

Misi 1. MEWUJUDKAN KOTA YANG SEHAT

No	Sasaran	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	505.812.232.912,00	499.118.874.598,00	98,68
2.	Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat	42.027.989.400,00	39.964.194.624,00	95,09
3.	Meningkatnya kualitas lingkungan sehat dikawasan perumahan dan pemukiman	178.424.222.023,00	109.948.818.301,00	61,62
4.	Terkendalinya sumber-sumber pencemar dan atau kerusakan lingkungan	28.295.339.600,00	26.004.012.086,00	91,90
5.	Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau publik perkotaan	25.910.150.740,00	24.074.503.449,00	92,92



Misi 2. MEWUJUDKAN KOTA YANG CERDAS

No	Sasaran	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pendidikan formal dan non formal	227.838.091.026,00	211.610.274.434,00	92,88
2.	Meningkatnya kualitas generasi muda (smart people)	18.721.552.460,00	17.783.425.316,00	94,99
3.	Meningkatnya kreativitas dan inovasi masyarakat	1.496.817.400,00	1.469.709.005,00	98,19
4.	Meningkatnya pemberdayaan, partisipasi, gotong royong, kerukunan, toleransi dan ketertiban masyarakat	49.767.803.190,00	46.983.931.955,00	94,41
5.	Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif dan akuntabel	1.473.324.800.505,00	1.367.496.399.928,00	92,82
6.	Meningkatnya layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (Smart City)	15.634.581.670,00	15.038.004.080,00	96,18

Misi 3 MEWUJUDKAN KOTA YANG SEJAHTERA

No	Sasaran	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Menurunnya tingkat pengangguran	2.257.021.800,00	2.118.122.874,00	93,85
2.	Menurunnya tingkat kemiskinan	3.896.321.800,00	1.958.227.820,00	50,26
3.	Meningkatnya ketahanan keluarga	1.552.105.400,00	568.348.500,00	36,62
4.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	55.756.645.673,00	42.657.538.823,00	76,87
5.	Meninya ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi	170.501.067.865,00	138.333.762.568,00	81,13
6.	Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur dan transportasi	79.186.895.888,00	67.111.007.739,00	84,75

Akuntabilitas kinerja keuangan juga mengukur tingkat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dalam mencapai sasaran kinerja. Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dengan hasil yang maksimal. Berikut capaian efisiensi pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

No	Sasaran	Rata-rata Capaian Kinerja ($\geq\%$)	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	99,81	98,68	1,13
2.	Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat	86,38	95,09	-8,71
3.	Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan pemukiman	99,36	61,62	37,74
4.	Terkendalinya sumber-sumber pencemar dan atau kerusakan lingkungan	122,91	91,90	31,01
5.	Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau publik perkotaan	108,54	92,92	15,62
6.	Meningkatkan pemerataan akses dan mutu pendidikan formal dan non formal	96,27	92,88	3,39



7.	Meningkatnya kualitas generasi muda (Smart People)	82,86	94,99	-12,13
8.	Meningkatnya kreativitas dan inovasi masyarakat	100	98,19	1,81
9.	Meningkatnya pemberdayaan, partisipasi, gotong rorong, kerukunan, toleransi dan ketentuan ketertiban masyarakat	104,65	94,41	10,24
10.	Terciptanya birokrasi pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel	95,71	92,82	2,89
11.	Meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (Smart City)	100	96,18	3,82
12.	Menurunnya tingkat pengangguran	106,5	93,85	12,65
13.	Menurunnya tingkat kemiskinan	83,97	50,26	33,71
14.	Meningkatnya ketahanan keluarga	115,14	36,62	78,52
15.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	87,16	76,87	-1,67
16.	Meningkatnya ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi	71,18	81,13	-9,95
17.	Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur dan transportasi	112,08	84,75	27,33



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Sebagian urusan tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan dari Pemerintah kepada pemerintah kota merupakan sebagian urusan pemerintahan di luar 6 (enam) urusan yang bersifat mutlak yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan Pemerintah. Sedangkan urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kota merupakan sebagian urusan pemerintahan yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan pemerintah provinsi.

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

Pada tahun 2021, Pemerintah Kota Bogor menerima Tugas Pembantuan yang didanai dari APBN. Adapun tugas pembantuan diberikan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 tentang Penugasan Bupati / Wali Kota dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan berupa Pasar Rakyat dan Gudang Non Sistem Resi Gudang yang di danai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, dimana Kota Bogor mendapatkan alokasi sebesar Rp.4.000.000,000,- dengan realisasi sebesar Rp.3.933.692.025,- untuk tipe Pasar D dengan Nama Pasar Tanah Baru.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri tentang Program dan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2021, yang merupakan pedoman bagi seluruh Bupati/Walikota kabupaten/Kota seluruh Indonesia yang akan mengajukan



Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan APBN pada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2021 di daerahnya, termasuk Kota Bogor yang telah melaksanakan tugas pembantuan sampai dengan selesai,

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

Pemerintah Kota Bogor tidak memiliki desa, sehingga tidak ada tugas pembantuan yang diberikan.



BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

a. Jenis Layanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Jenis layan dasar tersebut adalah:

1. Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Pendidikan Dasar; dan
3. Pendidikan Kesetaraan.

b. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Jumlah Target Capaian	Pembiayaan APBD/APBN (Rp)	Keterangan
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	50.20	8,575,124,624.00	Dinas Pendidikan Kota Bogor
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar 100 % Setiap Tahun -25- (SD/Mi, SMP/MTs)	100	95.50	151,759.391,729.00	Dinas Pendidikan Kota Bogor
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	3.39	12,146,160,000.00	Dinas Pendidikan Kota Bogor

c. Realisasi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi Capaian Tahun 2020 (%)	Realisasi Capaian Tahun 2021 (%)	Keterangan
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	51,09	50.20	Dinas Pendidikan Kota Bogor
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar 100 % Setiap Tahun -25- (SD/Mi, SMP/MTs)	101,29	95.50	Dinas Pendidikan Kota Bogor
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	0,7	3.39	Dinas Pendidikan Kota Bogor

d. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor pada Tahun 2021 dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Kota Bogor, adalah sebagai berikut :

- a. APBD Kota Bogor sebesar Rp 42,883,946,624.- (Empat Puluh Dua Miliar Delapan Puluh Delapan Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Rupah)
- b. APBN sebesar Rp 121,132,529,729.- (Seratus Dua Puluh Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah)



e. Dukungan Personil

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan, kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bogor adalah sebagai berikut :

No.	Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat/ Golongan	Pejabat Struktural	Pejabat Fungsional
1	3.191	S3 : 2 orang S2 : 197 orang S1 : 2.247 orang D3 : 27 orang D2 : 213 orang D1 : 23 orang SMA : 81 orang SMP : 16 orang SD : 16 orang	Gol IV : 1.412 orang, Gol III : 1.321 orang Gol II: 83 orang Gol I : 6 orang	Eselon II : 1 orang Eselin III : 5 orang, Eselon IV : 15..orang	Orang 2.822 (termasuk guru)

4.2 BIDANG URUSAN KESEHATAN

a. JENIS PELAYANAN DASAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bogor terdiri atas sebagai berikut:

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. Pelayanan kesehatan balita;
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;

7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

Fokus pelayanan yang diberikan bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif mencakup peningkatan kesehatan, perlindungan spesifik, diagnosis dini dan pengobatan tepat, pencegahan kecacatan dan rehabilitasi.

b. TARGET PENCAPAIAN SPM

Target capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan adalah 100% (seratus persen). Berikut rincian target indikator pencapaian SPM Bidang Kesehatan :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian	Pembiayaan APBD/APBN (Rp)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100	96.7%	161.254.050
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100	94.9%	113.221.400
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100	99.7%	41.025.000
4	Pelayanan Kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100	94.1%	29.838.600
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100	46.6%	138.198.420
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100	62.36%	165.294.906



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian	Pembiayaan APBD/APBN (Rp)
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100%	101.042.500
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	101.9%	38.227.200
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100	104.5%	12.642.000
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100	76.3%	28.706.000
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100	50.6%	27.464.000
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100	92.7%	126.106.500

c. REALISASI

No	Jenis Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi Capaian (2020)	Realisasi Capaian (2021)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	93.6%	96.7%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	93.1%	94.9%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	96.6%	99.7%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	78.8%	94.1%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Anak Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	51.0%	46.6%



No	Jenis Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi Capaian (2020)	Realisasi Capaian (2021)
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Usia Produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	18.8%	62.36%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	60.2%	100%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	68.8%	101.9%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Penderita Diabetes Melitus (DM)	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	88.5%	104.5%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Orang dengan ODGJ	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	88.4%	76.3%
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)	Orang dengan TB	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	104.1%	50.6%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang dengan terinfeksi HIV	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	95.7%	92.7%
Total Capaian (%)				78.14%	85.0%

d. ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor pada Tahun 2021 dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan oleh Pemerintah Kota Bogor, adalah sebagai berikut :

- a. APBD Kota Bogor sebesar Rp.1.114.080.200,- (satu milyar seratus empat belas juta delapan puluh ribu dua ratus rupiah)
- b. APBN sebesar Rp. 905.768.375,- (sembilan ratus lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan rincian : APBN DAK Fisik sebesar Rp. 738.389.575,- (tujuh ratus tiga puluh



delapan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dan APBD DAK Non Fisik (BOK) sebesar Rp. 167.378.800 (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)

Sehingga total keseluruhan Rp. 2.019.848.575,- (dua milyar sembilan belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan rincian :

No	Jenis Layanan Dasar	Sumber Dana	Pagu Anggaran (Rp.)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	APBD Kota Bogor	199.887.800
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		142.921.400
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		124.937.800
4	Pelayanan Kesehatan Balita		59.625.400
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	PBD Kota Bogor BOK	153.926.400
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	APBD Kota Bogor BOK	193.847.200
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	APBD Kota Bogor - BOK	101.733.200
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	APBD Kota Bogor BOK	40.912.200
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)		19.567.200
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat		30.143.400
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)	APBD Kota Bogor DAK Fisik - BOK	31.064.000 738.389.575
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	APBD Kota Bogor	182.893.000

e. DUKUNGAN PERSONIL

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Urusan kesehatan, kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bogor (Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah) adalah sebagai berikut :

No	Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat/ Golongan	Pejabat Struktural	Pejabat Fungsional
1	<p><u>PNS</u> : 714 orang</p> <p><u>Non PNS</u> : 171 orang</p> <p>Jumlah : 885 orang</p>	<p><u>PNS</u></p> <p>S2 : 41 orang</p> <p>S1 : 266 orang</p> <p>D4 : 23 orang</p> <p>D3 : 349 orang</p> <p>D1 : 1 orang</p> <p>SMA/ sederajat : 31 orang</p> <p>SMP : 3 orang</p> <p>Jumlah : 714 orang</p>	<p>Gol IV : 142 orang</p> <p>Gol III : 415 orang</p> <p>Gol II : 156 orang</p> <p>Gol I : 1 orang</p> <p>Jumlah : 714 orang</p>	<p>Es. II : 1 orang</p> <p>Es. III : 5 orang</p> <p>Es. IV : 29 orang</p> <p>Jumlah : 35 orang</p>	<p><u>PNS</u></p> <p>Dinas : 35 orang</p> <p>Puskesmas dan Labkesda : 671 orang</p> <p>Jumlah : 706 orang</p>

f. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Berikut disampaikan permasalahan dan solusi untuk indikator SPM Bidang Kesehatan Tahun 2021 yang tidak memenuhi target 100%, yaitu sebagai berikut :

No	Jenis Layanan Dasar	Capaian (%)	Permasalahan	Solusi
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	96.7%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian target tahun 2021 belum terpenuhi karena kondisi pandemi dimana pelayanan posyandu ditutup, sehingga ibu hamil harus ke puskesmas untuk pemeriksaan kehamilan yang jaraknya cukup jauh dari rumah. 2. Angka Kematian Ibu 102.37 per 100.000 KH, terjadi lonjakan karena adanya ibu hamil terkonfirmasi Covid-19 dan meninggal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi pembukaan posyandu sesuai protokol kesehatan dan melakukan pencatatan dan pelaporan dengan baik 2. Mengaktifkan WAG untuk memantau kondisi ibu hamil 3. Dilakukan skrining PCR untuk ibu hamil di usia kehamilan 35-36 minggu dan pada bumil yang kontak erat dan suspek



No	Jenis Layanan Dasar	Capaian (%)	Permasalahan	Solusi
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	94.9%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian target tahun 2021 belum terpenuhi karena Saat pandemi covid-19 kapasitas layanan persalinan di fasilitas kesehatan berkurang akibat banyaknya nakes yang terkonfirmasi Covid-19 2. Belum semua puskesmas mampu melakukan upaya pertolongan persalinan karena kendala ruangan yang tidak ada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan update data ibu bersalin 2. Merevisi target karena kota Bogor memiliki 25 puskesmas dengan puskesmas yang mampu melakukan pelayanan persalinan sebanyak 17 puskesmas
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	99.7%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian target tahun 2021 belum terpenuhi karena kondisi pandemi dimana pelayanan Posyandu tutup sehingga bayi baru lahir harus ke puskesmas untuk pemeriksaan bayi yang jaraknya cukup jauh dari rumah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi pembukaan kembali posyandu dan mengaktifkan WAG untuk memantau kondisi bayi baru lahir
4	Pelayanan Kesehatan Balita	94.1%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi pandemi dimana pelayanan posyandu tutup sehingga ibu balita harus ke puskesmas untuk periksa kesehatan balita yang jaraknya cukup jauh dari rumah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi pembukaan kembali posyandu, kelas balita dan mengaktifkan WAG untuk memantau kondisi balita
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	46.6%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekolah belum melaksanakan pembelajaran tatap muka, sehingga petugas kesehatan kesulitan untuk melakukan skrining secara langsung. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjaringan kesehatan anak sekolah dilakukan secara online dengan mengisi <i>google form</i> oleh masing-masing orang tua siswa 2. Pengisian <i>google form</i> dibuat lebih sederhana sehingga mudah diisi oleh orangtua/siswa

No	Jenis Layanan Dasar	Capaian (%)	Permasalahan	Solusi
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	62.36%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi pandemik yang menyebabkan Posbindu PTM tidak dapat dilaksanakan. 2. Tidak tersedianya reagen pemeriksaan kadar gula darah pada tahun 2021, sehingga pemeriksaan skrining tidak dapat dilakukan sesuai standar. 3. Usia produktif berada di tempat kerja dan sekolah, sedangkan pada masa Pandemi masyarakat pekerja melakukan WFH dan pelajar melakukan pembelajaran jarak jauh, sehingga sulit untuk dijangkau. 4. Kegiatan di Posbindu PTM baru dapat berjalan pada bulan Oktober-Desember. 5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan skrining kesehatannya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat memeriksakan kesehatan dirinya secara rutin, dan pengisian status kesehatan secara mandiri melalui on line. 2. Memenuhi kebutuhan SDM Kesehatan, Kader PTM terlatih, dan sarana prasarana seperti penyediaan sistem informasi perangkat keras untuk pencatatan pelaporan dengan berbasis NIK, sehingga dapat dipastikan tidak terjadi double counting dalam pencatatannya, juga diharapkan keterpaduan sistem pencatatan dan pelaporan kesehatan baik dari sarana pemerintah maupun dari sarana kesehatan swasta (sistem data satu pintu) 3. Skrining usia produktif dilakukan dengan pendekatan Posbindu PTM di masyarakat maupun di tempat tempat kerja dan sekolah, dengan melatih kader kesehatan di Posbindu PTM.
7	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	76.34%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian target tahun 2021 belum terpenuhi karena kondisi Pandemi Covid 19 membuat kegiatan kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan ditiadakan sementara, kecuali untuk kondisi darurat. 2. Pelayanan Pasien ODGJ di masa pandemi hanya dilakukan di puskesmas. 3. Jumlah kunjungan untuk kontrol/terapi obat bagi pasien ODGJ di masa pandemi Covid-19 untuk beberapa pasien menjadi kurang teratur menyebabkan kondisi kekambuhan kembali pada ODGJ atau putus obat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan SDM dalam kemampuan pelayanan ODGJ sesuai standar, menyediakan media KIE 2. Meningkatkan peran serta masyarakat, lintas program dan lintas sektor dalam melaksanakan kesehatan jiwa, dan melakukan pendampingan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial (DKJPS) baik untuk orang sehat, orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK) dan orang dengan gangguan kesehatan jiwa (ODGJ)



No	Jenis Layanan Dasar	Capaian (%)	Permasalahan	Solusi
8	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	50.6%	1. Capaian target tahun 2021 belum terpenuhi karena masih pasifnya skrining terduga TBC	1. Investigasi kontak ke indeks kasus
9	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	92.7%	1. Capaian target tahun 2021 belum terpenuhi dikarenakan masih adanya pandemi Covid-19, banyak SDM layanan HIV yang sudah dilatih di mutasi atau promosi.	1. Ilmu yang didapatkan dari SDM layanan yang telah dimutasi atau rotasi disosialisasikan kepada SDM yang baru.

4.3 BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

SPM Pekerjaan Umum terdiri dari:

1. Jenis Pelayanan Dasar;
2. Mutu Pelayanan Dasar;
3. Penerima Pelayanan Dasar.

SPM Pekerjaan Umum mencakup SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

i. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.

a. Jenis pelayanan dasar pada Pemerintah Daerah Provinsi terdiri atas:

- 1) Pemenuhan kebutuhan Air Minum sehari-hari;
- 2) Penyediaan pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota

b. Jenis pelayanan dasar pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- 1) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
dan;

2) Penyediaan pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik

Jenis Pelayanan dasar sebagaimana Standar Pelayanan Minimal untuk Sub Urusan Air Limbah Domestik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses pengolahan air limbah domestik bagi warga negara.

Mutu Pelayanan Dasar

Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

- a. Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
 - 1) Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) Mutu Pelayanan Dasar pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Penerima Pelayanan Dasar

- a. Penerima Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas:
 - 1) Penyelenggara sistem penyediaan air minum oleh



badan usaha milik daerah dan unit pelaksana teknis daerah pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang menjadi penerima Air Minum Curah lintas kabupaten/kota; dan

- 2) Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.
- b. Penerima Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
- 1) Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum;
 - 2) Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

d. Target Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Jumlah Target Capaian 2021 (%)	Pembiayaan APBD/APBN (Rp)	Perangkat Daerah
1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	100	89,48	1.545.775.160	Dinas PUPR Kota Bogor
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	100	66,86	8.105.996.494	Dinas PUPR Kota Bogor

f. Realisasi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi Capaian Tahun 2020 (%)	Realisasi Capaian Tahun 2021 (%)	Keterangan
1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari Kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	76,92	83,88	PDAM/JP: 68,49 % Non PDAM/BJP: 15,34 %
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	71,50	77,90	(69,91% akses layak, 5,21 % akses aman)

g. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor pada Tahun 2021 dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang oleh Pemerintah Kota Bogor, adalah sebagaiberikut:



1. Urusan Air Minum:

- a. DAK Fisik Bidang Air Minum melalui APBD Kota Bogor dari target keuangan sebesar Rp. 1.545.775.160,- (Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah), dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.545.683.860,- (Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah). Untuk mendukung perencanaan yang baik, maka dimulai tahun ini dilakukan pendataan *by name by address* terhadap warga yang menggunakan air minum baik itu dari Jaringan Perpipaan maupun Bukan Jaringan Perpipaan sesuai dengan amanat Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat.

Sementara ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor masih terus berupaya menyempurnakan data rumah tangga yang terlayani air minum baik dari Jaringan Perpipaan maupun Bukan Jaringan Perpipaan. Edukasi dan Sosialisasi terkait pentingnya akses air minum yang aman terus dilakukan bersama-sama dengan *stakeholder* lainnya.

Mengingat sub kegiatan yang terkait dengan pengelolaan air minum Bukan Jaringan Perpipaan tidak termasuk kedalam sub kegiatan yang dilaksanakan di kawasan perkotaan, maka pada tahun ini tidak ada kegiatan konstruksi untuk pengembangan dan penambahan sambungan rumah untuk sumber air yang dikelola oleh masyarakat, hal ini dalam rangka pencapaian target akses aman air minum perkotaan.

- b. Keberhasilan pencapaian ini sangat tergantung dari faktor-faktor kunci sebagai berikut:

- 1) Adanya dukungan dari berbagai stakeholder terhadap pelaksanaan pengelolaan air minum di Kota Bogor salah satunya melalui sub kegiatan Pengembangan Jaringan Distribusi Dan Sambungan Rumah di kawasan perkotaan.
 - 2) Penambahan jumlah pelanggan yang dikelola oleh PERUMDA Tirta Pakuan Kota Bogor, apalagi secara umum dalam 5 tahun kedepan PDAM bertekad untuk mencapai target 100-0-100 serta meningkatkan kualitas pelayanan baik yang menyangkut aspek teknis seperti kualitas, kuantitas, dan kontinuitas serta aspek pengelolaan yang lebih transparan dengan tata kelola perusahaan yang baik dalam mewujudkan pelayanan prima kepada pelanggan.
 - 3) Melakukan pemicuan dan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat penerima manfaat akan pentingnya pengelola air minum yang baik dan sehat sehingga masyarakat terhindar dari penyakit yang ditimbulkan dari air.
 - 4) Mencari sumber pendanaan lainnya selain dari dana pemerintah, seperti melalui dana CSR yang diperuntukkan bagi sumber air bersih yang dikelola oleh kelompok masyarakat untuk sub kegiatan optimalisasi dan penambahan sambungan rumah sesuai dengan standar dari PERUMDA Tirta Pakuan sehingga dapat dipenuhi kedalam capaian akses aman air minum Kota Bogor.
 - 5) Secara teknis PERUMDA Tirta Pakuan juga harus mendapat jaminan ketersediaan air baku dari instansi yang berwenang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diwujudkan dengan surat izin perusahaan air baku (SIPA).
- c. Berdasarkan pada faktor-faktor kunci tersebut di atas, maka harapan dan dukungan sangat dibutuhkan dari berbagai stakeholder untuk terlaksananya pengelolaan air minum di Kota Bogor, diantaranya:
- 1) Penyadaran perubahan perilaku masyarakat dan promosi layanan



- 2) Kebijakan pendanaan maupun penagihan tarif pelanggan
- 3) Dukungan dari berbagai *stakeholder* dan masyarakat
- 4) Dukungan pendanaan
- 5) Jaminan Ketersediaan Air Baku
- 6) Dukungan aspek legalitas yang mendukung tercapainya akses aman air minum di Kota Bogor

2. Urusan Air Limbah :

- a. DAK Fisik Bidang Sanitasi salah satunya urusan air limbah domestik melalui APBD Kota Bogor dan dari APBD murni pada Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Bogor dari target keuangan sebesar Rp. 8.105.996.494 (Delapan Milyar Seratus Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah), dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.545.683.860,- (Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah).
- b. Mulai tahun ini dilakukan pendataan *by name by address* terhadap warga yang menggunakan air limbah domestik sesuai dengan amanat Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendapatkan perencanaan yang baik.
- c. Sementara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor masih terus berupaya menyempurnakan data rumah tangga yang terlayani air limbah domestik.
- d. Edukasi dan Sosialisasi terkait pentingnya pengelolaan air limbah domestik terus dilakukan bersama-sama dengan *stakeholder* lainnya.

- e. Keberhasilan pencapaian ini sangat tergantung dari faktor-faktor kunci sebagai berikut:
- 1) Adanya dukungan dari berbagai *stakeholder* terhadap pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik di Kota Bogor salah satunya melalui sub kegiatan:
 - a) Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
 - b) Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
 - c) Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat
 - d) Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
 - e) Penyediaan Sarana Pengangkut Lumpur Tinja
 - f) Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT
 - g) Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT
 - 2) Meningkatkan kualitas pengelolaan air limbah domestik berarti meningkatkan kualitas penyehatan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
 - 3) Meningkatkan nilai manfaat secara ekonomis dengan pelaksanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik melalui Pengambil kebijakan secara umum dan mempertimbangkan nilai manfaat secara ekonomi dalam menempuh prioritas kegiatan pembangunan.
 - 4) Meningkatkan institusional layanan air limbah domestik kepada UPTD Pengelolaan Air Limbah sebagai operator, sehingga diharapkan terjadi peningkatan



kompetensi dan kapasitas baik itu sumberdaya manusia, manajemen operasi aset, manajemen pelanggan dan manajemen pendapatan, kolaborasi dengan kelompok manajemen masyarakat dan sektor swasta.

- 5) Menjamin efektivitas dan keberlanjutan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yaitu: peraturan, perencanaan, pengawasan, pembinaan lembaga operator (intitusi) dan kebijakan terhadap subsidi biaya dan retribusi pelanggan.
- 6) Melakukan pemicuan dan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat penerima manfaat akan pentingnya sistem pengelolaan air limbah domestik.
- 7) Mencari sumber pendanaan lainnya selain dari dana pemerintah, seperti melalui dana CSR yang diperuntukkan bagi sistem pengelolaan air limbah domestik yang dikelola oleh kelompok masyarakat, sehingga adanya keberlanjutan program pembanguna.

f. Berdasarkan pada faktor-faktor kunci tersebut di atas, maka harapan dan dukungan sangat dibutuhkan dari berbagai stakeholder untuk terlaksananya pengelolaan air minum di Kota Bogor, diantaranya:

- 1) Penyadaran perubahan perilaku masyarakat dan promosi layanan sistem pengelolaan air limbah domestik
- 2) Kebijakan pendanaan maupun retribusi pelanggan layanan air limbah domestik
- 3) Dukungan dari berbagai *stakeholder* dan masyarakat
- 4) Dukungan pendanaan
- 5) Dukungan aspek legalitas yang mendukung

tercapainya akses aman air limbah domestik di Kota Bogor

6) Program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT)

7. Dukungan Personil

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas PUPR Kota Bogor adalah sebagai berikut :

No	Jumlah ASN	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat/Golongan	Pejabat Struktural	Pejabat Fungsional
1	18 orang	S3 : - orang S2 : - orang S1 : 6 orang D3 : 5 orang D2 : - orang D1 : - orang SMA: 16 orang SMP : 3 orang SD : 3 orang	Gol IV : 2 orang, Gol III : 26orang Gol II : 3 orang Gol I : - orang	Eselon II : 1 orang Eselon III : 2 orang, Eselon IV : 2 orang	- 2 orang

8. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi	Recana Tindak lanjut
Perencanaan Data dasar penerima manfaat yang belum lengkap (by name by address)	Identifikasi dan inventarisasi data dasar penerima manfaat SPM di Kota Bogor	Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota.
Pendanaan Untuk kegiatan air minum dan air limbah domestik membutuhkan dana yang sangat besar/tinggi	Mencari sumber dana lainnya selain dari Pemerintah, dana CSR, Lembaga Keuangan Mikro, Baznas	Penyusunan Perencanaan Pengajuan proposal dan kelengkapan persyaratan (<i>Readiness Criteria</i>) untuk pengajuan ke APBN, DAK, APBD Provinsi, sumber dana lainnya.



C. Lain-lain		
1. Ketersediaan air baku yang semakin menipis.	Mencari sumber air baku lainnya.	Penambahan sumber air baku (mata air dan sungai). Konservasi sumber air minum
2. Pengembangan layanan pipa untuk jaringan air minum.	Pengembangan jaringan pipa pelayanan air minum.	1.Penambahan kapasitas dan cakupan layanan air minum
3. Pengembangan layanan air limbah domestik..	Pengembangan jaringan pipa pelayanan air limbah domestik.	1.Penambahan kapasitas dan cakupan layanan air limbah domestik.
4. Ketersediaan lahan untuk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) baik itu SPALDT Skala Permukiman maupun SPALDS Skala Komunal	Penyediaan lahan hibah dan lahan fasos fasum untuk pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) baik itu SPALDT Skala Permukiman maupun SPALDS Skala Komunal	2.Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman.
		1.Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
		2.Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat

4.4 BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

a. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jenis Layanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bogor terdiri dari :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kota

b. Target Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Jumlah Target Capaian	Pembiayaan APBD/APBN (Rp)	Perangkat Daerah
1.	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	165	4.744.549.330	Dinas Perumkim Kota Bogor
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	Tidak ada program kab/kota		Dinas Perumkim Kota Bogor

c. Realisasi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian Tahun 2020 (%)	Target Capaian Tahun 2021 (%)	Keterangan
1.	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	84.85%	Jumlah terlayani sebanyak 140 unit dari 165 unit terdampak bencana yang sesuai ketentuan pelayanan SPM
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	-	Tidak ada pelaksanaan program pemerintah Kota Bogor pada tahun 2021



Realisasi capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat sebesar 84.85% dicapai melalui uraian lebih lanjut. Jumlah rumah terdampak bencana sejumlah 165 unit rumah dan yang mendapat pelayanan sebanyak 140 unit rumah. Dari jumlah tersebut sebanyak 133 unit mendapatkan fasilitas rehabilitasi atau perbaikan terhadap rumah terdampak bencana dan 7 keluarga mendapat subsidi uang sewa. Subsidi uang sewa yang diberikan dalam bentuk fasilitas unit di rusunawa milik Pemerintah Kota Bogor kepada korban terdampak bencana sebanyak 2 keluarga, dan sisanya sebanyak 5 keluarga bantuan sewa untuk di lokasi lain.

Jumlah unit rumah terdampak yang belum terlayani pada tahun 2021 sebanyak 25 unit direncanakan untuk ditangani di tahun 2022 sampai 2023.

d. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor pada Tahun 2021 dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman oleh Pemerintah Kota Bogor sebesar Rp. 4.744.549.330,-

Anggaran tersebut berasal dari program kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Perumahan sebesar Rp. 1,737,349,330,-
- b. Bantuan Sosial Tidak Terencana sebanyak Rp. 3.000.000.000,-
- c. Pelayanan fasilitasi unit rusun di rusunawa Kota Bogor untuk korban bencana sebanyak 2 (dua) unit atau setara Rp.7.200.000,- (*Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*) selama satu tahun

e. Dukungan Personil

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang adadi lingkungan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bogor adalah sebagai berikut :

No.	Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat/Golongan	Pejabat Struktural	Pejabat Fungsional
1.	7 Orang	S2 : 2 Orang SMA : 5 Orang	Gol III : 2 Orang Gol II : 5 Orang	Eselon III : 1 orang Eselon IV : 1 orang	

f. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat pada program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bogor terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

- Masih belum akurat dan faktualnya data mengenai jumlah rumah yang terkena bencana di Kota Bogor dan bantuan yang diterima korban.
Data rumah yang terkena bencana paling utama berasal dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor. Namun demikian ada perbedaan kriteria dalam menentukan rumah yang terkena bencana. Data dari BPBD harus kembali diseleksi karena tidak seluruh laporan yang masuk merupakan rumah terkena bencana yang dapat ditindaklanjuti sebagai pemenuhan SPM.
- belum adanya turunan aturan tingkat daerah yang mengatur teknis pelaksanaan SPM Perumahan Rakyat
- Keterbatasan anggaran Pemerintah Kota Bogor untuk menangani rehabilitasi rumah korban terkena bencana sehingga tidak semua rumah terdampak dapat direhabilitasi pada tahun yang sama.
- Kekurangakuratan data rumah terdampak juga menimbulkan dampak tekenanya refocusing anggaran pada sub kegiatan yang menangani perbaikan rumah terdampak bencana

b. Solusi

Solusi yang tepat untuk permasalahan yang diperoleh adalah sebagai berikut:



- Meningkatkan level koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang menangani bencana sehingga dapat diperoleh informasi jumlah kejadian dan jenis layanan langsung yang diberikan kepada korban terdampak
- Membentuk satgas SPM untuk pelayanan rehabilitasi rumah terdampak bencana sehingga dapat diperoleh tindak lebih lanjut yang lebih cepat

Menyusun dasar peraturan untuk mengatur teknis pelaksanaan SPM berupa petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis pelayanan SPM bidang perumahan rakyat yang dapat dijadikan acuan untuk aparat wilayah dalam membantu tugas Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor

4.5 BIDANG URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

a. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, jenis pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bogor terdiri dari :

- a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. pelayanan informasi rawan bencana;
- c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- e. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- f.

b. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Pembiayaan APBD/APBN (Rp)
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100	100	21.000.000
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100	200.000.000
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	167.838.000
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	583.534.400
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100	100	142.808.600



c. Realisasi

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi Capaian Tahun 2021 (%)	Realisasi Capaian Tahun 2021 (%)	Keterangan
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Masyarakat	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100	100	Satpol PP Kota Bogor
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Masyarakat	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100	BPBD Kota Bogor
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Masyarakat	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	BPBD Kota Bogor
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Masyarakat	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	BPBD Kota Bogor
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Masyarakat	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100	100	Satpol PP Kota Bogor

d. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor pada Tahun 2021 dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat oleh Pemerintah Kota Bogor, adalah sebagai berikut :

- 1) APBD Kota Bogor sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah);
- 2) APBN, tidak ada; dan
- 3) Sumber dana lain yang sah, tidak ada.

Alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor pada Tahun 2021 dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub Urusan Bencana oleh Pemerintah Kota Bogor, adalah sebagai berikut:

- 1) 1.970.825.000, - (Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 2) APBN, tidak ada; dan
- 3) Sumber dana lain yang sah, tidak ada.

Alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor pada Tahun 2021 dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub Urusan Kebakaran oleh Pemerintah Kota Bogor, adalah sebagai berikut :

- 1) APBD Kota Bogor sebesar Rp. 58.073.600,- (Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah);
- 2) APBN, tidak ada; dan
- 3) Sumber dana lain yang sah, tidak ada.

Alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor pada Tahun 2021 dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub Urusan Bencana oleh Pemerintah Kota Bogor, adalah APBD Kota Bogor sebesar Rp.6.855.092.314.

e. Dukungan Personil

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota



Bogor Sub Urusan ketenteraman, ketertiban umum adalah sebagai berikut :

No.	Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat/Golongan	Pejabat Struktural	Pejabat Fungsional
1	213 orang	S3 : 0 orang S2 : 7 orang S1 : 35 orang D4 : 3 orang D3 : 2 orang D1 : 0 orang SMA : 155 orang SMP : 9 orang SD : 2 orang	Gol IV : 3 orang Gol III : 68 orang Gol II : 141 orang Gol I : 1 orang	Eselon II : 1 orang Eselon III : 4 orang, Eselon IV : 9 orang	Fungsional Satpol PP 173 ang

Kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor adalah sebagai berikut :

No.	Jumlah ASN	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat/Golongan	Pejabat Struktural	Pejabat Fungsional
1	18 orang	S3 : - orang S2 : 2 orang S1 : 7 orang D3 : - orang D2 : - orang D1 : - orang SMA : 11 orang SMP : - orang SD : - orang	Gol IV : 2 orang, Gol III : 7 orang Gol II : 9 orang Gol I : - orang	Eselon II : - orang Eselon III : 1 orang, Eselon IV : 4 orang	- orang

Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Sub Urusan Kebakaran adalah sebagai berikut :

No.	Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat/Golongan	Pejabat Struktural	Pejabat Fungsional
1	60 Orang	S3 : 0 orang S2 : 1 orang S1 : 7 orang D3 : 0 orang D2 : 0 orang D1 : 0 orang SMA : 41 orang SMP : 9 orang SD : 2 orang	Gol IV : 2 orang Gol III : 7 orang Gol II : 46 orang Gol I : 5 orang	Eselon II : orang Eselon III : 1 orang, Eselon IV : 3 orang	-

f. Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

Secara keseluruhan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun anggaran 2021 berjalan dengan baik tanpa adanya permasalahan yang berarti yang menghambat pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, hal ini terlihat dari realisasi fisik dan keuangan dari pelaksanaan program dan kegiatan mencapai 96,8% meskipun ada beberapa kegiatan yang tidak mencapai target yang ditetapkan, Kasus Pandemi Covid-19 yang memerlukan perhatian khusus terutama dalam hal pengawasan penerapan protokol kesehatan, sehingga menyebabkan Tupoksi Sat Pol PP menjadi bertambah, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masih mengalami kendala dan permasalahan antara lain :

1. Adanya pandemi Covid 19 menyebabkan refocusing anggaran yang berpengaruh pada target rencana kerja yang sudah disusun tahun sebelumnya.
2. Adanya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) menyebabkan ada beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena melibatkan masyarakat sebagai target sasarannya.
3. Masih rentannya perekonomian masyarakat, lapangan kerja dan pendapatan masyarakat yang rendah dan adanya urbanisasi



- penduduk dari berbagai daerah sehingga perilaku masyarakat menyimpang dari norma sosial dan ketertiban umum.
4. Pembangunan fisik yang tidak sesuai dengan kebijakan daerah, ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
 5. Keberadaan PKL yang mengganggu ketertiban umum dengan menggunakan badan jalan dan trotoar serta jalur hijau.
 6. Keterbatasan daya tampung tempat di Kota Bogor dengan adanya keberadaan PKL.
 7. Banyak Anjal dan Gepeng yang beberapa kali terkena razia, tipiring kembali beroperasi di jalan karena tindak lanjut dan kurang optimalnya pembinaan.
 8. Tidak adanya regenerasi anggota Linmas yang sudah usia lanjut dan masih dipandang rendah oleh masyarakat sehingga generasi muda tidak mau untuk menjadi anggota Linmas
 9. SDM personil yang masih terbatas (hampir separuh belum mengikuti Diklatsar Sat.Pol.PP dan Pemadam Kebakaran)
 10. Jumlah PPNS yang belum memadai
 11. Sarana gedung masih belum representatif untuk mendukung kegiatan dan belum adanya pos damkar di setiap kecamatan.
 12. Minimnya dukungan anggaran untuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
 13. Rendahnya antusias dan kepedulian warga ketika dilakukan sosialisasi dan mitigasi bencana. Mereka menganggap bahwa kejadian banjir ataupun longsor yang terjadi merupakan hal yang sudah biasa terjadi. Sehingga pada saat terjadi bencana masyarakat tidak siap dan baru mencari informasi penanggulangan terhadap bencana yang terjadi.
 14. Lokasi rawan bencana biasanya terjadi pada jalur Infeksi sungai yang merupakan fasilitas Umum/fasum. Sehingga tidak ada izin kepemilikan secara resmi. Hal ini menjadi masalah saat pemberian bantuan tempat tinggal sementara saat terjadinya bencana.

15. Dalam hal terjadi bencana BPBD Kota Bogor hanya dapat membantu tahap awal penanganan bencana berupa logistik seperti makanan siap saji dan paket kebutuhan sekolah (tas, buku, seragam). Untuk meminimalisir dampak lebih lanjut BPBD Kota Bogor memberikan alat bantu sementara berupa terpal.
16. Kurangnya SDM dan Peralatan Rescue. Jumlah ASN pada Badan Penanggulangan Bencana Kota Bogor sampai tahun 2021 hanya 18 Orang termasuk pejabat Struktural. Hal ini menjadi kendala mitigasi dan penanganan kebencanaan. Selain itu BPBD Kota Bogor juga belum ditunjang dengan peralatan rescue yang lengkap.
17. Upaya penanganan bersama antara Pemerintah dan Pemda melalui realokasi dan refocusing anggaran belanja APBN dan APBD TA 2021 untuk penanganan pandemi dan dampak Covid-19, sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

b) Solusi

Dalam rangka mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor ada beberapa solusi yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Pemantauan kegiatan sosial masyarakat dan peningkatan kinerja penegakan trantibum linmas, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
2. Melaksanakan pengawasan/monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik.
3. Disediakkannya relokasi terhadap para PKL pasca dilaksanakannya penertiban.
4. Pemerintah Kota Bogor perlu memiliki Panti Rehabilitasi untuk pembinaan kepada anjal dan gepeng di kota bogor.
5. Perlunya regenerasi anggota Linmas yang masih produktif untuk direkrut menjadi anggota Linmas.
6. Mengikut sertakan personil Satpol.PP dan Pemadam Kebakaran yang belum memiliki keterampilan pada Diklatsar yang dilaksanakan oleh Bandiklat Provinsi ataupun Pusat.



7. Penambahan jumlah PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor, melalui Diklat PPNS yang dilaksanakan oleh Bandiklat Pusat yang bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia.
8. Untuk menunjang tugas pokok dan fungsi perlu dibangun gedung kantor yang representatif yang di desain secara khusus dan perlunya pembangunan dan penambahan Pos Damkar yang sesuai standar disetiap kecamatan untuk menunjang respon time penanganan kebakaran.
9. Penambahan anggaran bidang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, mengingat urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan **pelayanan dasar**, sesuai undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal, peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018 tentang satuan polisi pamong praja, permendagri nomor 121 tahun 2018 tentang standar teknis mutu pelayanan dasar sub urusan ketentraman dan ketertiban umum di provinsi dan kabupaten/kota.
10. BPBD terus melakukan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana berupa penyuluhan, pelatihan dan simulasi secara langsung maupun tidak langsung (melalui web, twiter, istagram, dan WhatsApp).
11. Untuk korban yang tempat tinggalnya rusak permanen/tidak dapat ditinggali BPBD menyediakan tempat tinggal sementara (kontrakan rumah max 3 bulan) dengan syarat ada dokumen kepemilikan yang sah terhadap rumah yang rusak parah.
12. Mengidentifikasi penilaian kerusakan (*assesment*) Untuk penanganan bantuan fisik bangunan (perbaikan bronjong, tembok penahan tanah dan bangunan rumah) dan membantu merekomendasikan dengan OPD teknis.
13. Rekrutmen relawan Non PNS dan menambah peralatan untuk penanggulangan bencana.

4.6 BIDANG URUSAN SOSIAL

a. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.

a. Jenis Pelayanan

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah kabupaten/kota terdiri atas :

1. Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti:
2. Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di luar panti:
3. Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti:
4. Rehabilitasi sosial dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti:
5. Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

b. Kriteria penerima pelayanan dasar tersebut diatas, antara lain;

1. Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar dengan kriteria :
 - 1) Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya,
 - 2) Tidak terpelihara,
 - 3) Tidak terawat dan tidak terurus ;
 - 4) Masih ada perorangan, keluarga dan/atau masyarakat yang mengurus;
2. Tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis dengan kriteria :
 - 1) Perseorangan atau kepala keluarga berusia 19 – 60 tahun ;
 - 2) Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya ;
 - 3) Tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus ;
 - 4) Tidak memiliki tempat tinggal tetap;
 - 5) Masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli;



- 6) Rehabilitasi dilakukan terhadap Kepala Keluarga, istri/suami dan anaknya.
3. Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat tanggap darurat per satu kali kejadian bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota dengan kriteria :
 - 1) Jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) orang;
 - 2) Dampak bencana meliputi 1 (satu) daerah kabupaten/kota; dan atau
 - 3) Adanya surat penetapan bencana dari bupati/wali kota.

Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Target pencapaian SPM oleh daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 adalah 100 % (seratus persen) selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan.

Berdasarkan data PMKS/PPKS yang ada pada Dinas Sosial Tahun 2021, Jumlah sasaran garapan yang termasuk kedalam objek sasaran SPM adalah sebagaimana tertuang dalam tabel halaman berikut :

Tabel 4.1
Data PMKS/PPKS Sasaran Garapan SPM Sosial
Tahun 2020– 2024

No.	JENIS PMKS/PPKS	Eksisting 2021	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Disabilitas Terlantar	75 orang	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Anak Terlantar	61 orang	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.	Lanjut Usia Terlantar	300 orang	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.	Gelandangan dan Pengemis	86 orang	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5.	Data Bencana	2.000 jiwa	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan tabel tersebut, data eksisting 2021 adalah merupakan populasi PPKS yang akan menjadi sasaran intervensi dengan target per tahun sebesar 100% sebagaimana ketentuan yang ditetapkan. Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah populasi paling sedikit adalah jumlah Anak Terlantar sebanyak 61 orang. Sedangkan jumlah terbesar adalah Gelandangan Pengemis yaitu 86 orang dengan indikator : Perseorangan atau kepala keluarga berusia 19-60 tahun (termasuk istri/suami dan anaknya), tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus dan tidak memiliki tempat tinggal tetap .

Adapun rumusannya adalah : Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti selama 1 (satu) tahun anggaran dibagi populasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti dikali 100% (seratus persen).

Untuk Tahun 2021 adalah merupakan tahun ke 3 didalam pencapaian target SPM berdasarkan indikator baru dengan target tahunan ditetapkan sebesar 100 (seratus) %. Di Tahun ini Dinas Sosial menentukan populasi dari jumlah populasi terdalam sesuai dengan arahan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Didalam perhitungan anggaran, karena Program Kegiatan Tahun 2021 masih mengacu pada Program Kegiatan dan Sub Kegiatan, sehingga didalam alokasi anggaran tidak bersifat spesifik seperti disabilitas, gelandangan dan pengemis, melainkan disesuaikan dengan sasaran garapan yang termasuk kedalam kategori PMKS secara global, namun demikian materi dari SPM tetap menyatu didalam program dan kegiatan tersebut.

Selengkapnya mengenai target SPM Sosial Tahun 2021 adalah sebagaimana tabel pada halaman berikut :

Tabel 4.2

Target Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan SPM	Target (%)	Pembiayaan (Rp.)	Ket
1	Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti	100	228.776.600	APBD
2	Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di luar panti	100	44.441.600	APBD
3	Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti	100	24.000.000	APBD
4	Rehabilitasi sosial dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti	100	81,743,800	APBD
5	Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kab/Kota	100	356.092.400	APBD
	JUMLAH		735,054,400	APBD

Berdasarkan tabel tersebut diatas, diketahui bahwa alokasi anggaran untuk SPM di Kota Bogor hanya berdasarkan anggaran dari APBD Kota Bogor saja , dan hal ini menunjukkan bahwa kemampuan APBD Kota Bogor masih sangat terbatas.

c. Realisasi

Tabel 4.3

Realisasi capaian SPM Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan SPM	Sub Kegiatan dalam SPM	Nama Program/Kegiatan	Jenis Bantuan Yang diterima
1.	Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti	1. Layanan data dan pengaduan	1. Program Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas Dan Trauma , dengan kegiatan : a. Bimbingan Sosial, Fisik, Mental dan Pelatihan Keterampilan Kewirausahaan bagi Disabilitas	Pemutakhiran data dan penerimaan layanan pengaduan
		2. Layanan kedaruratan		Fasilitasi ke sistim sumber/Balai Rehabilitasi
		2. Penyediaan permakanan		Makan di Rumah Singgah
		3. Penyediaan sandang		Perlengkapan pakaian di Rumah Singgah
		4. Penyediaan Alat Bantu		Kursi roda
		5. Penyediaan perbekalan kesehatan		Fasilitasi ke Faskes/layanan SKTM
		6. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial		Fasilitasi ke Balai rehabilitasi
		7. Pemberian Bimbingan sosial sosial kepada keluarga Penyandang disabilitas terlantar		-Edukasi terhadap psikologi kepada keluarga disabilitas
		8. Fasilitasi pembuatan NIK, Akteu kelahiran, Surat Nikah dan KIA		-Memfasilitasi KIA
		9. Akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar		Koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Kesehatan
		10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga dan/atau		Membantu menghubungkan/ mempertemukan dengan keluarganya
11. Pemberian pelayanan reunifikasi	Pemulangan/ pengantaran kepada			



No	Jenis Pelayanan SPM	Sub Kegiatan dalam SPM	Nama Program/Kegiatan	Jenis Bantuan Yang diterima
		keluarga		keluarga klien
		12. Layanan rujukan		Membantu penanganan pemberian Rujukan keterkaitan terlantar/ Fasilitas membawa ke RS keterkaitan kesehatan
2.	Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di luar panti	1. Layanan data dan pengaduan	1. Program Pembinaan Anak Terlantar, dengan kegiatan : a. Penanganan Anak Terlantar dan Proses Adopsi Anak Terlantar	Pemutakhiran data dan penerimaan layanan pengaduan
		2. Layanan kedaruratan		Fasilitasi ke sistim sumber/Balai Rehabilitasi
		3. Penyediaan permakanan		Makan di Rumah Singgah
		4. Penyediaan sandang		-
		5. Penyediaan Alat Bantu		-
		6. Penyediaan perbekalan kesehatan		Fasilitasi ke Faskes/layanan SKTM
		7. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial		-
		8. Pemberian Bimbingan sosial kepada keluarga Anak Terlantar		-
		9. Fasilitasi pembuatan NIK, Akteu kelahiran, Surat Nikah dan KIA		Memabntu memfasilitasi KIA dan Akte
		10. Akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar		Koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Kesehatan terkait pelayanan kebutuhan dasarnya
		11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga dan/atau		Fasilitasi bersama Sakti Peksos dan TKSK
		12. Pemberian pelayanan reunifikasi		Fasilitasi bersama Sakti Peksos dan TKSK

No	Jenis Pelayanan SPM	Sub Kegiatan dalam SPM	Nama Program/Kegiatan	Jenis Bantuan Yang diterima
		keluarga		
		13. Lay.Rujukan		Fasilitasi bersama Sakti Peksos
3.	Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti	1. Layanan data dan pengaduan	1. Program Program Pemberdayaan Fakir Miskin , Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya, dengan kegiatan : a. Pemberdayaan Lanjut Usia Terlantar	Pemutakhiran data dan penerimaan layanan pengaduan
	2. Layanan kedaruratan	Fasilitasi ke sistim sumber/Balai Rehabilitasi		
	3. Penyediaan permakanan	Makan di Rumah Singgah , Home Care		
	4. Penyediaan sandang	Perlengkapan Pakaian di Rumah Singgah		
	5. Penyediaan Alat Bantu	Kursi roda		
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan	Fasilitasi ke Faskes/layanan SKTM		
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial	Pelayanan Home Care		
	8. Pemberian Bimbingan sosial sosial kepada keluargaPenyandang disabilitas terlantar	Pelayanan Home Care		
	9. Fasilitasi pembuatan NIK, Akteu kelahiran, Surat Nikah dan KIA	--		
	10. Akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Kesehatan		
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga dan/atau	Pemulangan/ pengantaran kepada keluarga klien		
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Pelayanan Home Care		
	13. Layanan rujukan	Pelayanan Home Care		



No	Jenis Pelayanan SPM	Sub Kegiatan dalam SPM	Nama Program/Kegiatan	Jenis Bantuan Yang diterima
4.	Rehabilitasi sosial dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti	1. Layanan data dan pengaduan	b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, dengan kegiatan : a. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Pemutakhiran data dan penerimaan layanan pengaduan
		2. Layanan kedaruratan		Fasilitasi ke sistim sumber/Balai Rehabilitasi
		3. Penyediaan permakanan		-
		4. Penyediaan sandang		-
		5. Penyediaan Alat Bantu		-
		6. Penyediaan perbekalan kesehatan		-
		7. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial		Assesment pendahuluan
		8. Pemberian Bimbingan sosial sosial kepada keluargaPenyandang disabilitas terlantar		-
		9. Fasilitasi pembuatan NIK, Akteu kelahiran, Surat Nikah dan KIA		-
		10. Akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar		Koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Kesehatan
		11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga dan/atau		Fasilitasi bersama sakti peksos
		12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		Fasilitasi bersama sakti peksos / Pemulangan/pengantaran kepada keluarga klien
		13. Layanan rujukan		Fasilitasi ke sistim sumber
5.	Perlindungan dan Jaminan sosial pada	1. Layanan data dan pengaduan	1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin ,	Pemutakhiran data dan penerimaan layanan



No	Jenis Pelayanan SPM	Sub Kegiatan dalam SPM	Nama Program/Kegiatan	Jenis Bantuan Yang diterima
	saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kab/Kota		Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya dengan kegiatan : a. Pemberdayaan an Taruna Siaga Bencana dalam Penanggulangan Bencana	pengaduan
		2. Layanan kedaruratan		Fasilitasi ke sistim sumber/Balai Rehabilitasi
		3. Penyediaan permakanaan		Natura
		4. Penyediaan sandang		Perlengkapan laki dan perempuan
		5. Penyediaan Alat Bantu		Perlengkapan kebencanaan
		6. Penyediaan perbekalan kesehatan		Kerjasama dengan Puskesmas/RSU
		7. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial		Refungsionalisasi pasca bencana
		8. Pemberian Bimbingan sosial sosial kepada keluarga yang terkena bencana		Refungsionalisasi fisik, mental dan sosial pasca bencana
		9. Fasilitasi pembuatan NIK, Akteu kelahiran, Surat Nikah dan KIA		-
		10. Akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar		-
		11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga dan/atau		Fasilitasi bersama Sakti Peksos, Tagana dan TKSK
		12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		Fasilitasi bersama Sakti Peksos, Tagana dan TKSK
		13. Layanan rujukan		Fasilitasi ke sistim sumber



Capaian SPM Bidang Sosial pada Tahun 2021 adalah :

a. Rehabilitasi sosial dasar **Penyandang Disabilitas Terlantar** di luar panti ;

1) Jumlah penyandang disabilitas terlantar teridentifikasi pada tahun 2021 sebanyak 75 orang ;

2) Jumlah Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial luar panti sebanyak = 75 orang

3) Perhitungan :

Persentase penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial di luar panti	=	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial di luar panti	x 100%
		Populasi Penyandang Disabilitas di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	

4) Nilai capaian : $75 / 75 \times 100\% = 100 \%$

b. Rehabilitasi sosial dasar **Anak Terlantar** di luar panti :

1) Jumlah Anak Terlantar pada tahun 2021 sebanyak 61 orang ;

a) Yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial keseluruhan adalah 61 orang

b) Perhitungan :

Persentase Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial di luar panti	=	Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial di luar panti	x 100%
		Populasi Anak Terlantar di daerah Kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	

5) Nilai capaian : $61 / 61 \times 100\% = 100 \%$

c. Rehabilitasi sosial dasar **Lanjut Usia Terlantar** di luar panti ;

- 1) Jumlah Lanjut Usia Terlantar keseluruhan sebanyak 300 orang
- 2) Perhitungan :

Persentase Lansia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial di luar panti	=	Jumlah Lansia Terlantar di Kota Bogor Sesuai Atensi/ Pengaduan pelayanan rehabilitasi sosial di luar panti	x 100%
		Jumlah Lansia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial di luar panti	

- 3) Nilai capaian : $300 / 300 \times 100\% = 100\%$

d. Rehabilitasi sosial dasar **Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis** di luar panti ;

- 1) Jumlah Gelandangan dan Pengemis pada tahun 2021 sebanyak 86 orang ;
- 2) Yang telah dibina berupa assesment awal sebanyak 86 orang
- 3) Perhitungan :

Persentase Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial di luar panti	=	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial di luar panti	x 100%
		Populasi Gelandangan dan Pengemis sesuai atensi/Pengaduan/ Penjangkauan di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	

- 4) Nilai capaian : $86 / 86 \times 100\% = 100\%$

e. **Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kab/Kota**

- 1). Jumlah korban bencana alam pada Tahun 2021 sebanyak 2.000 Jiwa ;
- 2). Perhitungan :



Rumusan Baru :

Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	=	Jumlah Korban Bencana alam dan sosial daerah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	X 100
		Populasi Korban Bencana alam dan sosial daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	

3). Nilai capaian : $2000 / 2000 \times 100\% = 100 \%$

Selengkapnya realisasi capaian SPM Sosial pada Tahun 2021 sebagaimana tertuang pada tabel halaman berikut :

Tabel 4.4

Evaluasi Penerapan SPM sesuai PP 2 Tahun 2018

No	Jenis Pelayanan SPM	Target (%)	Realisasi (%)	Ket
1	Pelayanan Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan di luar panti	100	100	TERCAPAI
2	Pelayanan Rehabilitasi sosial anak terlantar dan di luar panti	100	100	TERCAPAI
3	Pelayanan Rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar di luar panti	100	100	TERCAPAI
4	Pelayanan Rehabilitasi sosial tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100	100	TERCAPAI
5	Perlindungan dan Jaminan sosial bagi korban bencana pada saat tanggap darurat dan pasca bencana	100	100	TERCAPAI

Berdasarkan tabel tersebut diatas terlihat bahwa capaian SPM Dinas Sosial Kota Bogor tercapai semua meskipun pada indicator indicator penunjang masih ada beberapa yang tidak tercapai .

d. Alokasi Anggaran

Tabel 4.5
Alokasi Anggaran Sumber Dana APBD Kota Bogor

No	Jenis Pelayanan SPM Bidang Sosial	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Ket (Realisasi) %
1	Pelayanan Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas Dan Trauma	228.776.000	228.776.000	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Program Pembinaan Anak Terlantar	44.441.600	42.643.600	95,95%
3	Perlindungan dan Jaminan sosial bagi korban bencana pada saat tanggap darurat dan pasca bencana	Program Penanganan Benacna Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota (Penyediaan makanan)	356.092.400	296.291.900	83,21%
4	Pelayanan Rehabilitasi sosial tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial	81.743.800	75.518.800	89,94%
5	Pelayanan Rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar di luar panti	Program Pemberdayaan Fakir Miskin , Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	26.182.400	25.382.400	96,94%
	JUMLAH		735.054.400	664.612.700	88,25%



Dari tabel tersebut diketahui bahwa anggaran APBD-P yang mendukung SPM Tahun 2021 sebesar sebesar Rp. **735.054.400,-** dan terealisasi sebesar Rp. **664.612.700,-** atau **88,25%** % realisasinya

5. Dukungan Personil

Pegawai Dinas Sosial Kota Bogor pada Awal Tahun 2021 yang berstatus PNS sebanyak 43 orang .

Untuk Pegawai Non PNS sebagai Mitra Dinas Sosial terdiri dari :

- 1) Pendamping PKH di 6 kecamatan sebanyak 67 orang
- 2) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 6 Orang;
- 3) Satuan Bakti Pekerja Sosial 1 orang;
- 4) Pendamping Disabilitas 1 orang;
- 5) Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) BPNT 1 orang ;
- 6) Taruna Siaga Bencana (TAGANA) 84 orang ;
- 7) Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 2 orang;

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

- Permasalahan interen yang dihadapi meliputi kurangnya fasilitas pendukung terkait penanganan Disabilitas terlantar, Lansia Terlantar dan Gelandangan, Pengemis terlantar dalam penanganan membantu fasilitas kesehatan seperti mobil ambulan, dan mobil penjakuan serta mobil untuk pengantran/ reunifikasi kepada keluarga dan alat kebutuhan penunjang lainnya.
- Kebutuhan terhadap pengadaan sandang dan kebutuhan dasar keterkaitan penanganannya untuk klien dalam penanganan rehabsos seprti (pempers, underpad, Pakaian satu stell, kasur medis)

- Belum adanya rumah singgah yang layak dan mampu menangani perlindungan dasar dan pemenuhan dasar bagi orang terlantar.
- Permasalahan interen yang dihadapi meliputi kurangnya jumlah tenaga ahli di bidang Pekerjaan Sosial yang berlatar belakang disiplin ilmu Pekerjaan Sosial dan secara langsung berhadapan dengan orang-orang yang bermasalah sosial. Jumlah tenaga pendamping lapangan baik PKH, Tagana, Sakti Peksos dan TKSK belum bisa berperan secara optimal mengingat sasaran garapannya belum sebanding dengan jumlah para pendamping yang ada.
- Diluncurkannya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dialihkan menjadi bantuan SEMBAKO yang realisasi capaiannya dilaporkan setiap bulan telah menambah tugas pokok TKSK dilapangan sehingga tugas pokok dan fungsi utama seringkali terabaikan.
- Secara eksternal terdiri dari permasalahan penanganan gelandangan psikotik yang masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, diantaranya :
 - 1) Belum adanya regulasi penanganan gelandangan psikotik secara khusus sebagai dasar pelaksanaan tugas di lapangan;
 - 2) Saling kirim antar wilayah perbatasan tetap terjadi dan seolah-olah belum ada penyelesaian yang jelas;
 - 3) Belum adanya instalasi jiwa secara khusus pada RSUD Kota Bogor untuk penampungan sementara ODGJ;
 - 4) Persediaan anggaran yang maksimal untuk penanganan gelandangan psikotik hingga ybs dikatakan sembuh belum teralokasikan;
- Untuk penanganan masalah sosial dengan sumber dana dari APBD masih sangat terbatas karena perhatian pemerintah daerah saat ini lebih focus pada penanganan fakir miskin baik di perkotaan maupun pedesaan dengan jumlah sasaran yang semakin meningkat.

Solusi untuk menangani hal-hal tersebut yang bisa dilakukan saat ini adalah meningkatkan koordinasi baik dengan Pemerintah Provinsi maupun Pusat terutama dalam hal pengadaan stok kebencanaan maupun program perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan masyarakat yang



bersifat rehabilitasi sosial, karena di Kota Bogor tidak terdapat Panti Rehabilitasi, maka upaya kita adalah memfasilitasi para PPKS untuk di rehabilitasi ke Panti-panti milik Pemerintah Pusat maupun Provinsi.



BAB V PENUTUP

Alhamdulillah patut kita syukuri situasi kehidupan ekonomi, politik, sosial dan budaya sepanjang tahun 2021 di Kota Bogor berlangsung sangat kondusif dan sangat mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Bogor. Hampir dapat dikatakan tidak ada kejadian atau peristiwa yang menghambat, merusak atau dapat mengganggu kehidupan bermasyarakat.

Secara umum pembangunan di Kota Bogor berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari capaian-capaian kinerja yang tertuang dalam BAB –BAB sebelumnya. Adapun program serta indikator yang masih belum tercapai akan menjadi evaluasi bersama sebagai pijakan untuk penyelenggaraan perencanaan dan pembangunan yang lebih baik di Tahun mendatang. Mudah-mudahan di akhir pelaksanaan RPJMD 2019-2024, semua target yang ditetapkan dapat dituntaskan dengan sinergi dan kolaborasi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

A. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Pemerintah Kota Bogor melaksanakan tugas umum penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Tugas umum tersebut dilaksanakan berdasarkan azas desentralisasi dan kewenangan otonom yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.

Tugas umum yang dilaksanakan terdiri dari kerjasama antar daerah, kerjasama dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana, pengelolaan kawasan khusus, serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Berikut uraian penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Bogor sepanjang tahun 2021.

1. Kerjasama Antar Daerah

Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat menjalin kerjasama dengan daerah lain, pihak ketiga dan atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada efisiensi dan efektivitas pelayanan publik

serta saling menguntungkan. Ketentuan itu tertuang di dalam pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Sedangkan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah (menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah.

Kerjasama antar daerah merupakan sarana untuk memantapkan hubungan dan keterikatan antara daerah yang satu dengan yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, dan mensinergikan potensi antar daerah. Dengan memperhatikan esensi penyelenggaraan kerjasama termaksud maka kebijakan kerjasama antar daerah diarahkan pada peningkatan kerjasama untuk menciptakan sinergitas antar kabupaten dan kota, baik yang dilaksanakan secara bilateral maupun regional sesuai dengan arah kebijakan pembangunan kewilayahan .

Adapun kerjasama antar daerah yang dijalin pada tahun 2019-2024 dan masih berlaku sampai dengan tahun 2021 adalah sebanyak 13 kerjasama yaitu:

1. Perjanjian Kerja Sama Nomor 130/KK.30-Bag. Adekon & KS/2019 antara Walikota Bogor dengan Bupati Tasikmalaya tentang Kerja Sama antar daerah dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
2. Perjanjian Kerja Sama Nomor 119/PKS.28-Disparbud/2021 Ridwan Kamil, gubernur Jawa Barat dengan Bima Arya, Walikota Bogor tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.
3. Perjanjian Kerja Sama Nomor 591/Perj.90-BKAD/2017 antara Walikota Bogor dengan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pinjam Pakai barang milik Pemerintah Kota Bogor berupa tanah yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan Kel. Kebon Kelapa Kec. Bogor Tengah dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
4. Perjanjian Kerja Sama Nomor 658.1/Perj.140-DLH/2020 antara Ade Yasin dengan Bima Arya tentang Pengelolaan Tempat Pembuangan



- Akhir Sampah (TPAS) Galuga di Desa Galuga Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
5. Perjanjian Kerja sama Nomor 119/Perj.117-DiskUMKM/2016 antara Yuniar Yanuar Rasyid,Ak., MM. dengan Dr. Bima Arya tentang Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
 6. Perjanjian Kerjasama 591/Perj.50-BPKAD/2016 antara Ahmad Heryawan dengan Dr. Bima Arya tentang tentang Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan di jalan raya pajajaran Nomor 121 Bogor dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
 7. Kesepakatan Bersama Nomor 130/KK.30-Bag. Adekon antara H.Ade Sugianto, Kabupaten Tasikmalaya dengan Bima Arya, Walikota Bogor tentang Smart City dan E-Government, Ekonomi Kreatif, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kebudayaan dan Pariwisata, dan Ketahanan Pangan dan Pertanian
 8. Kesepakatan Bersama Nomor 119/KK.67-Bag.Adekon/2019 antara Ade Yasin, Kabupaten Bogor dengan Bima Arya, Walikota Bogor tentang Kerja Sama antar Daerah dalam Pelayanan Publik dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
 9. Kesepakatan Bersama Nomor 119/KK.7-Bag.Pem/2020 antara Herdiat Sunarya, Kabupaten Ciamis dengan Bima Arya, Walikota Bogor tentang Kerja Sama Pembangunan antar Daerah Kota Bogor dan Kabupaten Ciamis dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
 10. Kesepakatan Bersama Nomor 119/KB.18-Bag.Pem/2021 antara Aras Tammauni, Bupati Mamuju Tengah dengan Bima Arya, Wali Kota Bogor tentang Penyelenggaraan transmigrasi di Kabupaten Mamuju Tengah dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
 11. Kesepakatan Bersama Nomor 119/KK.19-Bag.Pem/2020 antara Harnojoyo, Walikota Palembang dengan Bima Arya, Walikota Bogor tentang Kerja Sama Pembangunan dan Teknologi Informasi dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
 12. Kesepakatan Bersama Nomor 119/KB.56-Bag.Pem/2021 antara Marwan Hamami, Bupati Sukabumi dengan Bima Arya, Wali Kota Bogor tentang

Kerja Sama Pembangunan antar Daerah Kabupaten Sukabumi dengan Kota Bogor dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun.

13. Perjanjian Kerja Nomor 119/PKS.62-DPUPR/2021 antara Yusmada Faizau, Kepala Dinas Sumber Daya Air Provindi DKI Jakarta dengan Chusnul Rozaqi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor tentang Kerja Sama Pembangunan dan Teknologi Informasi Penyediaan dan Pengelolaan Alat Ukur Curah Hujan Otomatis di Wilayah Kota Bogor.

2. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Berdasarkan Pasal 366 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, bahwa kerja sama daerah dengan pihak ketiga meliputi kerjasama dalam penyediaan pelayanan publik; kerjasama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah; kerjasama investasi; dan kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada pertimbangan efisien, efektivitas, pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan.

Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga, dikembangkan berdasarkan pemenuhan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi langsung oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan karena berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh masing-masing daerah otonom.

Sepanjang Tahun 2021 kerjasama antara Pemerintah Kota Bogor dengan pihak ketiga terbagi menjadi :

- (1) 63 dokumen Perjanjian Kerja Sama di berbagai bidang dan ruang lingkup Pelayanan Publik di Kota Bogor.
- (2) 38 dokumen Kesepakatan Bersama.



Tabel 5.1
Daftar Dokumen Perjanjian Kerja Sama

No.	Tanggal	Subyek Kerja Sama	Keterangan
1	06-01-2021	Pembangunan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) dan Penyelenggaraan Reklame Pada JPO	PT. Divaintan Putri Pratama
2	06-01-2021	Jaminan Kesehatan Daerah	RSCM
3	22-01-2021	Pelaksanaan Bantuan Bagi Masyarakat Miskin	LBH Sinar Asih
4	01-02-2021	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Universitas Muhammadiyah Jakarta
5	05-02-2021	Bantuan Iuran bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Kelas III Penduduk Kota Bogor	BPJS
6	11-02-2021	Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Terdik di SMP dalam POP Kemendagri	Pengurus yayasan YP
7	11-02-2021	Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Terdik di SMP dalam POP Kemendagri	Yayasan Ludere Nusantara Gemilang
8	15-02-2021	Penegakan Hukum Protokol Kesehatan pandemic Covid-19 Kota Bogor	Kapolresta Bogor Kota
9	16-02-2021	Penyelenggaraan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan bagi ASN yang tidak cakap Jasmani dan Rohani di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor	RSUD CIAWI
10	04-03-2021	Pinjam Pakai Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk Penanganan dan Perawatan Pasien Covid-19 Tanpa Gejala atau Gejala Ringan Asal Kota Bogor	BPKP
11	26-03-2021	Hibah Tanah untuk pembangunan BIRR	PT BIS



12	26-03-2021	Hibah Tanah untuk pembangunan BIRR	PT GAP
13	26-03-2021	Hibah Tanah untuk pembangunan BIRR	PT GNA
14	05-04-2021	Pelayanan Non Perizinan di Mal Pelayanan Publik Kota Bogor	BPJS Kesehatan
15	05-04-2021	Pelayanan Pertanahan pada Mal Pelayanan Publik Kota Bogor	Kantor Pertanahan
16	14-04-2021	Pemanfaatan Fasilitas kartu ATM dan Debet Co Branding	PT BJB
17	30-04-2021	Dukungan Pengembangan kapasitas kelembagaan melalui Pendidikan Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat	Universitas Indonesia
18	19-05-2021	Sinergi Pengembangan UMKM Kota Bogor melalui Aplikasi Bogor Hitz	PT Bawa Indonesia Global
19	25-05-2021	Pengembangan Ekonomi Kreatif	Provinsi Jawa Barat
20	03-06-2021	Pinjam Pakai Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP untuk Pnanganan dan Perawatan	Pusdiklat BPKP Ciawi
21	07-06-2021	Program Pemberdayaan UMKM dan Kewirausahaan di Kota Bogor	Dekan FEB Universitas Bina Niaga
22	07-06-2021	Pembinaan dan Pemberdayaan UMKM dan Kewirausahaan di Kota Bogor	Dekan FIK universitas Bina Niaga
23	10-06-2021	Pembelajaran, Kajian dan pengembangan IKM	LPPM IBI Kesatuan
24	17-06-2021	Pemberdayaan UMKM di Kota Bogor	LPPM STIE GICI
25	21-06-2021	Pembangunan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) dan Penyelenggaraan Reklame pada Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) di Jalan Pajajaran	PT RAGTA DEA



26	01-07-2021	Pemanfaatan Pinjam Pakai Gedung Asrama Mahasiswa IPB Untuk Penanganan dan Perawatan Pasien Covid 19 tanpa Gejala/Gejala Ringan	Rektor IPB
27	06-07-2021	Pemberian Fasilitas Kredit Bagi ASN dan PKWT	Bank Kota Bogor
28	06-07-2021	Proyek Percontohan Urban-Leeds II dengan Judul Pemanfaatan Gas Metana dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT) Skala Pemukiman di Kelurahan Sindangsari	Yayasan ICLEI Indonesia
29	19-07-2021	Penyelenggaraan Pengoperasian Angkutan Umum Perkotaan dengan Skema Pembelian Layananan/Buy The Service (BTS) di Kota Bogor	BPTJ Kemenhub
30	30-07-2021	Addendum Pelaporan Data Kinerja kepada Pemda dalam rangka Monev Pelaksanaan Program JKN	BPJS Kesehatan
31	02-08-2021	Penyediaan dan Pemanfaatan Aplikasi CitiGov sebagai Kanal Pelayanan Publik Online	Cartenz
32	26-08-2021	Aksi Bersama untuk Kota Bogor sebagai bagian Plastic Smart Cities	Yayasan WWF
33	10-09-2021	Program Semai Benih Bangsa Melalui Kegiatan Peningkatan kualitas Gutu untuk Mebnagun Tumbuh kembang dan Karakter Siswa PAUD/TK sebagai Model Pendidikan Holistik Berbasis Karakter (PHBK)	IHF
34	10-09-2021	Pemberian Fasilitas Kredit bagi ASN dan PKWT di Lingkungan Pemkot Bogor	Bank Kota Bogor
35	23-09-2021	Addendum UHC	BPJS
36	29-09-2021	Implementasi Konservasi SDA pada Kawasan Imbuhan Mata Air di Kabupaten Bogor	Burhanuddin
37	01-10-2021	Jaminan Kesehatan Daerah	RSDA Nuraida
38	01-10-2021	Jaminan Kesehatan Daerah	RSUD Kota Bogor



39	13-10-2021	Revitalisasi Jembatan Penyebrangan Orang dan Penyelenggaraan reklame pada JPO jalan Pajajaran	PT Indomedia
40	26-10-2021	Program Magang, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Fakultas Vokasi Universitas Pakuan
41	29-10-2021	Pemanfatatan Pinjam Pakai gedung Asrama Mahasiswa IPB untuk Penanganan Pasien Covid-19 Tanpa gejala dan Gejala Ringan	Rektor IPB
42	29-10-2021	Uji Coba Pengelolaan Sampah TPA Galuga	PT Plustik
43	17-11-2021	Pelaksanaan Kegiatan Inkubator Bisnis dan Pengabdian kepada Masyarakat	Politeknik AKA
44	26-11-2021	Pelayanan Pembuatan KK, Akta Kelahiran dan KIA	RS UMMI Bogor
45	26-11-2021	Pelayanan Pembuatan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rumah Sakit Umum Kota Bogor
46	26-11-2021	Pelayanan Pembuatan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RSKIA Sawojajar
47	26-11-2021	Pelayanan Pembuatan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sakit Hermina Bogor
48	26-11-2021	Pelayanan Pembuatan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rumah Sakit AZRA
49	26-11-2021	Pelayanan Pembuatan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rumah Sakit Mulia Pajajaran
50	26-11-2021	Pelayanan Pembuatan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Mayapada Hospita
51	26-11-2021	Pelayanan Pembuatan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rumah Sakit Ibu dan Anak
52	26-11-2021	Pelayanan Pembuatan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rumah Sakit PMI Bogor
53	26-11-2021	Pelayanan Pembuatan KK, Akta Kelahiran dan KIA	Rumah Sakit Islam Bogor



54	26-11-2021	Pelayanan Pembuatan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rumah Sakit Vania
55	02-12-2021	Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)	Dekan Fakultas Farmasi Universitas 17 Agustus 1945
56	16-12-2021	Pemasangan Blma Tapping Apps	PT Bima Sakti Alterra
57	23-12-2021	Penyelenggaraan Janinan Kecelakaan Kerja dan Jaminan kematian bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota bogor	PT TASPEN (PERSERO) Kantor Cabang Bogor
58	23-12-2021	Pengelolaan Kawasan Kuliner Bogor	Sakola Kopi
59	27-12-2021	Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Daerah Kota Bogor	Manager PLN
60	29-12-2021	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk dan Peserta Aktif Terdaftar di Fasilitas Kesehatan kesehatan tingkat Pertama Kota Bogor dalam Rangka Mencapai UHC	BPJS Kesehatan
61	28-12-2021	Penyelenggaraan Tri Dharma PT MBKM dan Praktek kerja Profesi Apoteker	Dekan FMIPA Universitas Pakuan
62	31-12-2021	Pinjam Pakai gedung Pusdiklatwas BPKP untuk Penanganan dan Perawatan Pasien Covid-19 Tanpa Gejala dan Gejala Ringan asal Bogor	Pusduklatwas BPKP
63	31-12-2021	Jaminan Kesehatan Daerah	RSKBP

Tabel 5.2
Daftar Dokumen Kesepakatan Bersama

No.	Tanggal	Subyek Kerja Sama	Keterangan
1	01-03-2019	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat	Akademi Kebidanan Prima Husada Bogor
2	01-03-2019	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat	Universitas Ibn Khaldun Bogor
3	01-03-2019	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat	Universitas Nasional
4	01-03-2019	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat	Universitas Respati
5	01-03-2019	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat	Poltekkes Kemenkes Jakarta III
6	01-03-2019	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat	Poltekkes Kemenkes Bandung
7	02-01-2019	Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan Inovasi di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pusat Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
8	03-02-2020	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penataan Transportasi Dalam Jaringan	PT. Aplikasi Anak Bangsa dan PT Dompot Anak Bangsa
9	10-02-2020	Kerja Sama Pelayanan serta Sarana dan Prasarana Angkutan	PUPPD
10	13-02-2019	Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Penyuluh Pertanian Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertanian
11	21-02-2019	Penyelenggaraan, Pengembangan, pemanfaatan data dan Informasi Geospasial Di Kota Bogor	Badan Informasi Geospasial



12	26-02-2020	Pengembangan Ekonomi Sosial	Seameo Biotrop
13	04-03-2021	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Universitas Binaniaga Indonesia
14	04-03-2021	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	STIE GICI
15	26-03-2021	Kerja Sama Pembangunan BIRR	PT Suryamas Dutamakmur
16	20-04-2021	Pembangunan Kota Bogor Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian dan Pengembangan Inovasi	Universitas Ibn Khaldun Bogor
17	21-04-2019	Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan Pasar Daring (Online Marketplace) Bukalapak	PT. BUKALAPAK. COM
18	29-04-2019	Persertipikatan tanah, penanganan permasalahan aset tanah dan pengintegrasian data pertanahan dengan perpajakan daerah.	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat
19	30-04-2021	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Universitas Nusa Bangsa
20	07-05-2019	Peningkatan Pembangunan	Universitas Pakuan
21	07-05-2019	Kerja Sama penataan kampung wisata pulo geulis kelurahan babakan pasar kecamatan bogor tengah kota Bogor.	Politeknik Negeri Jakarta dan Panorama Group
22	12-06-2020	Penyediaan dan Pemanfaatan Aplikasi Jejak	PT Cartenz Tekno Lab
23	11-07-2019	Pertumbuhan UMKM	PT Jiva Samudra Biru
24	19-07-2019	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Bogor
25	29-07-2019	Kerjasama penyaluran dan pendampingan bantuan untuk warga miskin di Kota Bogor	YBM PLN



26	03-08-2021	Pendidikan, Penelitian Pelayanan dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Universitas Pertahanan
27	25-08-2020	Kawasan Inovasi Teknologi Pertanian	Balitbangtan Kementan RI
28	01-09-2021	Kerja Sama Perluasan Digitalisasi Pelayanan Publik Kota Bogor	PT. Ayopop Teknologi Indonesia
29	20-09-2021	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	STIA Menarasiswa
30	21-09-2020	Penataan Kawasan PKL	PT. Tirta Fresindo Jaya (Mayora Group)
31	24-09-2020	Penjajakan Kerja Sama Digitalisasi Pembayaran	PT Fintek Karya Nusantara
32	25-09-2019	Rencana Kerja Sama penataan Transportasi dan Peningkatan Pelayanan Publik di Kota Bogor	PT Grab
33	28-09-2019	Pengembangan Ekonomi Dgital dan pelayanan Publik	PT Tokopedia
34	28-09-2019	Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi di Wilayah Kota Bogor	PT PNM
35	8-10-2021	Tridharma Perguruan Tinggi	Poltek AKA Bogor
36	19-10-2021	Pengembangan Kepariwisata Melalui Uji Kompetensi Bai Tenaga Kerja Industri Pariwisata di Kota Bogor	Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata Nusantara
37	13-12-2019	Pengembangan Model Pembayaran JKN-KIS	Kantor BPJS Kesehatan
38	28-12-2020	Penyelesaian Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	Kejaksaan Negeri Kota Bogor



B. Penghargaan Kota Bogor Tahun 2021

Tahun 2021 tercatat 45 penghargaan diterima Pemerintah Kota Bogor dalam kaitan kinerja dan kiprah seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Salah satunya adalah keberhasilan Pemerintah Kota Bogor meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kelima kali untuk Laporan Keuangan Daerah tahun 2020 yang diserahkan di tahun 2021.

Berikut daftar lengkap ke-45 penghargaan yang diterima pemerintah di tahun 2021:

1. Penghargaan Kapabilitas APIP Level 3 dari BPKP kepada Inspektorat Kota Bogor
2. Penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK keberhasilan mereduksi sampah
3. Penghargaan BPR Award 2021 untuk Perumda BPR Bank
4. Penghargaan Pelayanan Publik dari Kemenpan RB kepada DPMPTSP Kota Bogor
5. Penghargaan Pelayanan Publik dari Kemenpan RB diraih oleh Disdukcapil Kota Bogor
6. Juara 3 Perencanaan Daerah di Musrenbang Jawa Barat
7. Pemkot Bogor Berhasil Pertahankan Peringkat SAKIP dan RB
8. Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri terkait Satpol PP sebagai Pundak Penegak Perda
9. Predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK untuk Kelima Kali
10. Terbaik ke- III Kategori Pemerintah Daerah Terbaik Digitalisasi Ekonomi Daerah
11. Terbaik ke IV Untuk Kota IHK (Indeks Harga Konsumen) Dalam Pengendalian Inflasi.
12. Penghargaan Kota Layak Anak Tingkat Madya untuk ke-Tiga Kali
13. Penghargaan Lencana Teladan dari Kwarnas untuk 15 Anggota Pramuka Kota Bogor
14. Penghargaan Peringkat III BKN Award 2021
15. Penghargaan APE 2020 Kategori Madya

16. 2 (dua) Juara Terbaik Cloud Computing Club Competition Kwarda Jabar untuk Pramuka Kota Bogor
17. Penghargaan sebagai daerah pembina Program Kampung Iklim (Proklim) Utama Tingkat Nasional tahun 2021 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
18. RW 13, Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor menjadi lokasi Program Kampung Iklim Kategori Utama.
19. Penghargaan sertifikat Program Kampung Iklim Kategori Madya yang diberikan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, Laksmi Dhewanthi yang berlokasi di RW 10 Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur.
20. Penghargaan Raksa Prasada penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) kategori terbaik kabupaten/kota tingkat provinsi Jawa Barat tahun 2021.
21. Peringkat Ketiga Nasional Debitur Terbaik Kemenkeu
22. Penghargaan Anugerah Meritokrasi Kategori Sangat Baik terkait Komitmen Perbaikan Manajemen ASN
23. Penghargaan PERPAMSI Awards 2021 diraih oleh Perumda Tirta Pakuan
24. Penghargaan Aplikasi SOLID terkait Top Inovasi Jawa Barat yang diciptakan oleh Dinas Sosial Kota Bogor
25. Penghargaan JDIH Terbaik I dari Kemenkumham
26. Bogor Tanpa Kantong Plastik Penghargaan Smart Environment dari Kemenkominfo
27. Penghargaan Kota Ramah Sepeda dari Bike to Work Indonesia
28. Penghargaan Terbaik 1 Pengelolaan Media Sosial Tingkat Kota/Kabupaten se-Jawa Barat.
29. Kecamatan Bogor Tengah meraih Terbaik 2 Pengelolaan Media Sosial Tingkat Kecamatan se-Jawa Barat.
30. Kelurahan Mulyaharja meraih Terbaik 2 Pengelolaan Media Sosial Tingkat Kelurahan/Desa se-Jawa Barat.
31. Juara 2 P2WKSS Tingkat Provinsi Jawa Barat
32. Juara Harapan 1 Lomba Posyandu Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2021



33. Penghargaan RTDI dan RKCI 2021 Peringkat ke 3 Kategori Kota Menuju Kota Cerdas
34. Penghargaan RTDI dan RKCI 2021 Peringkat ke 2 Kategori Kota Ekonomi Cerdas
35. Penghargaan RTDI dan RKCI 2021 Peringkat ke 4 Kategori Kota Masyarakat Cerdas
36. Penghargaan RTDI dan RKCI 2021 ke 5 Kategori Kota Lingkungan Cerdas
37. Penghargaan RTDI dan RKCI 2021 Peringkat ke 5 Kategori Kota Mobilitas Cerdas
38. Penghargaan RTDI dan RKCI 2021 Peringkat 1 Kategori Kota Kesehatan Cerdas
39. Penghargaan RTDI dan RKCI 2021 Peringkat 2 Kategori Kota Kota Tangguh
40. Penghargaan RTDI dan RKCI 2021 Peringkat 3 Kategori Kota Tanggap Perubahan Iklim
41. Penghargaan RTDI dan RKCI 2021 Peringkat 2 Kategori Kota Energi Cerdas
42. Penghargaan RTDI dan RKCI 2021 Peringkat 5 Kategori Kota Kesiapan Digital Terbaik
43. Penghargaan Anugerah Kebudayaan PWI Pusat Tahun 2021
44. Penghargaan Nirwasita Tantra Award Tahun 2021
45. Penghargaan Kampung KB Award dari BKKBN Jawa Barat Tahun 2021

C. Inovasi Kota Bogor Tahun 2021

Guna meningkatkan mutu dan pelayanan kepada masyarakat secara luas , Kota Bogor menciptakan inovasi –inovasi dari berbagai aspek yang kemudian diimplementasikan sesuai dengan misi –misi yang ada pada RPJMD Tahun 2019 -2024 .

Tabel 5.3
Daftar Inovasi Tahun 2021

No	Inovasi	Aspek	Inovator	Implementasi
1.	New Normal Wedding Concept at Hotel	Ekonomi	Kebudayaan	Misi 2, Misi 3
2.	Tetap Produktif Dengan AKB di Restoran Kota Bogor	Ekonomi	Pariwisata	Misi 2, Misi 3
3.	Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Layanan Publik di Kota Bogor	Pelayanan Publik	Penanaman modal	Misi 1, Misi 2, Misi 3
4.	Pasar Rakyat New Normal	Ekonomi	Perdagangan	Misi 2, Misi 3
5.	Bogor Kota Dalam Taman	Pariwisata	Pariwisata	Misi 2, Misi 3
6.	Adaptasi Kebiasaan Baru Pasar Modern di Kota Bogor	Ekonomi	Perdagangan	Misi 2, Misi 3
7.	Booking Antrian Online MPP	Pelayanan Publik	Penanaman modal	Misi 2
8.	SEHAT ALA BADRA (SEHAT ALAMI BADAN/RAGA)	Kesehatan	Kesehatan	Misi 1, Misi 2
9.	“Mobile Laktasi” atau “MOLASI “	Kesehatan	Kesehatan	Misi 1, Misi 2
10.	SOMETHING KA DOOR DOOR	Kesehatan	Kesehatan	Misi 1, Misi 2
11.	GEMAS “Generasi Emas Anak Sehat”	Kesehatan	Kesehatan	Misi 1, Misi 2
12.	DIVA DARA	Kesehatan	Kesehatan	Misi 1, Misi 2
13.	SAVA 61 (periksa iVA 6 bulan dan 1 tahun)	Kesehatan	Kesehatan	Misi 1, Misi 2
14.	Gadar Polisi (Gerakan Sadar Polio Injeksi)	Kesehatan	Kesehatan	Misi 1, Misi 2
15.	SIP BOS (Sadari, Ingat, Pastikan Balita Anda Mendapat Imunisasi Booster)	Kesehatan	Kesehatan	Misi 1, Misi 2
16.	Management Informasi System (MIS)	Pelayanan Publik	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Misi 2



No	Inovasi	Aspek	Inovator	Implementasi
17.	SIMA PANGERAN	Perhubungan	Perhubungan	Misi 2
18	PATEN Kecamatan Bogor Utara	Pelayanan Publik	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Misi 2
19	SIMANTEP	Kesehatan	Kesehatan	Misi 1, Misi 2
20.	SISIRAH (Sistem Informasi Ruang Terbuka Hijau)	Pelayanan Publik	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Misi 2
21.	Website Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP)	Ekonomi	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Misi 2
22.	SIMAE (Sistem Informasi Manajemen Angkutan Elektronik)	Perhubungan	Perhubungan	Misi 2, Misi 3
23.	SIMASDA (Sistem Manajemen Aset Daerah) Kota Bogor	Pelayanan Publik	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Misi 2
24.	e-SPPT Kota Bogor	Pelayanan Publik	Keuangan	Misi 1, Misi 2, Misi 3
25.	SIMA PANGERAN (Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor)	Perhubungan	Perhubungan	Misi 1, Misi 2
26.	EMAS (Expanding Maternal and Neonatal Survival) Kota Bogor	Kesehatan	Kesehatan	Misi 1, Misi 2
27.	API BPN (Application Programming Interface Badan Pertanahan Nasional)	Keuangan	Keuangan	Misi 2
28.	API KPK (Application Programming Interface) Kota Bogor	Keuangan	Keuangan	Misi 2
29.	API Tax Clearance (Application Programming Interface Tax Clearance) Kota Bogor	Keuangan	Kepegawaian	Misi 2
30.	e-Retribusi	Ekonomi	Keuangan	Misi 2 , Misi 3

No	Inovasi	Aspek	Inovator	Implementasi
31.	PBB Online Kota Bogor	Pelayanan Publik	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Misi 2 , Misi 3
32.	SIMTAKA (Sistem Manajemen Tata Naskah)	Pelayanan Publik	Kearsipan	Misi 2
33.	SIPASPROP (Sistem Informasi Pasar Properti) Kota Bogor	Ekonomi	Keuangan	Misi 2, Misi 3
34.	SIVERA (Sistem Informasi Verifikasi Pajak Daerah) Kota Bogor	Pelayanan Publik	Keuangan	Misi 2, Misi 3
35.	SiDoGi (Sistem Informasi Dokumen Digital)	Pelayanan Publik	Kearsipan	Misi 2, Misi 3
36.	VO BPHTB (Validasi Online BPHTB) Kota Bogor	Pelayanan Publik	Keuangan	Misi 2
37.	Kujang Fresh Perumda Pasar pakuan Jaya	Ekonomi	Perdagangan	Misi 2 , Misi 3
38.	SOLID (Sosial Integrasi Data) Kota Bogor	Sosial	Sosial	Misi 2, Misi 3
39.	SIKANCIL BERLARI (Sistem Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berintegritas Layanan Prima)	Kependudukan	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Misi 2, Misi 3
40.	Prokes di Restoran Bumi Aki Pajajaran	Ekonomi	Pariwisata	Misi 2
41.	INTERAKSI DGIS (INTEGRASI, KOLABORASI, AKSELERASI PENGGUNAAN DRONE DAN GIS)	Pelayanan Publik	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Misi 2
42.	MIS LLTT (Management Information System Ver 2 Layanan Lumpur Tinja Terjadwal)	Pelayanan Publik	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Misi 2
43.	e-MOLEN (Sistem Informasi Monitoring Online) Kota Bogor	Keuangan	Keuangan	Misi 2, Misi 3



Langkah yang masih panjang dalam upaya pencapaian target yang tertuang dalam visi dan misi RPJMD Kota Bogor. Pencapaian selama Tahun 2021 merupakan bagian dari kinerja seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kota Bogor beserta seluruh jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kota Bogor untuk merealisasikan cita-cita tersebut. Oleh karena itu sinergitas dan kolaborasi dari seluruh stakeholder Kota Bogor sangat kami harapkan baik melalui karya, inovasi, saran dan kritik membangun serta dukungan yang nyata lainnya agar harapan dan cita-cita menuju Kota Bogor yang lebih baik sesuai dengan RPJMD Kota Bogor dapat kita realisasikan tepat pada waktunya.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Wali Kota Bogor Akhir Tahun Anggaran 2021. Harapannya kedepan bahwa kinerja dalam pembangunan di tahun mendatang akan lebih baik. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kemudahan dan meridhoi seluruh langkah serta niat baik kita dalam membangun Kota Bogor yang mampu memberikan dampak manfaat luas bagi masyarakat dalam kehidupan yang nyaman dan sejahtera.